

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan penduduk yang cukup banyak yaitu sekitar 237.641.326 jiwa menurut survei BPS pada tahun 2010.¹ Bahkan diproyeksikan pada tahun 2015 penduduk Indonesia akan mencapai angka 255.461.700 jiwa.² Namun, potensi sumber daya alam yang ada masih belum disertai dengan sumber daya manusia dan manajemen pengelolaan yang baik, sehingga masih banyak dijumpai masyarakat tertinggal. Pembangunan dan program-program yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan cenderung hanya terfokus di tingkat pusat atau kota-kota besar saja karena masih sangat sedikit pembangunan ataupun program-program peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan yang bisa dirasakan oleh masyarakat khususnya mereka yang berada di daerah terpencil.

Masyarakat masih banyak yang belum bisa menikmati kekayaan alam dari tanah mereka sendiri. Banyak kita jumpai kekayaan alam Indonesia yang ternyata justru dinikmati oleh pihak asing. Mereka mengeruk sebagian besar sumber daya alam yang kita miliki tanpa memberikan dampak positif untuk masyarakat disekitar serta mengesampingkan prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan. Hal tersebut

¹ www.bps.go.id

² www.bps.go.id

berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kondisi tersebut pada akhirnya menimbulkan kesenjangan dan tidak meratanya pembangunan.

Kondisi yang demikian nampaknya perlu dilakukan penanganan yang serius dan berkelanjutan untuk melepaskan masyarakat kita dari jerat ketidaksejahteraan dan kemiskinan. Untuk menjawab tantangan tersebut, membutuhkan peran serta dari seluruh elemen baik pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Strategi pengentasan kemiskinan dan ketidakberdayaan masyarakat harus dilakukan dengan pendekatan struktural maupun kultural. Perumusan kebijakan serta produk-produk pemerintah berupa program-program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan merupakan strategi dengan pendekatan struktural yang juga harus diimbangi dengan strategi yang memfokuskan pada pendekatan kultural, yakni upaya-upaya yang melibatkan langsung peran serta masyarakat itu sendiri yang menitikberatkan kemandirian masyarakat untuk menjadikan dirinya lebih sejahtera.

Sejatinya, negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab atas kesejahteraan rakyat sebagaimana telah disepakati sebagai tujuan negara Indonesia dan telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kesejahteraan umum atau kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan hanya jika kemiskinan dapat dikurangi. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat pada akhirnya menjadi fokus pemerintah Indonesia sebagaimana

tercantum pada poin keempat dalam program prioritas nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2009-2014.³

Pemerintah dituntut untuk bisa menekan angka kemiskinan di Indonesia dengan berbagai cara baik dalam ranah struktural ataupun kultural. Pada ranah struktural misalnya, pembuatan kebijakan pro rakyat dan mengedepankan kepentingan rakyat selalu digalakan. Pada tataran kultural, pemerintah mendorong dan mendukung keberlangsungan program-program yang ada dan dibentuk dengan berbasis kerakyatan. Salah satu dari sekian banyak upaya tersebut ialah dengan digalakkannya program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat dinilai sebagai jalan baru bagi upaya menciptakan kemandirian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melihat kondisi yang terjadi di Kabupaten Kebumen, dimana berdasarkan pada data BPS provinsi Jawa tengah, Kabupaten Kebumen merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang rentan dengan kemiskinan, akhirnya program pemberdayaanpun dirasa menjadi perlu untuk digalakan kedalam kehidupan masyarakat agar mampu merubah kondisi yang demikian. Bahkan selama 5 tahun berturut-turut, dari tahun 2008 hingga 2012, Kabupaten Kebumen selalu berada pada posisi pertama atau kedua sebagai Kabupaten/Kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah.

³www.bappenas.go.id

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kebumen

No	Tahun	Jumlah (Ribuan Jiwa)	Prosentase
1	2008	334,9	27,87 %
2	2009	309,6	25,73 %
3	2010	263,0	22,71 %
4	2011	279,415	24,06 %
5	2012	258,5	22,40 %

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Hal ini jelas menjadi hal yang memprihatinkan bagi masyarakat Kebumen. Bahkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kebumen tahun 2005-2025, pemerintah Kabupaten Kebumen menargetkan pada tahun 2015 angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen menjadi tidak lebih dari 14,45 %. Namun pada faktanya, sampai pada akhir tahun 2012 angka kemiskinan kebumen masih relatif tinggi yaitu 22,40 %. Artinya, pemerintah Kabupaten Kebumen harus bekerja ekstra untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan tersebut sesuai dengan RPJPD Kabupaten Kebumen. Dibutuhkan strategi dan terobosan baru untuk memperbaiki kondisi tersebut. Maka dari itu pemberdayaan dinilai sebagai langkah yang paling efektif dimana konsep pemberdayaan memfokuskan pembangunan yang berpusat pada pembangunan manusia.

Sejalan dengan itu, pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan juga menjadi salah satu strategi yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam

upaya memandirikan masyarakat dan diharapkan mampu mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat sebagaimana juga tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018. Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang dimaksud meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik, dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan, dan upaya peningkatan kapasitas masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencanangkan program-program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang bersumberdaya masyarakat seperti Posyandu, PKK, Karang Taruna, Unit Ekonomi Desa Simpan pinjam (UED-SP), BUMDes, Pasar Desa dan sebagainya.

Tabel 1.2
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Jawa Tengah
Tahun 2008-2012

No	Tahun	Jumlah LPMD/K
1	2008	8574
2	2009	8576
3	2010	8576
4	2011	8576
5	2012	8578

Sumber: Bapermades Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Pemberdayaan Masyarakat menjadi salah satu program kerja Pemerintah Jawa Tengah pada periode 2013-2015 dengan mengupayakan terwujudnya desa mandiri sebagaimana tercantum dalam 11 program unggulan Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah pada poin ke empat.⁴ Sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, pariwisata dan pengentasan kemiskinan masih menjadi isu strategis dalam pembangunan di Jawa Tengah dan Kabupaten Kebumen khususnya.

Program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan, sebagaimana telah menjadi program pemerintah baik ditingkat pusat, pemerintah provinsi, juga menjadi program pemerintah Kabupaten Kebumen. Sebagaimana tercantum dalam point kedua Misi pembangunan RPJP Kabupaten Kebumen tahun 2005-2025 dijelaskan bahwa salah satu fokus pemerintah Kabupaten Kebumen ialah mengurangi tingkat kemiskinan penduduk. Dari pemaparan diatas dapat dilihat bahwa salah satu poin penting dalam kebijakan Perencanaan pembangunan Nasional, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kebumen ialah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan dengan memaksimalkan potensi lokal dan menciptakan kemandirian masyarakat.

Dalam Rangka mewujudkan Visi Misi pembangunan tersebut dan sebagai langkah strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Caruban, maka pemerintah Desa Caruban juga telah menggagas beberapa program pemberdayaan yang tentu saja dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat serta potensi yang dimiliki Desa Caruban. Penulis mencoba mengklasifikasikan program-program tersebut kedalam 3 kategori. Pertama, program pemberdayaan yang mencakup aspek

⁴ www.jatengprov.go.id

ekonomi yakni Kelompok Tani, Kelompok Ternak, Kelompok Usaha Dagang, dan Kelompok Keterampilan dan Jasa Menjahit. Pemberdayaan kelompok atau komunitas tersebut bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan menambah pendapatan bagi anggotanya.

Kedua, program pemberdayaan yang mencakup aspek sosial yakni PKK, Posyandu, Karang Taruna. Program pemberdayaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan solidaritas sosial dan mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat Desa Caruban dengan berbagai kegiatan sosial yang dilakukan. Kondisi sosial yang ideal bagi masyarakat menjadi tujuan dari dibentuknya program atau kelompok ini. Ketiga, ialah program pemberdayaan pada aspek budaya yakni kelompok kesenian Janeng, kelompok kesenian Kuda Lumping, dan kelompok kesenian Karawitan. Kelompok ini mengupayakan kelestarian kesenian tradisional setempat sebagai bentuk keprihatinan atas kesenian dan kebudayaan asli Kebumen yang mulai menghilang seiring dengan perkembangan zaman. Regenerasi terhadap anak muda juga menjadi fokus utama kelompok kesenian tersebut. Selain itu, kelompok ini juga berupaya mempertahankan eksistensi dan mengembangkan kreativitas kesenian tradisional ini agar memiliki nilai ekonomis sebagai tambahan pendapatan bagi para anggotanya.

Program pemberdayaan tersebut nantinya diharapkan mampu membawa dampak positif bagi kondisi kesejahteraan masyarakatnya. Dari pengamatan penulis, bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa caruban dalam kurun waktu

setidaknya 6 hingga 7 tahun terakhir belum menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan meskipun berbagai upaya dan kebijakan baik dari tingkat terendah (desa/kelurahan) sampai tingkat tertinggi (nasional) telah dimodifikasi sedemikian rupa. Penulis mencoba merujuk pada standar Bank Dunia bahwa masyarakat tergolong miskin jika ia hanya memperoleh pendapatan sekitar 2 US\$⁵ atau jika kita rupiahkan saat ini sekitar Rp. 25.000,- per hari. Ketika kita berfikir secara logis, jika dalam satu keluarga yang beranggotakan misalnya 4 atau 5 anggota keluarga hanya mampu memperoleh pendapatan Rp. 25.500,- per hari yang notabene melebihi standar kemiskinan di atas, ternyata masih jauh dari kata layak untuk dikategorikan sebagai masyarakat yang tidak miskin. sedangkan pendapatan rata-rata masyarakat Caruban sebagai buruh tani hanya Rp. 20.000,- per hari. Itu artinya, dengan standar kemiskinan ada pada perolehan pendapatan sebesar 2 US\$ atau sekitar Rp. 25.000,- per hari saja masyarakat desa Caruban masih banyak yang masuk kedalam kategori miskin, maka sesungguhnya fakta yang terjadi dilapangan masih lebih banyak lagi masyarakat yang sebenarnya termasuk kategori masyarakat miskin.

Kedua, bahwa potensi utama desa Caruban ada pada sektor pertanian sehingga sebagian masyarakat desa Caruban bermata pencaharian sebagai petani. Oleh karena itulah, kelompok pemberdayaan petani memiliki peran yang sangat strategis dan paling dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga penulis ingin mengetahui sejauh mana kelompok tani sebagai kelompok pemberdayaan mampu memberikan dampak bagi

⁵www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2012/01/04/171751/standar-garis-kemiskinan-masih-terlalu-rendah, diakses pada tanggal 7 juli 2015 pukul 21.15 WIB.

masyarakat Caruban mengingat sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani.

Ketiga, fenomena sosial lain yang juga menjadi alasan ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian ini yaitu dari hasil pengamatan penulis, bahwa terlihat sudah mulai terbentuk kesadaran dan kepedulian masyarakat desa Caruban akan kondisi kesejahteraan mereka ataupun orang-orang disekitar mereka yang dinilai masih perlu adanya peningkatan agar tercipta kualitas hidup yang lebih baik dan terjadi pemerataan kesejahteraan.

Dengan kondisi tersebut pada akhirnya menjadikan program pemberdayaan menjadi wadah yang mereka pilih sebagai solusi atas masalah dan tantangan yang mereka hadapi meskipun sesungguhnya pemahaman mereka mengenai apa dan bagaimana sebenarnya konsep pemberdayaan masyarakat harus di lakukan secara ideal belum dipahami secara utuh. Sehingga menurut penulis, sebagai respon atas kondisi yang terjadi di Desa caruban seperti yang telah dipaparkan diatas, maka konsep pemberdayaan dalam berbagai aspek mulai dikembangkan oleh pemerintah desa dan *stakeholder* lainnya karena dinilai efektif dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dimana konsep kesejahteraan tidak hanya melihat pada terpenuhinya kebutuhan ekonomi, namun juga aspek sosial, budaya, politik, dan lainnya juga harus terwujud dalam tatanan dan kondisi sosial yang ideal.

Melihat latar belakang masalah diatas, penulis mencoba melakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana program pemberdayaan masyarakat dirasakan kebermanfaatannya oleh masyarakat Desa Caruban serta seberapa besar dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya program pemberdayaan sehingga pada akhirnya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di Desa Caruban dapat terwujud.

B. Rumusan Permasalahan

Mengacu pada paparan diatas, penulis kemudian membuat sebuah rumusan yang sejatinya akan dapat menjaga pembahasan dalam penelitian laporan ini tidak melebar dan tidak tepat sasaran. Rumusan ini ditujukan agar penelitian ini dapat memberi sebuah jawaban lugas yang nantinya bisa dipahami dan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang ada. Sesuai dengan paparan diatas, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi yang dilakukan Gapoktan Karya Dadi Utama untuk menggerakkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengatasi kondisi sosial ekonomi mereka?
2. Apa kendala atau problematika yang dihadapi Gapoktan Karya Dadi Utama dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan?
3. Apa dampak dari adanya Gapoktan Karya Dadi Utama masyarakat bagi kesejahteraan masyarakat Desa Caruban ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan penelitian yang ada, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kehadiran program pemberdayaan Masyarakat di Desa Caruban mampu memberikan dampak bagi masyarakat desa Caruban Kecamatan Adimulyo Kebumen Jawa Tengah yang pada akhirnya mampu mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana komunitas atau kelompok pemberdayaan masyarakat di Desa Caruban mengembangkan strategi dalam menjalankan program pemberdayaan serta kendala-kendala yang di hadapi dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Sebagai bahan masukan bagi pelaksana program pemberdayaan dan masyarakat secara umum akan kesadaran mengenai pentingnya menjadi masyarakat yang berdaya dan mandiri.

3. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat sebagai rekomendasi bagi penelitian sejenis yang juga memiliki fokus kajian pada program pemberdayaan masyarakat.
4. Memberikan gambaran kepada para aktor pemberdayaan masyarakat tentang program pemberdayaan yang telah dan sedang berlangsung, sebagai pengembangan strategi peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan.
5. Sebagai masukan dan rekomendasi bagi pemerintahan Desa Caruban dan masyarakat desa caruban umumnya sehingga dapat menjadi bahan renungan dan evaluasi atas program pemberdayaan yang ada demi perbaikan dimasa yang akan datang
6. Dari sudut pandang penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan keterampilan penulis mengenai upaya pengadaan sebuah program pemberdayaan masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka Sejenis

Studi mengenai pemberdayaan dan pengembangan masyarakat memang sudah banyak dilakukan oleh penulis dari berbagai bidang ilmu. Namun dari beberapa hasil penelitian yang ada, terdapat beberapa perbedaan didalamnya, mulai dari tujuan, metodologi, hingga temuan utama. Untuk memberikan gambaran umum mengenai

studi ini, penulis menggunakan empat jenis tinjauan pustaka sejenis yang kemudian digunakan sebagai bahan perbandingan.

Pertama, skripsi milik Asri Nurlita, Prodi Sosiologi Pembangunan. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta 2011 dengan judul *Kelompok Tani sebagai Wadah Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus: Kelompok Tani Rukun Bhakti I, Desa Sukaraja, Kecamatan Cibugel, Sumedang, Jawa Barat)*.⁶ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan bertujuan untuk menjelaskan secara lebih dalam mengenai Kelompok Tani di Desa Sukaraja dalam usahanya memberdayakan para anggotanya agar dapat mandiri, kreatif, inovatif, serta mendapatkan pengetahuan dalam banyak hal seperti keorganisasian, dan khususnya pengetahuan tentang pertanian sehingga dapat menjawab kebutuhan mereka dalam mencapai kesejahteraan hidup. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa untuk menciptakan petani yang mandiri dan mampu mewujudkan kesejahteraan maka perlu dilakukan pemberdayaan bagi para petani sehingga mereka dapat mengembangkan diri dalam upaya memperbaiki kondisi sosial-ekonomi mereka. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh anggota kelompok tani berupa kegiatan pelatihan, pendampingan, dan pembekalan pengetahuan pertanian, serta pentingnya berorganisasi mampu mendorong terciptanya perubahan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pada akhirnya perubahan sosial-ekonomi berdampak

⁶ Asri Nurlita, *Kelompok Tani Sebagai Wadah Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus: Kelompok Tani Rukun Bhakti I, Desa Sukaraja, Kecamatan Cibugel, Sumedang, Jawa Barat)*, Jakarta, Skripsi Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta (tidak diterbitkan), 2011.

juga terhadap peningkatan pendapatan masyarakat desa secara keseluruhan, termasuk peningkatan pendapatan desa Sukaraja itu sendiri.

Kedua, skripsi milik Lyana Apriyanti, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro 2011 mengenai *Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Kota Semarang (Studi Kasus: Implementasi Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Kelurahan Kemijen Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang)*.⁷ Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dan bertujuan untuk menganalisis apakah ada peningkatan hasil usaha, tabungan anggota, dan investasi usaha dari anggota KSM di Kelurahan Kemijen setelah adanya program PNPM Mandiri Perkotaan berupa pinjaman bergulir. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengukur persepsi anggota KSM mengenai program pinjaman bergulir dari PNPM Mandiri Perkotaan.

Hasil temuan utama penelitian ini menjelaskan bahwa program pinjaman bergulir dari PNPM Mandiri Perkotaan mampu meningkatkan kelancaran usaha mereka. Dari hasil penelitian ini juga ditemukan bahwa ada peningkatan yang cukup signifikan terhadap pendapatan usaha, investasi usaha, serta peningkatan kemampuan menabung dari anggota KSM di Kelurahan Kemijen setelah dibandingkan dari sebelum adanya program pinjaman bergulir dan setelah adanya program pinjaman bergulir. Meskipun demikian, ada juga beberapa anggota KSM di Kelurahan Kemijen

⁷ Lyana Apriyanti, *Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Kota Semarang (Studi Kasus: Implementasi Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Kelurahan Kemijen Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang)*, Semarang, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro (tidak diterbitkan), 2011.

yang mengeleuh mengenai jangka waktu pengembalian modal yang terlalu singkat dan juga bunga yang dirasa terlalu tinggi bagi mereka.

Ketiga, Skripsi milik Indah Yuniati Utami, Jurusan Sosiologi Pembangunan Universitas Negeri Jakarta 2011 yang berjudul *Pemberdayaan Pedagang Makanan Jajanan Melalui Pendampingan* (Studi Kasus: Pengelolaan Program KPMS Masyarakat Mandiri di Kelurahan Cipinang Besar Selatan Jakarta Timur).⁸ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya yaitu menjelaskan peran pendampingan oleh masyarakat mandiri sebagai aktualisasi program pemberdayaan dalam pengelolaan program KPMS di Cipinang Besar Selatan. Kedua, penelitian ini menjelaskan bahwa dinamika dan permasalahan dalam pelaksanaan program pemberdayaan memungkinkan adanya proses belajar, dan partisipasi peran mitra dampingan.

Hasil temuan utama Penelitian ini adalah bahwa program pendampingan oleh Masyarakat Mandiri terhadap Kelompok Pengusaha Makanan Sehat telah terwujud sebuah upaya pemberdayaan masyarakat. Upaya pemberdayaan ini terlihat dengan adanya serangkaian praktik pendampingan dan upaya untuk memfasilitasi mitra dampingan berupa akses pinjaman modal dan sertifikasi usaha dengan memberikan kesempatan kepada mitra dampingan untuk mengembangkan gagasannya sendiri. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa program pemberdayaan tersebut mampu

⁸ Indah Yuniati Uyami, *Pemberdayaan Pedagang Makanan Jajanan Melalui Pendampingan (Studi Kasus: Pengelolaan Program KPMS Masyarakat Mandiri di Kelurahan Cipinang Besar Selatan Jakarta Timur)*, Jakarta, Skripsi Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta (tidak diterbitkan), 2011.

menciptakan iklim kemandirian dan kemampuan mengambil keputusan dalam memecahkan masalah bagi mitra dampingan. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala seperti tingkat usia dan tingkat pendidikan mitra dampingan, upaya pendampingan yang belum maksimal, serta ada ketidakcocokan antara pendamping dan mitra dampingan yang menjadikan komunikasi menjadi tidak maksimal.

Keempat, Tesis milik Muri Demmu, program studi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Makassar 2003 dengan judul *Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pelaku Usaha Sektor Informal di Kelurahan Maricaya Baru*.⁹ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan bertujuan untuk mengetahui karakteristik masyarakat miskin pelaku usaha sektor informal di Kelurahan Maricaya Baru yang menerima dana modal Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP). Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat dalam pengembangan pelaku usaha sektor informal penerima bantuan modal UED-SP di kelurahan tersebut. Selanjutnya penelitian ini juga akan mengidentifikasi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan para pelaku usaha sektor informal tersebut.

Hasil temuan yang didapat dari studi ini adalah bahwa karakteristik masyarakat miskin pelaku usaha sektor informal di Kelurahan Maricaya Baru pada umumnya menggambarkan kondisi masyarakat kecil yang antara lain dicirikan oleh

⁹ Muri Demmu, *Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pelaku Usaha Sektor Informal di Kelurahan Maricaya Baru*, Makassar, Tesis Program Studi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Makassar (tidak diterbitkan), 2011.

pendidikan yang relatif rendah, memiliki anggota keluarga lebih dari empat anggota. Lain dari itu, pendapatan rata-rata perbulan mereka juga rendah. Setelah adanya program pemberdayaan melalui UED-SP, terlihat bahwa ada peningkatan kemampuan berusaha dan kemandirian modal. Namun meskipun demikian, pelaku usahaan sektor informal yang memanfaatkan modal bergulir UED-SP masih belum begitu signifikan jumlahnya. Akan tetapi, tak dapat dielakan bahwa bantuan modal yang mereka terima telah digunakan sebagai tambahan modal dan dirasakan manfaatnya.

Kelima, Skripsi Milik Siti Dwi Yanti Kurniwati, Jurusan Sosiologi Pembangunan Universitas Negeri Jakarta 2014 yang berjudul *Tabungan Paket Lebaran Sebagai Institusi Perantara (Studi Kasus: Tabungan Paket Lebaran AMANAH, Bekasi Timur)*.¹⁰ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, bertujuan untuk mengetahui dan memahami fungsi Tabungan Paket Lebaran Amanah sebagai lembaga perantara masyarakat, khususnya bagi anggotanya diwilayah Bekasi dan Cilincing yang sekaligus sebagai wadah pemberdayaan bagi anggotanya. Kedua, yaitu untuk mengetahui bagaimana dimensi kekerabatan dan ketetanggaan dalam tabungan paket Lebaran Amanah serta mengetahui bagaimana pola jaringan sosial yang dibangun dalam tabungan paket Lebaran Amanah.

¹⁰ Siti Dwi Yanti Kurniwati, *Tabungan Paket Lebaran Sebagai Institusi Perantara (Studi Kasus: Tabungan Paket Lebaran AMANAH, Bekasi Timur)*, Jakarta, Skripsi Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta (tidak diterbitkan), 2014.

Hasil temuan penelitian ini ialah, konsep institusi perantara dan dimensi ketetanggaan dan kekerabatan bertumpu pada dimensi jaringan sosial, interaksi sosial, dan kepercayaan. Interaksi sosial yang dibangun melalui hubungan ketetanggaan dan kekerabatan memberikan kemudahan bagi anggotanya untuk memenuhi kebutuhan lebaran melalui proses angsuran pada kolektor atau ketua kelompok. Penelitian ini juga menunjukkan proses terbentuknya jaringan sosial dan kepercayaan pada pelaksanaan tabungan paket lebaran karena melibatkan keluarga, kerabat, dan teman dekat dalam menjaring anggota. Hasil skripsi ini kemudian memperlihatkan bahwa tabungan paket lebaran Amanah berhasil menjadi institusi perantara yang bergerak secara ekonomi dan sosial sehingga menjadi wadah pemberdayaan bagi anggotanya.

Penelitian yang penulis lakukan memang memiliki kesamaan yaitu membahas tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat. Perbedaan dengan penelitian pertama ialah bahwa penelitian pertama mengidentifikasi program pemberdayaan masyarakat yang diinisiasi oleh lembaga swadaya masyarakat, sehingga ada peran agen eksternal dalam proses pemberdayaan masyarakat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mencoba mengidentifikasi program pemberdayaan yang diinisiasi oleh masyarakat dan pemerintah desa Caruban. Perbedaan dengan penelitian kedua ialah bahwa penelitian tersebut mencoba mengukur keberhasilan program pemberdayaan berupa simpanan bergulir terhadap peningkatan hasil usaha, tabungan anggota kelompok, dan investasi usaha anggota kelompok melalui metode kuantitatif. Sedangkan Penelitian yang dilakukan penulis mencoba mengukur sejauh mana

program pemberdayaan masyarakat di desa Caruban mampu berperan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Caruban melalui metode kualitatif. Selanjutnya penelitian ketiga mencoba memaparkan peran pendampingan oleh masyarakat mandiri dalam pengelolaan kegiatan pemberdayaan dan proses pemberdayaan sebagai proses belajar masyarakat. Sedangkan penelitian penulis ialah mencoba mendiskripsikan peran masyarakat terhadap program pemberdayaan yang ada serta menjelaskan bahwa program pemberdayaan sebagai sarana perubahan mental dan pola pikir masyarakat menjadi lebih modern.

F. Kerangka Konseptual

1. Konsep Pembangunan Sosial dan Pemberdayaan

Pembangunan sosial saat ini menjadi salah satu gagasan yang menjadi perhatian masyarakat. Munculnya gagasan konsep pembangunan sosial berawal dari kondisi dimana masyarakat harus memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dasar mereka dimana kebutuhan dasar setiap orang berbeda-beda dan terus berkembang. Oleh karena itu munculah satu gagasan mengenai pembangunan sosial yang pada dasarnya mengupayakan masyarakat untuk menuju pada kehidupan yang semakin baik dan berkembang dari kondisi sebelumnya. Masyarakat selalu mengharapkan kondisi yang ideal akan dirinya, yakni kondisi dimana kebutuhan mereka bisa terpenuhi, memiliki kehidupan yang aman, serta terciptanya relasi sosial yang harmonis. Menurut Soetomo, pada dasarnya, pembangunan masyarakat mengandung empat unsur dasar yaitu : (1) pembangunan masyarakat pada dasarnya merupakan

proses perubahan, (2) pembangunan masyarakat adalah proses semakin terciptanya hubungan yang harmonis antara kebutuhan masyarakat dengan potensi, sumber daya, dan peluang, (3) pembangunan masyarakat merupakan proses peningkatan kapasitas masyarakat untuk merespon berbagai persoalan yang berkembang, (4) pembangunan masyarakat merupakan proses yang bersifat multidimensi.¹¹

Perspektif pembangunan yang saat ini menjadi fokus perhatian dunia adalah perspektif *Community Development* atau *People Centered Development*. Perspektif ini muncul sebagai antitesis dari perspektif-perspektif pembangunan yang sebelumnya telah ada, yang dikenal dengan perspektif pertumbuhan ataupun perspektif kebutuhan dasar. Hal yang mendasari mengapa dunia berfokus pada perspektif pengembangan masyarakat (*People Development Centered*) adalah hasil analisis yang mengungkapkan bahwa masyarakat sendirilah yang memahami apa yang menjadi persoalan dan apa yang dibutuhkan, serta potensi apa yang mereka miliki sebagai wujud kewenangan didalam proses pembangunan. Dalam perspektif *community development*, sinergi antara otoritas pemerintah dengan potensi dan partisipasi masyarakat sangat dikedepankan. Menurut PBB, *community development* adalah suatu proses yang merupakan usaha masyarakat sendiri, yang diintegrasikan dengan otoritas pemerintah guna memperbaiki kondisi sosial ekonomi dan kultural komunitas, mengintegrasikan komunitas kedalam kehidupan nasional dan mendorong

¹¹ Soetomo, 2011, *Pemberdayaan Masyarakat (Mungkinkah Muncul Anti Tesisnya?)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm: 34.

kontribusi komunitas yang lebih optimal bagi kemajuan nasional.¹² Perspektif ini mencoba mengadopsi pola pembangunan *bottom-up* dimana peran masyarakat lebih dikedepankan ketimbang ikut campur langsung dari negara. Hal ini jelas kontradiktif dengan perspektif pertumbuhan yang cenderung bersifat sentralistik, *top-down*, dan uniformitas. Hal tersebut pada akhirnya berdampak pada perlakuan kepada masyarakat yang cenderung dehumanis serta terjadinya inefisiensi dan tidak relevannya program pemerintah dengan kebutuhan yang beragam dimasing-masing daerah. Oleh karena dominasi peran pemerintah ini, pada akhirnya membuat masyarakat ketergantungan dan jauh dari prinsip dan nilai-nilai kemandirian.

Perspektif kebutuhan dasar melihat bahwa pemerintah satu langkah lebih maju dengan dominasinya atas masyarakat dikarenakan telah mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dari masyarakat, namun karena pemerintah tetap bersandar pada gaya pembangunan yang sentralistik, *top-down*, dan karikatif membuat masyarakat sulit untuk mengembangkan potensi dan sumber daya mereka untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Akibat lain yang lebih fundamental adalah sulit terciptanya proses pembangunan yang berkelanjutan yang mana menjadi prinsip dasar pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut menyebabkan sulitnya menciptakan inisiatif dan kemandirian masyarakat.

Perspektif kebutuhan dasar tidak serta merta menciptakan pemerataan pertumbuhan karena mekanisme *trickle down effect* sebagaimana telah dijanjikan

¹² *Ibid*, hlm: 38.

prespektif ini tidak selalu terjadi. Oleh karena itu, meskipun dalam jangka pendek program-program yang dicanangkan dapat membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar, namun dalam jangka panjang akan menimbulkan sikap ketergantungan. Hal ini disebabkan oleh karena prespektif pertumbuhan dasar kurang memperhatikan pengembangan potensi, sumberdaya, dan kapasitas masyarakat.

Perubahan perspektif pertumbuhan dasar menuju prespektif pengembangan masyarakat tidak selamanya bertahan pada ruang dan waktu yang tidak terbatas. Hari ini semakin banyak negara-negara maju ataupun berkembang yang memilih untuk memformulakan prespektif pembangunan yang terkesan mendikotomi dan mencampur kelebihan di masing-masing prespektif. Salah satunya Indonesia yang tetap memberlakukan prespektif pertumbuhan di skala ekonomi makro dan selanjutnya memberikan program-program yang cenderung populis seperti subsidi BBM, BOS, Jamkesmas, Raskin, KUR, Sekolah Gratis, dll yang notebene program tersebut berdasarkan prespektif kebutuhan dasar. Kemudian terakhir pemerintah juga memberlakukan mekanisme musrembang dari tingkat desa hingga tingkat nasional.

Fenomena diatas menunjukkan bahwa sesungguhnya perspektif pengembangan masyarakat tetap memiliki kelemahan didalam proses implementasi nilai-nilainya dimasyarakat. Banyak nilai yang berlaku dimasyarakat yang hanya berkuat ditataran formalitas, dan tidak menyentuh hal yang substansi dari perspektif pengembangan masyarakat. Pada akhirnya ini menjadi seperti apa yang telah diungkapkan oleh Hegel, bahwa kehidupan tidak pernah terlepas dari proses dialektika, yakni tesis-anti

tesis-sintesis. Maka perspektif ini belum juga menjadi satu-satunya strategi yang paling optimal dalam rangka membangkitkan kondisi masyarakat dari keterpurukannya masing-masing.

Munculnya konsep pemberdayaan sebagai pengejawantahan perspektif *Community Development* atau perspektif yang memfokuskan diri pada pembangunan masyarakat (*People Centered Development*) yang kemudian diimplementasikan kedalam bentuk program pemberdayaan masyarakat sebenarnya merupakan reaksi terhadap kondisi tatanan masyarakat, baik ekonomi, sosial, dan budaya yang semakin menjumpai persoalan yang cukup kompleks khususnya dalam konteks kemiskinan dan kesejahteraan. Upaya penanggulangan kemiskinan hanya dengan memberikan bantuan-bantuan dana bagi masyarakat tanpa ada upaya berkelanjutan pada akhirnya menemui jalan buntu dan hanya menjadikan masyarakat cenderung statis dan menunggu sehingga bukan kemandirian yang tercipta namun justru semakin melemahkan masyarakat.

Pemberdayaan merupakan pendekatan yang sampai hari ini dinilai paling efektif dalam pembangunan sosial dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Hal mendasar dalam konsep pemberdayaan adalah keterlibatan langsung serta peran aktif seluruh lapisan masyarakat sebagai objek sekaligus subjek pemberdayaan. Dalam melakukan penelitian ini, penulis merasa perlu untuk terlebih dahulu memahami makna dari konsep pemberdayaan. Beberapa definisi mengenai konsep pemberdayaan menurut para ahli, antara lain:

1. Menurut David C Korten, Pemberdayaan disebut sebagai model *People Centered Development*, komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan adalah partisipasi. Hal itu dikarenakan masyarakat lebih memahami kebutuhannya dalam pelaksanaan pembangunan, masyarakat tidak lagi sebagai objek penerima hasil pembangunan semata. Namun lebih dari itu, dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu aktor pembangunan yang mampu mempengaruhi keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan.¹³
2. Menurut Jim Ife, Pemberdayaan yakni memberikan orang atau kelompok, sumber-sumber kehidupan mereka, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas mereka menentukan masa depan mereka sendiri dan untuk ikut turut berpartisipasi dalam mempengaruhi komunitas kelompok mereka.¹⁴
3. Menurut Repaport, seorang ahli pembangunan menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk menolong masyarakat guna membangun kekuatan dan ketangguhannya dalam melakukan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan pada konsisi, potensi, dan kemampuan yang ada dan mereka miliki.¹⁵

¹³ Tjahja Supriatna, *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*, (Jakarta, Lembaga Penerbit Rineka Cipta, 2000), hlm: 19.

¹⁴ Jim Ife, *Community Development: Creating Comunity-Vision, Analysis and Practice* (Melbourne: Longman Australia Pty. Limited, 1995) hlm: 183.

¹⁵ Andarus Darahim, “*Bahan Kuliah Strategi Pengembangan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan*”, 2013, hlm: 49.

4. Menurut Permendagri RI Nomor 7 tahun 2007 pasal 1 ayat 8 tentang kader pemberdayaan masyarakat, menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹⁶

Definisi pemberdayaan seperti yang dijelaskan oleh David C Korten menekankan pada peran serta dan keterlibatan langsung masyarakat yakni sebagai objek sekaligus subjek pemberdayaan. Konsep pemberdayaan dapat diterapkan dalam berbagai tingkatan baik individu, keluarga atau kelompok, maupun komunitas atau organisasi. Jadi prinsipnya tidak ada batasan dalam ranah pemberdayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pemikiran Soelaiman yang menjelaskan bahwa poin penting dalam pemberdayaan masyarakat adalah peran aktif dari masyarakat atau yang disebutnya sebagai partisipasi sosial, yakni: keterlibatan aktif warga masyarakat, baik secara perorangan, kelompok, atau dalam kesatuan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan bersama, perencanaan dan pelaksanaan program pelayanan sosial dalam pembangunan masyarakat, yang dilaksanakan didalam maupun diluar lingkungan masyarakat atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosialnya.¹⁷

Pembahasan mengenai pemberdayaan selalu berkaitan dengan konsep pembangunan yang menjadi pondasi bagi perkembangan bangsa Indonesia. Karena

¹⁶ Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, Bandung : Fokus Media, 2007, hlm:23.

¹⁷ Soelaiman Holil, 1985, *Partisipasi Masyarakat*, Bandung: Kopma STKS, Hal: 6.

sejatinya, pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti yang luas. Oleh karena itu, konsep pemberdayaan selalu berkaitan erat dengan tingkat kesejahteraan sebagai tujuan akhir dari pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat tidak selalu mengarah pada aspek ekonomi saja, karena tingkat ekonomi yang tinggi sekalipun belum mampu menjamin adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu program pemberdayaan harus mampu melihat potensi dari masyarakat itu sendiri. Konsep pemberdayaan juga harus mempertimbangkan aspek sosial, yakni melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berasumsi manusia semata-mata menjadi faktor produksi dalam proses kapitalisasi ekonomi. Keselarasan dari berbagai aspek tersebut nantinya akan mampu menciptakan program pemberdayaan yang berkualitas dan mampu dirasakan kebermanfaatannya oleh masyarakat secara luas bahkan lebih jauh mampu memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut.

Tujuan dari adanya program pemberdayaan masyarakat agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri serta menyelesaikan persoalan mereka sendiri dengan kekuatan dan kemampuan mereka sendiri. Masyarakat selalu mengalami apa yang disebut dengan perubahan sosial yang sifatnya dinamis. Pada faktanya masyarakat mengalami perubahan baik yang progresif dan regresif. Untuk mencapai kondisi yang lebih baik atau menciptakan perubahan sosial yang progresif maka diperlukan strategi dari berbagai aspek baik sosial, ekonomi, politik, maupun budaya.

Menurut Ife, setidaknya ada tiga strategi yang dapat diterapkan untuk dapat memberdayakan masyarakat, yakni: perencanaan dan kebijakan, aksi sosial dan politik, serta peningkatan kesadaran dan pendidikan.¹⁸ Melihat dari apa yang telah dikemukakan oleh profesor Jim Ife, maka dalam pemberdayaan masyarakat memang perlu adanya kesinambungan dan relevansi antara pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Jim Ife juga menekankan pada pentingnya peningkatan kesadaran dan pendidikan masyarakat, karena masyarakat terkadang justru tidak sadar bahwa dirinya sedang ada pada kondisi tertindas ataupun tidak berdaya. Ketidaksadaran tersebut terjadi karena tingkat pendidikan yang rendah sehingga kepekaan masyarakat akan kondisi mereka cenderung lemah. Hal ini diperparah oleh tidak adanya keterampilan masyarakat untuk bertahan hidup baik secara ekonomi maupun sosial.

2. Konsep Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan tidak selalu merujuk pada kondisi yang tetap, karena kesejahteraan sejatinya cenderung bersifat relatif karena ukuran ataupun indikator sejahtera dan tidak sejahtera selalu berbeda antara individu satu dengan individu lain ataupun masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Oleh karena itu, kondisi sejahtera dari seseorang atau masyarakat tergantung dari sudut pandang yang dipakai. Dalam batasan inilah kesejahteraan sosial sulit untuk didefinisikan. Meskipun demikian, bukan berarti kesejahteraan sosial tidak dapat didefinisikan.

¹⁸ Miftachul Huda, 2009, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm: 73

Untuk mampu mengidentifikasi masalah penelitian ini, penulis mencoba mencari beberapa definisi kesejahteraan sosial yang dianggap relevan dengan tema penelitian kali ini. Pertama menurut Suparlan bahwa kesejahteraan sosial ialah keadaan sejahtera pada umumnya, yang meliputi keadaan jasmaniah, rohaniah, sosial, dan bukan hanya perbaikan dan pemberantasan keburukan sosial tertentu saja. Jadi kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan dan kegiatan.¹⁹ Kedua, menurut Segal dan Brzuzy bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi sejahtera dari suatu masyarakat. Kesejahteraan sosial meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup rakyat.²⁰ Ketiga, menurut Wilensky Lebeaux bahwa kesejahteraan sosial sebagai suatu sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial yang dirancang untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan. Maksudnya agar tercipta hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada individu pengembangan kemampuan mereka seluas-luasnya dan meningkatkan kesejahteraan mereka sesuai dengan kebutuhan masyarakat.²¹

Dalam konstitusi Indonesia, kesejahteraan sosial dapat dimaknai terpenuhinya kebutuhan seseorang, kelompok atau masyarakat dalam hal material, spiritual, maupun sosial. Hal ini telah termasuk dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun

¹⁹ Mohammad Suud, 2006, *3 Orientasi Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm: 5.

²⁰ *Ibid.*, hlm: 5

²¹ *Ibid.*, hlm: 7

1974 juga tentang Kesejahteraan sosial. Dalam Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.²²

James Midgley juga mencoba mendefinisikan kesejahteraan sosial, yakni suatu kondisi yang harus memenuhi tiga syarat utama: (1) ketika masalah sosial dapat dimanajemen dengan baik, (2) ketika kebutuhan terpenuhi, (3) ketika peluang-peluang sosial terbuka secara maksimal.²³ Setiap orang pasti akan mengalami satu kondisi dimana ia harus berhadapan dengan masalah tertentu baik orang kaya ataupun orang miskin, namun memiliki kemampuan yang berbeda dalam menghadapi masalah tersebut. Kesejahteraannya tergantung pada kemampuan dia dalam menghadapi masalahnya. Setiap orang juga memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi yang tentunya berbeda satu sama lain baik kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, keamanan, dsb. Artinya kesejahteraan juga bergantung pada sejauh mana kebutuhan yang ia perlukan terpenuhi. Terakhir, bahwa peluang sosial yang terbuka juga harus tercipta agar individu atau masyarakat dapat memaksimalkan dan merealisasikan setiap potensi yang dimilikinya.

Secara sederhana, kesejahteraan dapat dilihat dari pemerataan pendapatan, pendidikan yang mudah dijangkau, kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan

²² Miftachul Huda, 2009, *Op.cit.*, hlm: 73

²³ *Ibid.*, hlm: 72

merata. Pemerataan pendapatan berhubungan dengan adanya lapangan pekerjaan, peluang dan kondisi usaha, dan faktor ekonomi lainnya. Kesempatan kerja dan kesempatan berusaha diperlukan agar masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang pada akhirnya mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang mereka terima serta mampu menggunakan pendidikan itu untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya. Pendidikan yang mudah di sini dalam arti jarak dan nilai yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Pendidikan yang murah dan mudah diharapkan masyarakat dapat dengan mudah mengakses pendidikan setinggi-tingginya, sehingga kualitas sumberdaya manusia dapat meningkat. Selain itu, kesehatan juga merupakan faktor penting dalam melihat kesejahteraan. Masyarakat yang sakit akan sulit untuk beraktivitas, sehingga sulit pula untuk memperjuangkan kesejahteraan dirinya. Jumlah dan jenis pelayanan kesehatan harus mampu menjangkau dan dijangkau oleh masyarakat, terutama mereka yang tergolong miskin. Masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Setiap saat mereka dapat mengakses layanan kesehatan yang murah dan berkualitas. Apabila masih banyak keluhan masyarakat tentang layanan kesehatan, artinya negara masih belum mampu mencapai tingkat kesejahteraan seperti yang diharapkan oleh masyarakat.

Setelah memahami beberapa definisi mengenai kesejahteraan sosial diatas, penulis mencoba menyimpulkan bahwa kesejahteraan sosial dapat dimaknai sebagai suatu tindakan yang mengupayakan aksesibilitas bagi segala kebutuhan hidup seperti, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, kenyamanan, rasa aman, serta kemampuan

mengembangkan diri dari setiap individu agar mampu merasakan kehidupan yang ideal bagi mereka.

3. Konsep Intermediary Institution atau Institusi Perantara

Lembaga atau institusi secara sosial diartikan oleh Coon, C.S seperti yang dikutip Hugo sebagai kelompok yang diorganisir untuk sebuah tujuan.²⁴ kemudian menurut Allport yang juga dikutip oleh Hugo yakni kerja sama dalam corak yang teratur dan menjadi kebiasaan.²⁵ Sehingga institusi perantara dapat diartikan sebagai kelompok terorganisir yang bekerja sama dan menjadi perantara demi tujuan tertentu. Institusi perantara bisa juga disebut sebagai lembaga perantara.

Institusi perantara menurut Berger dan Neuhaus sebagaimana dikutip oleh Nugroho menjelaskan bahwa struktur mediasi dapat didefinisikan sebagai lembaga-lembaga yang mempunyai posisi diantara wilayah kehidupan individu secara privat dengan lembaga-lembaga makro yang berhubungan dengan publik. Institusi mediasi merupakan sarana untuk pemberdayaan individu-individu agar mereka tidak mengalami keterasingan dalam menghadapi realitas makro. Lembaga-lembaga mediasi atau institusi perantara diantaranya keluarga, ketetanggaan, komunitas agama, dan kelompok swadaya masyarakat.²⁶ Berlandaskan pada penjelasan ini, penulis melihat bahwa posisi Gapoktan Karya Dadi Utama merupakan institusi

²⁴ Hugo.F Reading, 1986, *Kamus Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Rajawali, hlm: 204.

²⁵ *Ibid.*, hlm: 204.

²⁶ Heru Nugroho, 2001, *Negara, Pasar dan Keadilan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm: 142-143.

perantara yang kemudian mengejawantahkan dan mengaplikasikan program-program pemerintah (negara) agar bisa dirasakan oleh masyarakat (petani).

Masing-masing lembaga mediasi ini dijelaskan bahwa dalam lembaga ketetanggaan dapat dilihat sebagai sebuah kunci dari struktur mediasi dalam menyusun kembali kehidupan yang lebih bermakna bagi individu, karena lembaga ketetanggaan yang kuat dapat dipakai sebagai sarana untuk mencapai keadilan yang lebih besar bagi sebuah masyarakat atau negara. Apabila peran lembaga mediasi ini dioptimalkan, maka akan melahirkan apa yang disebut dengan *neighbourhood governance*, yakni pemberdayaan anggota kelompok ketetanggaan dalam menghadapi kebijakan publik.

Gapoktan hadir sebagai institusi lokal yang terbentuk karena adanya kebijakan pemerintah yang kemudian didorong oleh tindakan kolektif dari masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah mengenai diwajibkannya penyaluran pupuk bersubsidi melalui Gapoktan serta dengan tujuan mengubah kondisi sosial-ekonomi mereka. Menurut Hugo, itulah yang disebut sebagai organisasi informal yang mencakup unit-unit terkecil yang terorganisir untuk mencapai tujuan sosial.²⁷ Upaya tersebut merupakan bentuk aksi kolektif dengan orientasi konflikual yang jelas terhadap lawan sosial dan politik tertentu, yang dilakukan dalam konteks jejaring lintas kelembagaan yang erat oleh aktor-aktor yang diikat dengan rasa solidaritas, dan identitas kolektif yang kuat melebihi bentuk-bentuk ikatan dalam koalisi untuk

²⁷ Reading, *Op.cit.*, hlm: 264.

mencapai pemberdayaan. Dalam hal ini lawan bahwa kebijakan pemerintah atas pembentukan Gapoktan didefinisikan sebagai suatu lawan sosial dan politik atau penulis mengartikan sebagai tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat.

Penelitian yang mengkaji sebuah peran institusi lokal adalah penelitian yang dilakukan oleh Rakhmat Hidayat²⁸ di daerah Banjarsari Jakarta Selatan. Sebuah institusi lokal yang dibentuk oleh masyarakat mampu melakukan sebuah pemberdayaan masyarakat. Tujuan dibentuknya institusi lokal tersebut untuk melakukan penghijauan diwilayah mereka dengan menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk menanam tanaman obat di halaman rumah mereka masing-masing. Dengan adanya program tersebut, masyarakat menjadi berdaya dalam keahlian menanam. Selain itu, program tersebut juga mampu memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat sekitar, karena memperoleh tambahan penghasilan dari hasil tanaman obat-obatan tersebut.

Institusi lokal di Daerah Banjarsari telah mampu memainkan perannya sebagai institusi perantara, dimana tidak hanya dilihat sebagai lembaga perantara dalam kepentingan, yakni kepentingan pemerintah dan masyarakat, namun juga menjadi lembaga perantara dimasyarakat itu sendiri. Hal ini juga yang telah dilakukan oleh Gapoktan desa Caruban untuk melakukan pemberdayaan khususnya

²⁸ Lihat tulisan Rakhmat Hidayat, *Banjarsari: Diantara Krisis Ruang Terbuka Hijau RTH) dan Pemberdayaan institusi Mediasi Lokal*, Jurnal Sosiologi, Vol. 2, No.2, Universitas Negeri Jakarta, 2007.

bagi para petani desa Caruban sekaligus mengupayakan terciptanya petani yang mandiri dan berdaya sehingga petani dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Naoiki Yoshihara dan Raphaella Dewantari²⁹ memberikan contoh lembaga perantara pada fungsi RT dan RW diwilayah menteng atas dan menteng pada masa pemerintahan orde baru menjadi penghubung antara rakyat dengan pemerintah atau lembaga perantara sebagai institusi lokal pada saat itu. Fungsi institusi lokal seperti RT dan RW dimanfaatkan sebagai penerima dan pelaksana semua upaya pemerintah dan rencana untuk pengembangan masyarakat melestarikan dan mempromosikan semangat masyarakat Indonesia melalui musyawarah mufakat dan gotong royong, mengumpulkan iuran dan penggunaan sarana yang tersedia untuk perbaikan kondisi hidup masyarakat, kebersamaan tersebut terlihat melalui beberapa kegiatan seperti kegiatan karang taruna, arisan, siskamling, PKK, kelompok studi Al-Quran, kegiatan bersih-bersih, dll.

Institusi lokal seperti RT dan RW biasanya hanya menjadi penengah antara kepentingan masyarakat, misalnya memberikan surat pengantar ketika membuat KTP di Kelurahan, memberikan surat keterangan tanda miskin untuk suau hal, dan sebagainya. Namun, ada kalanya institusi lokal tersebut sebagai perantara atau penengah bagi masyarakat itu sendiri. Termasuk Gapoktan Karya Dadi Utama sebagai Institusi lokal yang hadir sebagai wadah bagi para petani desa Caruban untuk

²⁹ Naoiki Yoshihara and Raphaella Dewantari Dwianto, 2003, *Grass Roots and Neighbourhood Assolciation*, Jakarta: Grasindo, hlm: 12.

memberdayakan diri agar menjadi petani yang mandiri sehingga bisa meningkatkan taraf hidup mereka.

Institusi lokal sebagai wadah pemberdayaan bagi masyarakat sekaligus penghubung antara negara dengan rakyat dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan juga mengoptimalkan peran jaringan sosial untuk mencapai tujuan bersama. Seperti yang telah dijelaskan oleh Lea Jellinek bahwa jaringan sosial ada dari hubungan sosial antar individu untuk mencapai tujuan bersama.³⁰ Jaringan sosial dibangun melalui arisan, bentuk baru yang menjadi populer di kampung menyatakan bahwa kegiatan ini meniru dari kalangan kelas menengah. Seperti halnya ikatan lain di kampung itu arisan bubar setelah setiap anggota menerima bagiannya, kemudian arisan dimulai kembali tetapi dengan para anggota yang berbeda karena pendapatan penduduk kampung tidak tetap. Ketidadaan kerja sama anggota komunitas yang lebih luas mungkin disebabkan oleh adanya ketidak stabilan masyarakat, tekanan kelangsungan kehidupan sehari-hari, kurangnya nilai-nilai yang sama, dan kepemimpinan.

Ketidaknyamananyang menimbulkan rusaknya jaringan sosial akibat adanya ketidak stabilan kerja sama, pada dasarnya jaringan-jaringan itu timbul karena para individu kekurangan sumberdaya dan harus menolong satu sama lain dalam perjuangan kelangsungan hidup sehari-hari. Jaringan merupakan pertahanan terhadap

³⁰ Lea Jellinek, 1994, *Seperti Roda Berputar: Perubahan Sosial Sebuah Kampung di Jakarta*, terjemahan Eddy Zainuru, Jakarta: LP3ES, hlm: 85.

kekerasan kehidupan perkotaan. Bagaimanapun pada saat yang sama, jaringan-jaringan ini sangat mudah diserang dan terancam oleh ketidakamanan ekonomi dan sosial. Gapoktan Karya Dadi Utama dibentuk dengan modal jaringan sosial yang kuat antara masyarakat desa Caruban baik pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan petani serta agen pemberdayaan lain baik pemerintah Kabupaten Kebumen (Dinas Pertanian dan Peternakan) maupun pihak-pihak lain seperti perusahaan pertanian agar ketidakamanan sosial ekonomi dapat diminimalisir

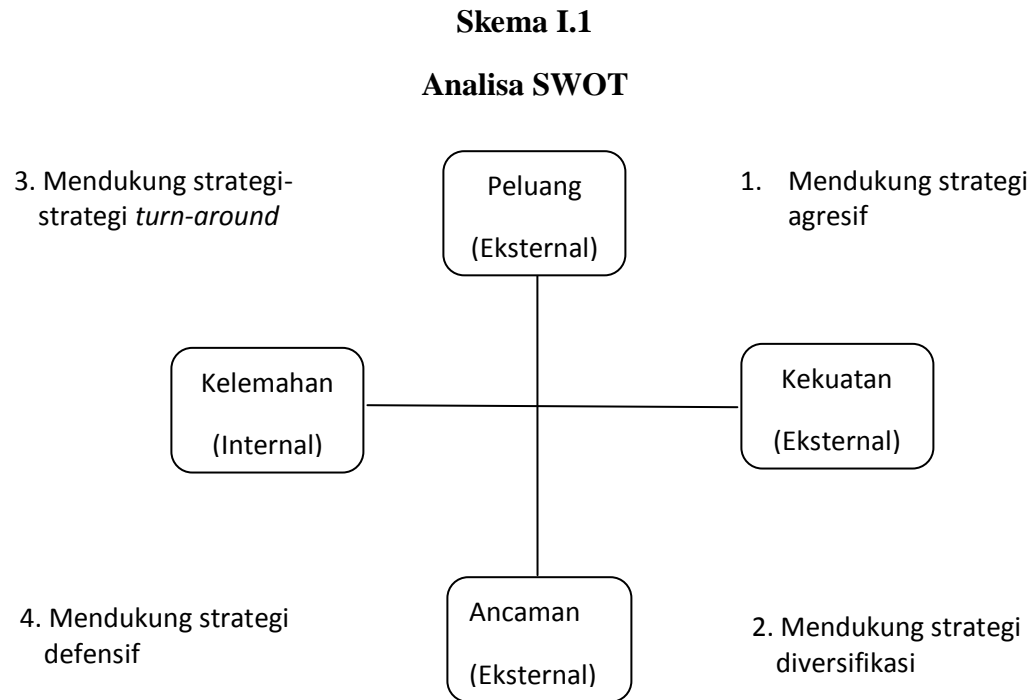
4. Analisis SWOT

Penelitian ini menggunakan analisa SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) sebagai metode yang digunakan untuk menganalisa dalam mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Gapoktan Karya Dadi Utama desa Caruban. Analisis SWOT digunakan untuk mencari solusi atas berbagai masalah yang dihadapi dengan mengoptimalkan potensi yang ada. Dengan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang menjadi faktor pendukung dan penghambat kegiatan pembangunan diharapkan mampu menemukan solusi atas permasalahan yang ada.

Menurut Freddy Rangkuti³¹, identifikasi yang dilakukan dalam analisa SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*Threat*)

³¹ Freddy Rangkuti, 2006, *Analisa SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm: 19.

dengan faktor internal kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*). Berikut ialah gambaran analisis SWOT menurut Freddy Rangkuti:



Sumber: Freddy Rangkuti (2006)

Pada bagan diatas dijelaskan menurut Freddy Rangkuti pertama, kuadran I, situasi dimana memiliki peluang dan kekuatan sehingga memanfaatkan peluang yang ada, strategi yang digunakan pada kondisi ini adalah mendukung kebijakan agresif. Kuadran II, kondisi dimana terdapat ancaman namun masih terdapat kekuatan dari segi internal, sehingga strategi yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan jangka panjang dengan cara diversifikasi.

Kuadran III, kondisi dimana memiliki peluang namun terdapat kelemahan sebagai penghambat perkembangannya, sehingga strategi yang dapat dilakukan

adalah dengan meminimalisir kelemahan-kelemahan yang ada. Kuadran IV, merupakan kondisi paling tidak menguntungkan dimana berada pada ancaman sekaligus kelemahan. Untuk itu penyusunan strategi dapat dikelompokkan kedalam empat bagian yaitu:

- a. Strategi agresif atau strategi SO, (S) untuk menangkap peluang (O)
- b. Strategi diversifikasi atau strategi ST, (S) untuk menghadapi tantangan (T)
- c. Strategi *turnd-around* atau strategi WT, (W) untuk menangkap peluang (T)
- d. Strategi defensif atau strategi WO, (W) dan memanfaatkan peluang (O)

G. Metodologi Penelitian

Metodelogi penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan yang dimaksud mengacu pada prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Menurut Strauss dan Corbin, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari metode kuantitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus yang berarti penelitian tentang subjek penelitian yang berkenaan dengan fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat.³² Asumsi yang digunakan dalam proses pengumpulan dan pengolahan data dalam pendekatan kualitatif harus tetap objektif tanpa ada unsur subjektif dari penulis. Secara implisit, metode deskriptif

³² John W Creswell.2010, *Desain penelitian kualitatif dan kuantitatif*, Jakarta: KIK, hlm: 152

kualitatif diasumsikan sebagai metode yang berusaha menjelaskan situasi, kondisi, dan peristiwa. Gejala-gejala sosial yang muncul kepermukaan merupakan informasi teraktual yang kemudian dirangkum dalam sebuah ide-ide pokok dan gagasan dalam hasil penelitian deskriptif kualitatif tersebut. Penelitian ini, mencoba mendiskripsikan bagaimana program pemberdayaan yang ada di Desa Caruban Kecamatan Adimulyo Kebumen mampu memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penulis melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, namun juga apabila penulis ingin mengetahui informasi secara lebih mendalam dari responden. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan pada laporan tentang diri sendiri atau setidaknya dan atau keyakinan pribadi. Dengan teknik ini, penulis akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipasi masyarakat dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi. Dengan kata lain, wawancara adalah ruh dari satu penelitian tertentu. Penulis nantinya akan melakukan wawancara mendalam dengan berbagai elemen masyarakat yang berkaitan langsung dengan program pemberdayaan di Desa Caruban seperti Kepala Desa, ketua komunitas atau kelompok program pemberdayaan, anggota komunitas atau kelompok program pemberdayaan, Tokoh

masyarakat Desa Caruban, dan masyarakat umum yang merasakan langsung dampak adanya program pemberdayaan tersebut. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan pihak pemerintahan Kabupaten Kebumen Seperti Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Kebumen, Dinas Sosial Kabupaten Kebumen, dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Kebumen.

b. Observasi

Dalam penelitian ini, mengharuskan penulis untuk terjun langsung ke lokasi penelitian. Oleh karena ini peneliti juga menggunakan metode observasi atau pengamatan atas fenomena dan gejala sosial yang ada disekitar lokasi penelitian.

Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara berkala. Hal ini dilakukan untuk memudahkan penulis dalam menangkap makna sosial dari setiap fenomena dan gejala sosial yang muncul di masyarakat. Observasi pertama dilakukan oleh penulis adalah mencari informasi program mengenai program pemberdayaan yang terdapat di Desa Caruban. Observasi selanjutnya adalah dengan mengunjungi lokasi pelaksanaan program pemberdayaan. Observasi selanjutnya adalah dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat Desa Caruban dalam rangka mencari informasi langsung mengenai dampak yang dirasakan oleh masyarakat secara umum dengan adanya program pemberdayaan di Desa Caruban.

c. Studi Pustaka

Hasil-hasil dokumentasi atau data sekunder merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang termasuk dalam teknik studi pustaka. Studi pustaka dapat berupa tulisan, baik jurnal maupun karya ilmiah lainnya seperti skripsi dan tesis, gambar, atau karya-karya monumental. Studi pustaka merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi dalam pendekatan kualitatif. Penelitian ini nantinya akan didukung dengan data skunder yang diperoleh dari pemerintahan desa setempat, artikel, ataupun jurnal ilmiah sebagai pendukung penulis dalam menganalisa hasil penelitian.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah administrasi Desa Caruban Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Jawa Tengah. Waktu penelitian ini dimulai pada awal bulan Mei 2014 hingga akhir bulan Oktober 2014.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian pada studi ini adalah informan yang juga menjadi pengelola atau pelaksana program pemberdayaan. Guna mempermudah penelusuran penelitian, penulis mengkatagorikan subjek penulis menjadi tiga kategori subjek penelitian, yaitu pemerintah, pengelola program, dan perwakilan masyarakat atau masyarakat umum. Subjek penelitian tersebut, nantinya penulis dapat mengetahui bagaimana program pemberdayaan masyarakat di Desa Caruban mampu dirasakan kebermanfaatannya

oleh masyarakat secara umum hingga pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pendekatan kualitatif, data yang diperoleh harus kredibel, akurat, mendalam, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Berdasarkan data yang diperoleh dari subjek penelitian inilah, nantinya penulis akan mengetahui sejauh mana peran pemerintah dan juga masyarakat sebagai subjek pemberdayaan dalam pelaksanaan program pemberdayaan.

Namun, tidak semua data yang diperoleh dari subjek penelitian bisa dijadikan referensi secara utuh. Oleh karena ini diperlukan strategi validasi data secara lebih mendalam. Salah satu strategi validasi data yang digunakan ialah dengan mencari literatur yang sesuai dengan permasalahan penelitian atau disebut dengan data sekunder, diantaranya melalui dokumen-dokumen dari Badan Pusat Statistik, Badan Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Kebumen. Penelitian sebelumnya juga dijadikan barometer penulis dalam strategi validasi data. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian data yang diperoleh dari subjek penelitian dengan literatur yang ada.

4. Peran Penulis

Dapat dikatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang bersifat *interpretif*, karena penyajian penelitian tersebut dijelaskan secara jelas, tegas, dan bebas nilai, serta tanpa mengandung unsur subjektivitas dari penulis. Pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis menjadi landasan dalam menganalisa fenomena dan gejala sosial yang muncul di masyarakat. Lokasi penelitian yang juga

tempat tinggal penulis jelas mempermudah akses penulis selama proses penelitian. Kedekatan secara emosional dengan subjek penelitian dan informan juga mempermudah penulis memperoleh data-data yang dibutuhkan. Orang tua penulis yang juga merupakan anggota salah satu kelompok program pemberdayaan di Desa Caruban jelas menjadi faktor pendukung sehingga penulis dapat dengan mudah melakukan mengenai program pemberdayaan di Desa Caruban. Selain itu, penulis juga memiliki kemudahan akses untuk memperoleh data sekunder dari lembaga-lembaga terkait dari jaringan yang selama ini dibangun. Sudut pandang jauh (*etic*) yang nantinya mampu membawa penulis dalam menganalisa gejala-gejala sosial yang terjadi, yang kemudian mampu mempengaruhi sudut pandang dekat (*emic*) yang notabene merupakan sudut pandang subjektif (*realita*). Dalam prosesnya yang menjadikan *realita* sosial yang terjadi kemudian dijadikan data utama dalam menjelaskan penelitian ini. Hal tersebut berpengaruh untuk menjelaskan pola hubungan antara subjek penelitian dengan objek penelitian saat dilakukan pengamatan.

5. Keterbatasan Penulis

Selama proses penelitian dilakukan, penulis menjumpai beberapa kendala yang menjadi keterbatasan penelitian. Kendala yang pertama dan paling utama adalah soal lemahnya manajemen waktu penulis. Seharusnya penelitian ini sudah dilakukan sejak awal tahun 2014, namun karena berbagai kegiatan dan kesibukan penulis, maka penelitian ini baru bisa dimulai pada pertengahan Mei. Kemudian kendala yang kedua

adalah karena lokasi penelitian yang cukup jauh dari kampus penulis sehingga membutuhkan tenaga, waktu, serta biaya yang lebih selama proses penelitian karena penulis juga dituntut untuk tetap komunikasi dan diskusi dengan dosen pembimbing penulis demi kesempurnaan penelitian. Karena tempat penelitian yang jauh dengan kampus penulis juga menyebabkan terkendalanya penulis dalam mencari sumber referensi yang notabene ada di kampus ataupun sekitar kampus.

6. Triangulasi Data

Triangulasi data berguna untuk menguji apakah data yang diperoleh sesuai dengan fakta dilapangan. Dalam teknik ini, sebenarnya fungsi pengecekan memegang peranan penting untuk memperoleh hasil penelitian yang objektif. Dalam Buku Cresswell, dijelaskan bahwa triangulasi terkait bagaimana penelitian akan menyoroti masalah keadaan internal, kekuatan informasi dan apakah penelitian tersebut sesuai dengan realita.³³ Dalam triangulasi data, penulis melakukan pengecekan ulang tentang kebenaran data, terutama yang terkait dengan sumber masalah yang membuat program terhambat. Triangulasi ini penulis lakukan dengan melakukan konfirmasi kebenaran kepada tokoh masyarakat yang juga menjadi anggota Gapoktan Karya Dadi Utama dan juga Kepala Desa Caruban mengenai bagaimana Gapoktan menjalankan dan mengelola kegiatan pemberdayaan sekaligus apa dampak yang bisa dirasakan oleh petani di desa Caruban. Apakah kegiatan pemberdayaan dan pembinaan yang dilakukan oleh Gapoktan Karya Dadi Utama memiliki pengaruh

³³ *Ibid.*, hlm: 147

sehingga petani menjadi lebih mandiri dan mampu melakukan kegiatan pertanian secara efektif dan efisien sehingga ada peningkatan terhadap hasil produksi pertanian. Dengan demikian kebenaran akan data yang disajikan memiliki tingkat kebenaran yang akurat. Selain itu, pertanggungjawaban akan kebenaran data yang disajikan juga diperkuat oleh dinas atau lembaga pemerintahan terkait yang berkaitan langsung dengan program pemberdayaan.

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian dalam tulisan ini akan disajikan secara singkat oleh penulis, yaitu: **Bab I** penulis menjelaskan latar belakang masalah yang akan dijadikan fokus dalam laporan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka sejenis, kerangka konseptual, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian. Latar belakang dalam tulisan ini lebih menjelaskan mengenai urgensi program pemberdayaan dan pemaparan ilmiah mengapa penulis memilih lokasi penelitian di Desa Caruban Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Jawa Tengah. Latar belakang inilah yang kemudian menjadi acuan dalam merumuskan permasalahan penelitian.

Bab II merupakan pemaparan secara umum mengenai lokasi penelitian. Dimulai dari sejarah singkat desa Caruban, kemudian pembahasan mengenai sejarah pembangunan di Desa Caruban, serta penjelasan mengenai kondisi, karakteristik, potensi, dan struktur masyarakat Desa Caruban. Bab ini juga akan memaparkan program pemberdayaan apa saja yang ada di Desa Caruban.

Bab III mencoba menjelaskan hasil temuan penelitian mengenai profil Gapoktan Karya Dadi Utama serta bagaimana keberlangsungan proses pelaksanaan program pemberdayaan yang dilakukakn sekaligus kendala-kendala yang ada. Menjelaskan mengenai kegiatan pemberdayaan apa saja yang dilakukan oleh Gapoktan, dan bagaimana peran pemerintah dalam Gapoktan. Bab ini juga akan menjelaskan tentang strategi Gapoktan dalam menumbuhkan kesadaran dan kemandirian anggotanya.

Bab IV, penulis mencoba menganalisa sebuah implikasi program pemberdayaan kaitannya dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada hakikatnya merupakan jawaban atas hipotesa sebelumnya dengan melihat bagaimana realisasi dan pelaksanaan program pemberdayaan di desa Caruban. bagaimana peran Gapoktan dalam meberdayakan petani agar menjadi petani yang mandiri dan mampu meningkatkan kesejahteraannya. Bab ini juga akan menjelaskan mengenai analisa SWOT tentang program Gapoktan untuk mengevaluasi program-program tersebut.

Bab V yang merupakan bab terakhir dalam tulisan ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penyusunan kesimpulan dan saran kemudian dijadikan hasil akhi dari penelitian ini. Melalui bab inilah penulis berharap bahwa tulisan ini dapat menjadi bahan renungan dan masukan yang bermanfaat bagi subjek penelitian khususnya untuk menjadi lebih baik kedepannya karena penulis memiliki harapan besar akan perkembangan pembangunan di lokasi penelitian yang notabene tanah kelahiran penulis.

BAB II

WAJAH SOSIAL-EKONOMI DAN BUDAYA DESA CARUBAN

A. Pengantar

Bab dua ini berisi pemaparan dan gambaran secara umum mengenai kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan geografis desa Caruban kecamatan Adimulyo kabupaten Kebumen Jawa Tengah. Pada bagian ini juga penulis sedikit mengulas mengenai sejarah pemabangunan yang telah dicapai desa Caruban dari mulai kepala desa yang pertama sampai dengan kepala desa saat ini. Dengan melihat kondisi tersebut, nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai permasalahan yang ada sekaligus potensi yang dimiliki desa Caruban baik dari aspek sumber daya alam, ekonomi, sosial, maupun budayanya sehingga dapat dicarikan solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan yang ada dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki. Dengan langkah itulah pada akhirnya diharapkan kesejahteraan masyarakat desa Caruban dapat meningkat.

B. Gambaran Umum Desa Caruban

Desa Caruban merupakan salah satu dari 23 Desa yang ada di wilayah Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen. Letaknya sekitar 0,5 KM ke arah Barat dari pusat Kecamatan dan sekitar 15 Km Dari Kota Kebumen sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Kebumen. Luas wilayah desa Caruban adalah 207,7 Hektar yang terdiri dari lahan persawahan dan lahan kering yang berupa pemukiman penduduk,

pekarangan, dan fasilitas umum seperti sekolah, pemakaman umum, tempat peribadatan, pasar tradisional, dan kantor desa. Desa Caruban kemudian terbagi kedalam 4 dusun, yakni dusun Gentan Kidul, dusun Gentan Lor, dusun Karang Jambu, dan Dusun Karang Tunjung dimana masing-masing dusun dipimpin oleh seorang kepala dusun. Desa Caruban juga terbagi menjadi 4 RW dengan jumlah RT sebanyak 14. Mayoritas penduduk desa Caruban adalah penduduk asli setempat yang memang lahir dan dibesarkan di desa Caruban sehingga bisa dikatakan sebagian besar penduduk desa Caruban adalah etnis Jawa. Kemudian Sebagian besar penduduk Desa Caruban merupakan petani karena memang sektor utama pendapatan masyarakat di Desa Caruban adalah sektor pertanian. Jumlah Penduduk Desa caruban adalah 1820 jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 876,27 jiwa per kilometer persegi.

Gambar II.1

Peta Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen



Sumber: Profil Desa Caruban Tahun 2014

Berikut adalah rincian jumlah penduduk desa Caruban berdasarkan kelompok Jenis kelamin, profesi, dan tingkat pendidikan:

Tabel II.I
Penduduk Desa Caruban Berdasarkan Jenis Kelamin

RW	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase (%)
RW 01	187	189	376	20,66%
RW 02	234	239	473	25,99%
RW 03	251	248	499	27,42%
RW 04	229	243	472	25,93%
Jumlah	901	919	1820	100%

Sumber: Profil Desa Caruban

Tabel II.2
Penduduk Desa Caruban Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pra Sekolah	SD	SMP	SLTA	Diploma	Sarjana
54	642	366	367	72	14

Sumber: Profil Desa Caruban

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa dalam aspek pendidikan, masyarakat desa caruban sudah bisa dikatakan baik. Secara umum, masyarakat desa Caruban sudah

‘melek’ huruf dan angka. Generasi tua di desa Caruban saat ini, pada zaman kolonial belanda dulu juga sempat mengenyam bangku pendidikan dasar dimana pada waktu itu masih bernama Sekolah Rakyat atau disingkat SR. Generasi muda desa Caruban saat ini juga sudah cukup baik dalam aspek pendidikan, sebagian besar generasi muda paling tidak merupakan lulusan SLTA, bahkan sudah banyak juga mereka yang menjadi diploma dan sarjana atau sedang melakukan pendidikan tinggi baik diploma maupun sarjana. Seperti yang kita ketahui, bahwa kendala utama masyarakat di pedesaan khususnya adalah mengenai ketersediaan sumber daya manusia untuk kemudian mengelola dan memanajemen potensi-potensi lainnya yang juga dimiliki. Artinya, dengan masyarakat Caruban yang sudah memahami pentingnya pendidikan agar terwujud generasi yang lebih baik dan berkualitas ketimbang generasi sebelumnya serta tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pendidikan yang sudah mulai tercermin dalam kehidupan bermasyarakat, maka hal itu menjadi salah satu potensi bagi masyarakat desa Caruban itu sendiri.

Tabel II.3
Penduduk Desa Caruban Berdasarkan Profesi

Petani	Pedagang	PNS	Buruh
632	72	33	455

Sumber: Profil Desa Caruban

Dari tabel kependudukan tersebut, terlihat bahwa sebagian besar masyarakat Desa Caruban bermata pencaharian sebagai petani dan buruh harian, baik buruh tani

maupun buruh lepas atau serabutan. Hal ini sangat wajar melihat potensi lokal berupa kondisi geografis dan alam yang memang sangat mendukung bagi sektor pertanian karena didukung dengan tanah yang subur, curah hujan yang bagus untuk pertanian, serta iklim yang memang cocok untuk pertanian tanaman padi dan palawija dimusim kemarau. Artinya, pendapatan sebagian besar masyarakat Caruban sangat bergantung pada hasil pertanian. Oleh karena itu, program pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) memiliki peran penting untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas hasil pertanian. Selain Gapoktan tingkat Desa, dibentuk pula Gapoktan di setiap RW yang kemudian memiliki Sub Unit di setiap RT pada masing-masing Gapoktan tingkat RW. Penggunaan pola yang demikian, bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan Gapoktan serta menjamin sasaran program secara menyeluruh bagi masyarakat Desa Caruban.

Selain mengandalkan sektor pertanian, sektor lain yang juga mulai berkembang di desa Caruban adalah peternakan. Sebagai upaya untuk menambah pendapatan juga dilakukan beberapa masyarakat Caruban dengan berternak, hasil ternak ini kemudian menjadi tambahan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Meskipun berternak cenderung usaha pribadi, namun pada akhirnya dalam konteks pembanguna yang lebih makro hal ini mampu meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat Caruban. Oleh karena itu, kelompok atau komunitas peternak akhir-akhir ini mulai dikembangkan sebagai upaya bersama meningkatkan produktivitas dan meningkatkan nilai ekonomi yang ada akhirnya sektor ini dapat mendorong tercapainya

kesejahteraan masyarakat Caruban secara umum disamping sektor pertanian. Sama dengan kelompok tani, kelompok peternak ini kemudian juga mengadopsi konsep pemberdayaan dimana pada akhirnya mampu mewujudkan kemandirian dan kreatifitas para anggotanya sehingga dapat mengembangkan usahanya. Desa Caruban, terdapat Kelompok Ternak di masing-masing RW. Hal ini sedikit berbeda dengan pola Gapoktan dimana terbentuk dari mulai tingkat desa sampai tingkat RT karena memang sejauh ini jumlah masyarakat yang memiliki hewan ternak masih belum terlalu banyak, maka dengan keberadaan Kelompok Ternak hanya di tingkat RW saja dianggap sudah mampu memfasilitasi masyarakat yang memiliki ternak hewan.

Tabel II.4

Kepemilikan Hewan Ternak Masyarakat Desa Caruban

Ayam	Itik	Itik Manila	Kambing	Domba	Sapi	Babi	Kelinci
6180	610	84	76	112	85	10	12

Sumber: Profil Desa Caruban

C. Sejarah Singkat Pembangunan di Desa Caruban

Dari sejarah Desa Caruban atau Babad Caruban, dapat diketahui bahwa kata “caruban” berarti campuran atau gabungan. Desa Caruban pada mulanya adalah hasil penggabungan beberapa wilayah menjadi satu. Menurut sejarahnya, Desa Caruban dahulu berupa hutan belukar yang pada suatu ketika datang beberapa kesatria yang

sakti dan bijaksana yang dikenal dengan nama Mbah Nursadin, Mbah Mingan, Mbah Cempa Sari, Mbah Demang Perno Gati, Mbah Syeh Badar. Mereka kemudian membuka hutan tersebut menjadi pemukiman, dan dibagi menjadi lima wilayah yang dipimpin oleh masing-masing pendekar. Kelima wilayah tersebut yaitu Gentan Lor, Karang Tunjung Binangun, Gentan Kidul, Klantang, Karang Jambu. Sampai hari ini belum diketahui secara pasti pembagian kepemimpinan wilayah dari kelima pendekar tersebut. Berkat kearifan dan kebijaksanaan Mbah Nursadin, rekan-rekannya kemudian mengakui keunggulan Mbah Nursadin dan sepakat mengangkat Mbah Nursadi menjadi pemimpin dari kelima rekannya tersebut, sehingga mbah Nursadi menjadi pemimpin di Desa Caruban sebagai penggabungan dari lima wilayah yang dipimpin oleh rekan-rekannya tersebut. Sampai saat ini, pemilihan Kepala Desa Caruban telah dilakukan sebanyak 9 kali, yakni:

Tabel II.5
Kepala Desa Caruban

Periode	Kepala Desa
1918-1922	Dipodiwongso
1923-1936	Wiryodimulyo
1937-1944	Soeharjo
1945-1984	Atmosuwiryo
1985-1993	Nurul Suhadi
1994-2002	Djomeno
2002-2007	Djumeno
2007-2013	Sajimun
2013-2019	Purwoko

Sumber: Profil Desa Caruban

Pada masa kepemimpinan Dipodiwongso sampai pada Atmosuwiryo, belum ada peraturan yang mengatur masa jabatan kepala desa, sehingga pada waktu itu, masa jabatan kepala desa adalah seumur hidup, ataupun sesuai dengan keinginan masyarakat. Atmosuwiryo merupakan Kepala Desa terlama yang pernah memimpin Caruban yakni selama 39 tahun karena meskipun Indonesia telah merdeka, pada waktu itu masih belum ada peraturan yang mengatur tentang masa jabatan kepala desa. Sosoknya yang begitu berwibawa dan dengan kapasitas beliau, membuat beliau sangat dihormati oleh masyarakat. Baru pada akhir masa jabatan Atmosuwiryo sampai pada saat pemerintahan Djumeno periode pertama, muncul peraturan yang mengatur bahwa masa jabatan kepala desa selama 8 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian pada akhir periode pertama pemerintahan Djumeno samapi pada pertengahan periode kedua masa pemerintahan Djumeno, melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang pemerintah Daerah ditetapkan bahwa masa jabatan kepala desa menjadi 10 tahun. Namun dengan adanya reformasi kebijakan pemerintahan desa dan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana saat itu pak Djumeno masih menjabat sebagai kepala desa, bahwa masa jabatan kepala desa berubah menjadi 6 tahun dan berlaku sampai sekarang.

Meskipun sekarang telah disahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, namun dalam UU tersebut ditetapkan bahwa masa jabatan kepala desa tetap 6 tahun. Hanya saja ada sedikit perbedaan dimana pada UU sebelumnya,

mengatur bahwa kepala desa dapat terpilih kembali untuk satu kali periode berikutnya namun dalam UU terbaru tentang desa kali ini mengatur bahwa kepala desa dapat terpilih kembali untuk dua periode berikutnya.

Pada masa pemerintaha Atmosuwiryo, seiring dengan membaiknya perekonomian dan pembangunan di Indonesia pada masa orde baru, pembangunan di Desa Caruban juga mulai berkembang. Dengan kegigihan seorang Atmosuwiryo bersama dengan swadaya dan sifat kegotongroyongan masyarakat Caruban, untuk pertama kalinya Desa Caruban mampu memiliki Gedung Sekolah Dasar (SD) yang sampai hari ini masih berdiri kokoh. Pembangunan disektor pertanian juga mulai dikembangkan untuk mendorong perkembangan sektor pertanian sebagaimana pada masa itu melalui kebijakan Presiden Soeharto berlaku program Repelita sampai akhirnya Indonesia mampu mencampai Swasembada beras pada tahun 1984.

Kebijakan yang memfokuskan pada peningkatan produksi sektor pertanian oleh pemerintah Soeharto pada akhirnya juga berpengaruh terhadap peningkatan pembangunan di Desa Caruban pada waktu itu. Pemerintahan Nurul Suhadi dan pemerintahan Djumeno juga memiliki andil besar terhadap pembangunan di Desa Caruban. Pembangunan pemerataan terkait sarana prasarana diberbagai sektor tidak hanya pertanian juga mulai dikembangkan, misalnya sektor pendidikan, mulai ada gedung sekolah TK, tingkat pendidikan masyarakat caruban yang mulai meningkat, kemudian pembangunan fisik seperti perbaikan jalan dan jembatan, serta perluasan dan peninggian tanggul sungai karanganyar yang menjadi sumber irigasi sebagian

besar lahan pertanian di Desa Caruban. Pada masa pemerintahan Sajimun, pembangunan desa juga masih berfokus pada hal-hal yang sifatnya fisik misalnya pengaspalan jalan sepanjang kurang lebih 1,5 KM yang menjadi akses penghubung desa Caruban dengan Pusat Kecamatan dan desa-desa tetangga, pembangunan Masjid baru, perbaikan jalan-jalan kampung atau jalan gang.

Pembangunan di Desa Caruban memang terlihat pasang surut. Hal tersebut terjadi memang tidak hanya karena faktor kualitas dan kapasitas kepala desa beserta perangkat desa, namun juga karena adanya berbagai perubahan kebijakan mulai dari tingkat pusat sampai pada tingkat Kabupaten/Kota. Penyusunan RPJMDes harus berpedoman pada RPJMD Kabupaten/Kota yang juga berpedoman pada RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional yang notabene selalu berubah sesuai dengan siklus pergantian kekuasaan baik di tingkat Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota.

Menurut Bapak Purwoko selaku Kepala Desa Caruban, bahwa dengan adanya perubahan kebijakan yang sangat dinamis itulah pada akhirnya sedikit banyak berpengaruh terhadap pembangunan desa Caruban. Lebih dari itu, bahwa pembangunan Desa Caruban ataupun Desa lain pada umumnya sangat bergantung pada anggaran desa yang notabene masih sangat terbatas karena memang sebagian besar berasal dari dana APBD Kabupaten. Oleh karena sumber dana yang hanya berasal dari Pemda dan pajak atau retribusi, kemandirian desa disektor perekonomian pada akhirnya menjadi rendah. Meskipun sudah ada kebijakan yang mengatur tentang sumber pendapatan desa selain dana APBD misalnya dengan mengembangkan

BUMDes, sistem bagi hasil pajak, dan Peraturan Desa atau lebih dikenal dengan Pologoro. Ditambah dengan adanya UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, yang kemudian diberlakukan otonomi desa beserta seperangkat sistem yang menyertainya. Hal tersebut seharusnya mampu mendorong terciptanya kesejahteraan sosial masyarakat desa jika pemerintah desa mampu memanfaatkan otonomi dan berbagai fasilitas serta sumber daya yang dimiliki. Namun itu semua lagi-lagi sangat bergantung pada kualitas SDM dan potensi yang ada di masing-masing desa, sehingga meskipun ada peluang untuk memperoleh sumber pendapatan lain, tentunya akan terjadi perberbedaan antara desa satu dengan desa lainnya. Pada akhirnya justru mengakibatkan kesenjangan antar desa dalam konteks jumlah anggaran yang dimiliki desa.

Oleh karena itu, pemerintah pusat sudah mulai meninggalkan model pembangunan *top down* menuju pola pembangunan *bottom up*, sebagai contoh misalnya dengan mekanisme penyusunan rencana pembangunan yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara langsung dengan adanya Musrembangdes sampai Musrembangnas, kemudian juga dengan adanya kemudahan akses memperoleh modal usaha dan pengembangan program pemberdayaan melalui PNPM Perdesaan yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah Indonesia saat ini.

D. Fasilitas Umum dan Budaya sebagai Faktor Pendorong Pembangunan Masyarakat

Pembangunan masyarakat idealnya harus berjalan seimbang dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial dan budaya. Oleh karena itu selain pembangunan pada aspek ekonomi, aspek sosial dan budaya juga tidak bisa terlepas dari faktor penentu terciptanya pembangunan masyarakat yang berkualitas. Penulis melihat bahwa secara umum kondisi sosial budaya masyarakat desa Caruban cukup. Hal tersebut dikarenakan ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum yang cukup memadai. Dalam perkembangannya, desa Caruban telah memiliki beberapa fasilitas umum yang sangat menunjang kehidupan sosial masyarakatnya, adapun beberapa fasilitas umum yang tersedia di desa Caruban yaitu:

Tabel II.6
Ketersediaan Fasilitas Umum di Desa Caruban

No	Fasilitas	Jumlah
1	Gedung Balai Desa	1
2	Gedung Sekolah Dasar	1
3	Gedung TK&PAUD	1
4	TPQ	2
5	Masjid	2
6	Mushola	11
7	Posyandu	5
8	Pasar Tradisional	1
9	Pemukaman Umum	1

Sumber: Profil Desa Caruban

Ketersediaan fasilitas Umum tersebut sebenarnya sangat mendorong pembangunan sosial masyarakat desa Caruban. Kegiatan keagamaan masyarakat Caruban cukup

aktif, hal tersebut di dukung dengan ketersediaan Masjid sebanyak 2 unit dan juga 11 unit mushola. Ditambah lagi dengan adanya 2 unit TPQ dimana selain menjadi sarana pendidikan juga menjadi sarana keagamaan. Penduduk Caruban sebagian besar beragama Islam sehingga interaksi keagamaannya pun berjalan lancar, meskipun ada sebagian kecil penduduk yang beragama non muslim namun hal tersebut bukanlah menjadi faktor penghambat keharmonisan dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Baik penduduk muslim maupun non muslim sama-sama memegang prinsip saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Artinya kedewasaan dalam beragama ditengah kehidupan bermasyarakat sudah tercermin disini.

Kemajuan dalam aspek pendidikan juga tidak lain karena ketersediaan fasilitas pendidikan yang sudah mulai berkembang. Desa Caruban memiliki satu unit gedung Sekolah Dasar serta satu unit gedung PAUD dan TK. Kepedulian terhadap pendidikan anak-anak desa Caruban juga cukup tinggi, hal ini dibuktikan dengan staf pengajar TK dan PAUD yang berasal dari anggota PKK. Artinya ada keterlibatan dan peranan kelompok program pemberdayaan khusus PKK dalam peningkatan kualitas pendidikan anak-anak di desa Caruban meskipun secara penghasilan, para tenaga pengajar yang berasal dari anggota PKK ini bisa dikatakan jauh dari kata cukup karena hanya berasal dari dana iuran orang tua atau wali siswa. Lebih lanjut lagi bahwa ternyata pembangunan gedung sekolah PAUD dan TK selain berdiri diatas lahan milik desa juga merupakan hasil swadaya masyarakat desa Caruban bersama-sama pemerintah desa.

Meskipun secara legal bahwa Sekolah Dasar berada langsung dalam garis kordinasi dan juga tanggung jawab UPT dinas Pendidikan, namun partisipasi masyarakat caruban dalam hal pembangunan gedung Sekolah Dasar khususnya yang berbentuk fisik juga bisa dikatakan cukup baik. Terkadang pembangunan fisik gedung juga berasal dari alokasi dana pemerintahan desa dan juga swadaya masyarakat desa Caruban melalui inisiatif dewan komite sekolah. Fasilitas umum lainnya yang juga tersedia di desa caruban adalah tempat pemakaman umum. Status kepemilikan tanah pemakaman ini adalah tanah milik desa. Pembangunan dan pengembangan fasilitas pemakaman seperti akses jalan menuju pemakaman, toilet pemakaman, dan juga mushalah pemakaman dibangun dengan dana yang lagi-lagi berasal dari swadaya masyarakat termasuk pengerjaan pembangunannya juga dengan swadaya atau kerja bakti oleh masyarakat desa Caruban.

Sarana kesehatan seperti Posyandu dan Bidan Desa juga terdapat di Desa caruban. di Desa Caruban terdapat 5 unit Posyandu yang terdapat di masing-masing RW serta satu unit Posyandu induk yang terletak di Kantor Kepala Desa. Posyandu ini merupakan bagian dari program kerja kelompok pemberdayaan PKK dimana didalam setiap posyandu ini juga terdapat posyandu lansia sebagai bentuk kepedulian terhadap kualitas kesehatan bagi bayi dan balita serta kaum lansia di desa Caruban. Keberlangsungan Posyandu ini sangat terbantu oleh kader-kader PKK baik di tingkat desa maupun PKK di tingkat RW. Artinya program pemberdayaan PKK memiliki

kontribusi yang cukup signifikan terhadap pembangunan masyarakat di desa Caruban.

Secara struktural PKK ini terbagi kedalam beberapa tingkatan, pertama ada PKK di tingkat RT yang diketuai oleh istri dari Kepala RT setempat, kemudian ada PKK di tingkat RW yang diketuai oleh istri dari Kepala Dusun karena di desa Caruban satu wilayah dusun sama dengan satu wilayah RW. Kemudian terdapat pula PKK ditingkat desa atau disebut dengan PKK induk yang diketuai oleh istri dari Kepala Desa dimana anggota PKK induk ini merupakan perwakilan dari setiap PKK tingkat RT. Secara organisasi PKK desa Caruban sangat aktif dan produktif karena menjadi salah satu program pemberdayaan yang diharapkan mampu menjadi agen pendorong terciptanya perubahan dan pembangunan masyarakat di desa Caruban.

Fasilitas Umum yang juga terdapat di desa Caruban adalah pasar tradisional yakni Pasar Prambanan. Pasar ini sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Pengelolaan pasar ini langsung berada dibawah tanggung Jawab pemerintah Kabupaten Kebumen. Pola kegiatan ekonomi di Pasar tradisional ini menggunakan hari pasaran yaitu setiap hari Rabu dan Sabtu. Kehadiran pasar tradisional ini menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi masyarakat desa caruban dan sekitarnya. Oleh karena itu pasar ini sangat berperan dalam pembangunan ekonomi masyarakat desa Caruban.

Ketersediaan fasilitas umum ataupun sarana dan prasarana di desa Caruban juga kemudian ditunjang dengan akses jalan umum guna mempermudah mobilitas masyarakatnya. Meskipun masih ada beberapa jalan yang kondisinya masih perlu perbaikan. Seperti yang kita ketahui bahwa infrastruktur khususnya jalan umum

memiliki peranan penting dalam upaya pembangunan masyarakat, dimana akses jalan ini berpengaruh terhadap peningkatan produktifitas masyarakat.

Secara umum, akses jalan menuju desa Caruban dari pusat kecamatan ataupun pusat kabupaten sudah sangat mudah dijangkau. Selain karena jarak yang cukup dekat sekitar 1,5 KM dengan pusat kecamatan, juga karena kondisi jalan yang sudah cukup baik khususnya jalan provinsi ataupun jalan kabupaten. Desa Caruban tidak di lewati jalur utama atau jalan provinsi karena memang letaknya yang tidak berada di dekat jalur utama. Desa caruban terletak sekita 6 KM dari jalur utama yaitu jalur selatan pulau Jawa.

Tabel II.7
Infrasturtur Jalan di Desa Caruban

No	Infrastruktur	Jumlah	Kondisi
1	Jalan Kabupaten	1,5 KM	Baik
2	Jalan Kecamatan	2 KM	Agak Rusak
3	Jalan Desa	5,5 KM	Agak Rusak

Sumber: Profil Desa Caruban

Desa Caruban dilalui oleh jalur kabupaten sepanjang 1,5 KM yang kondisinya sudah cukup baik dimana jalan ini merupakan jalur penghubung antar kecamatan dan sekaligus jalan utama menuju pusat kota terdekat sebagai pusat mobilitas masyarakat desa Caruban dan sekitarnya yang letaknya berada di kecamatan Karanganyar yang berbatasan langsung dengan kecamatan Adimulyo. Kota kecamatan Karanganyar sebagai pusat kota terdekat dengan desa Caruban terdapat berbagai sarana umum misalnya Pasar baik tradisional maupun modern, terminal, stasiun kereta api dan juga terdapat berbagai sekolah baik SMP maupun SLTA. Selanjutnya, desa Caruban juga

di lewati jalan kecamatan sepanjang 2 KM sebagai jalur penghubung antar desa, namun meskipun kondisi jalan ini sudah berupa aspal tapi kondisinya kini ada beberapa aspal yang sudah mulai hancur dan perlu adanya perbaikan. Jalan kecamatan ini juga sebagai jalur utama desa karena selain sebagai jalur penghubung antar desa, di jalan kecamatan ini juga terdapat Kantor Balai Desa dan juga Pasar Tradisional. Kemudian terdapat juga Jalan desa sepanjang 5,5 KM dimana jalan ini merupakan jalan penghubung antar wilayah di desa Caruban. Jalan desa ini masih berupa makadam ataupun ada sebagian jalan di beberapa wilayah yang sudah dilakukan pengerasan jalan atau pengecoran. Kondisi jalan desa ini masih sangat diperlukan adanya perbaikan karena jalan desa ini merupakan akses ke beberapa fasilitas umum seperti

Sekolah Dasar, sekolah TK dan PAUD, Masjid, TPQ, posyandu dan juga pemakaman umum. Jalan desa ini sudah beberapa kali diperbaiki baik dari dana APBdes, Bantuan dari pemerintah Kabupaten, maupun swadaya masyarakat. Terdapat juga jalan-jalan tikus atau biasa di sebut gang yang keberadaanya juga sangat membantu mobilitas masyarakat, meskipun gang tersebut terkadang tidak layak di lewati ketika musim penghujan datang karena kondisi jalan menjadi becek. Akses jalan umum yang terdapat di desa Caruban secara keseluruhan sangat penting bagi mobilitas masyarakat. Selain juga sebagai jalur penghubung antar daerah atau wilayah, jalan tersebut juga menjadi akses perekonomian dan juga akses interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Melirik sedikit mengenai budaya masyarakat Desa Caruban, sebagaimana kita ketahui bahwa kebudayaan daerah merupakan warisan nenek moyang yang memiliki nilai luhur. Masyarakat desa Caruban memiliki beragam budaya kesenian yang cukup menarik dan unik. Adapun beberapa kesenian tradisional yang terdapat di Desa Caruban yaitu kesenian Janeng, kelompok kesenian Kuda Lumping atau biasa disebut 'ebleg' oleh sebagian besar masyarakat Caruban, kesenian Karawitan, serta terdapat juga kesenian wayang kulit dan wayang orang atau yang biasa disebut 'ketoprak' oleh sebagian besar masyarakat Caruban meskipun akhir-akhir ini kesenian wayang kulit dan wayang orang sudah tidak begitu aktif karena faktor keterbatasan generasi penerus. Desa Caruban terdapat beberapa kelompok kesenian yaitu, 2 kelompok kesenian Kuda Lumping atau ebleg, 1 kelompok kesenian Janeng, 1 kelompok kesenian Keroncong, 1 kelompok kesenian Karawitan, 1 kelompok kesenian wayang kulit, dan 1 kelompok kesenian wayang orang atau ketoprak.

Kehadiran kelompok-kelompok kesenian ini merupakan upaya untuk melestarikan kesenian tradisional setempat yang mulai menghilang seiring dengan perkembangan zaman. Selain dimainkan saat kegiatan latihan rutin, kesenian ini biasanya dimainkan ketika ada salah satu penduduk yang memiliki hajatan seperti sunatan dan nikahan ataupun juga saat perayaan hari-hari besar seperti hari kemerdekaan RI dan juga tahun baru Islam. Desa Caruban sebenarnya memiliki warisan kesenian tradisional yang sangat beragam yang sampai hari ini masih mudah dijumpai, namun keterbatasan generasi penerus menjadi kendala utama bagi kelestarian dan eksistensi

kesenian tersebut. Oleh karena itu, kehadiran kelompok-kelompok kesenian tersebut menjadi wadah pelestarian budaya dimana regenerasi menjadi fokus utama kelompok kesenian tersebut. Selain sebagai simbol budaya tradisional setempat kehadiran kelompok kesenian tersebut juga sebagai wadah kreatifitas anggotanya agar kesenian tersebut selain memiliki nilai budaya juga memiliki nilai ekonomis sehingga dapat menjadi tontonan yang mendidik sekaligus menarik bagi masyarakat umum.

Dengan demikian, budaya juga menjadi salah satu bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dalam upaya pembangunan masyarakat. Budaya merupakan identitas suatu masyarakat, sehingga upaya pelestariannya menjadi satu hal yang juga penting untuk dilakukan. Kebudayaan juga merupakan bukti sejarah peradaban manusia yang didalamnya terkandung nilai-nilai luhur dan pesan moral yang patut diteladani. Kelompok kesenian tradisional di desa Caruban selain sebagai simbol tradisi budaya lokal, juga sebagai salah satu wadah yang diharapkan memiliki nilai ekonomis khususnya bagi para pelaku kesenian tradisional tersebut.

E. Potensi dan Tantangan Desa Caruban

1. Potensi Ekonomi di Sektor Pertanian dan Peternakan

Sebagai sebuah desa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, serta penggunaan lahan yang lebih banyak digunakan sebagai lahan persawahan, tentunya hal tersebut menjadi potensi utama yang dimiliki oleh desa Caruban. Ketersediaan lahan persawahan di desa Caruban memang terhitung cukup luas, sehingga jelas bahwa sektor pertanian menjadi sektor andalan penduduk desa

Caruban. Lahan persawahan di desa Caruban sekitar 115 ha atau sekitar 55,2 % dari total luas wilayah desa Caruban sekitar 207,7 ha.³⁴ Hasil komoditi tanaman pangan khususnya tanaman padi dan palawija memang sangat potensial untuk dikembangkan di desa Caruban. Sudah sejak zaman nenek moyang bahwa komoditi unggulan desa Caruban adalah tanaman padi. Selain karena faktor ketersediaan lahan persawahan yang cukup luas dan kecocokan tanah, juga karena faktor iklim yang juga sangat mendukung pengembangan tanaman padi dan juga tanaman palawija sebagai bentuk pemanfaatan lahan bila musim kemarau tiba.

Gambar II.2
Tanaman Padi



Gambar II.3
Tanaman Kacang Hijau



Sumber: Dokumentasi Penulis Tahun 2014

Selain itu, pembangunan irigasi yang cukup baik sebagai sektor pendukung utama lahan pertanian masyarakat juga menjadi potensi yang dimiliki oleh desa Caruban. Desa Caruban memiliki saluran irigasi kurang lebih sepanjang 10.300 meter dengan rincian saluran permanen atau beton sepanjang 4.990 meter dan saluran yang masih

³⁴Hasil wawancara dengan Bapak Purwoko, Kepala Desa Caruban pada hari Rabu, 17 September 2014.

tanah sepanjang 5.310 meter.³⁵ Sektor irigasi desa Caruban memang diuntungkan karena dilewati oleh dua aliran sungai yaitu sungai Karanganyar dan sungai Ketek. Kedua aliran sungai ini kemudian menjadi jantung irigasi desa Caruban untuk memenuhi kebutuhan air lahan-lahan persawahan di desa Caruban. Hal ini didukung dengan kebijakan pemerintah desa sebagaimana tertuang didalam RPJMDes dimana pembangunan dan perbaikan saluran irigasi menjadi salah satu fokus utama pembangunan infrastruktur desa. Desa Caruban juga memiliki bendungan atau CEK DAM yang sudah cukup modern yang berada di sungai Karanganyar sehingga pola pengairan lahan persawahan dapat terkontrol dengan baik. Sungai Ketek sebenarnya juga memiliki bendungan atau CEK DAM namun belum modern seperti yang ada di sungai Karanganyar. Pemanfaatan bendungan tersebut ketika musim kemarau datang, sehingga bendungan tersebut di fungsikan untuk menampung air sungai yang kemudian dialirkan ke lahan-lahan persawahan penduduk melalui saluran irigasi yang tersedia. Jika debit air sungai tidak memungkinkan untuk dibendung, maka pemerintah desa Caruban mengambil langkah untuk laporan dan meminta air irigasi dari Dinas SDA Kabupaten Kebumen. Melalui rekomendasi dari Dinas SDA, maka sungai di Desa Caruban dapat memperoleh air irigasi dari Waduk Sempor sebagai sumber Irigasi utama di Kabupaten Kebumen. Waduk Sempor menjadi jantung irigasi di wilayah Kabupaten Kebumen barat, sedangkan untuk wilayah bagian timur, memanfaatkan sumber irigasinya dari Waduk Wadaslintang.

³⁵Hasil wawancara dengan Bapak Sugeng, Kepala PTL Pengairan desa Caruban pada hari Rabu, 17 September 2014.

Gambar II.4
Cekdam Sungai Karanganyar



Sumber: Dokumentasi Penulis Tahun 2014

Gambar II.5
Saluran Irigasi Di Desa Caruban



Sumber: Dokumentasi Penulis Tahun 2014

Potensi pertanian yang sudah cukup memadai ini, kemudian didukung dengan metode pengelolaan lahan pertanian yang sudah modern. Pada zaman dahulu, para petani di desa Caruban masih membajak sawahnya dengan menggunakan tenaga kerbau, namun sekarang proses pembajakan sawah sudah menggunakan tenaga mesin

atau biasa disebut 'traktor'.³⁶ Dengan demikian, pertanian di desa Caruban sudah sedikit mengalami modernisasi alat pertanian sehingga produktifitas petani semakin meningkat dan efisien. Di desa Caruban terdapat 13 mesin pembajak atau 'traktor' milik petani di desa Caruban. Pemanfaatan mesin bajak tersebut adalah dengan menggunakan sistem jasa. Para petani membayar jasa membajak sawah kepada pemilik mesin bajak tersebut. Pembagian luas lahan garapan untuk dibajak bagi masing-masing pemilik mesin bajak ditentukan secara musyawarah antar pemilik mesin bajak dengan melibatkan pemerintah desa Caruban termasuk juga dalam hal menentukan biaya jasa membajak sawah bagi para petani. Biaya yang harus dibayarkan petani kepada pemilik mesin bajak adalah Rp 80.000,- per 100 ubin lahan sawah. Di desa caruban ukuran luas lahan sawah menggunakan ukuran 'ubin' dimana 1 ubin=14,4 meter persegi.³⁷

Potensi ekonomi lain yang juga dimiliki oleh desa Caruban ialah sektor peternakan meskipun masih dalam skala kecil atau peternakan rumah tangga. Bertani adalah profesi yang sangat bergantung pada waktu atau musim. Secara umum, petani akan disibukan dengan lahan pertanian mereka pada saat musim-musim tertentu, misalnya musim tanam, musim pemupukan dan pematangan rumput, serta musim panen. Oleh karena itu ada rentang waktu antar musim yang pada akhirnya petani tidak terlalu disibukan oleh sawah mereka. Oleh karena itu, sebagian besar mereka memanfaatkannya untuk berternak. Selain karena alasan waktu, berternak juga bisa

³⁶Hasil wawancara dengan Bapak Sugeng, Kepala PTL Pengairan desa Caruban pada hari Rabu 17 September 2014.

³⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Joyo, pemilik mesin pembajak sawah hari Rabu 17 September 2014.

dikatakan sebagai usaha sampingan untuk mendapatkan penghasilan tambahan bagi masyarakat Caruban. Pola pertanian yang semacam itulah kemudian menjadikan peluang bagi para petani untuk menjalani usaha ternak. Hal ini secara tidak langsung menjadi potensi ekonomis yang juga ada di desa Caruban.

Mengacu pada data yang tersaji pada tabel II.4 di atas, dapat kita ketahui bahwa sebagian besar masyarakat Caruban memilih untuk berternak ayam ataupun itik. Hal ini terjadi karena memang untuk berternak ayam dan itik cenderung tidak terlalu sulit. Kemudian ternak lain yang juga cukup banyak diminati oleh masyarakat Caruban adalah hewan kambing, domba, dan juga sapi. Meskipun sedikit lebih sulit ketimbang ternak ayam dan itik namun ternak hewan kambing dan sapi ini memiliki prospek ekonomis yang cukup menggiurkan, keuntungan yang diperoleh para peternak ini memang cukup menjanjikan. Kemudian ketersediaan pakan ternak berupa rumput juga merupakan potensi yang dimiliki desa Caruban, sehingga para peternak hewan ini tidak akan kesulitan untuk mencari pakan ternak mereka dan bahkan pakan ternak tersebut dapat diperoleh secara cuma-cuma dengan memanfaatkan rumput-rumput yang tumbuh di setiap pematang sawah ataupun di sepanjang tanggul sungai. Karena alasan itulah, maka minat berternak masyarakat Caruban sebagai usaha sampingan semakin meningkat.

2. Potensi Sosial Budaya

Selain potensi ekonomi, desa Caruban juga memiliki beberapa potensi lain dalam aspek sosial budaya dalam kehidupan bermasyarakatnya. Lembaga Kegiatan Masyarakat Desa (LKMD) dibentuk sebagai wadah untuk menampung dan

menyalurkan seluruh aspirasi dan kreatifitas masyarakat desa Caruban dari berbagai elemen masyarakat seperti PKK dan Karang Taruna. Lembaga ini kemudian menjadi potensi desa yang diharapkan mampu memaksimalkan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Kesadaran masyarakat Caruban akan urgensi pemberdayaan masyarakat sudah mulai tercermin melalui program PKK oleh ibu-ibu kader PKK. Berbagai kegiatan yang produktif secara intensif dan masif telah dilakukan oleh anggota PKK. Para kader PKK nampaknya sudah sangat menyadari pentingnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan Desa, baik pembangunan yang bersifat fisik maupun non fisik. Sebagaimana kita ketahui bahwa pembangunan masyarakat tidak mungkin bisa terlepas dari partisipasi dan keterlibatan masyarakat itu sendiri. Artinya, bahwa kesadaran dan kepedulian masyarakat Caruban mengenai pentingnya keterlibatan mereka dalam proses pembangunan yang sudah cukup baik itu merupakan salah satu potensi yang juga harus dimaksimalkan oleh pihak-pihak terkait baik pemerintah desa maupun masyarakat agar pembangunan masyarakat yang ideal dan memiliki dampak terhadap perubahan sosial kemasyarakatan dapat terwujud secara nyata.

Kepedulian antar sesama, sifat kegotong royongan dan kebersamaan, prinsip saling melindungi dan saling menghormati masih dipegang teguh oleh sebagian besar masyarakat Caruban, interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari berlangsung sangat baik, sehingga terwujud relasi sosial yang ideal baik dalam pekerjaan maupun kehidupan bermasyarakat. Jelaslah, kondisi yang demikian menjadi potensi sosial yang dimiliki desa Caruban.

Kepemilikan adat dan budaya lokal pun tidak bisa dikesampingkan bagi proses pembangunan di desa Caruban. Pelestarian budaya melalui berbagai kelompok-kelompok kesenian merupakan modal yang sangat baik bagi pembangunan mental masyarakatnya. Kesenian tradisional harus dimaknai sebagai identitas budaya lokal yang memiliki nilai-nilai luhur sertasebagai bukti sejarah peradaban manusia terdahulu. Kebanggaan akan budaya dan tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang harus pula dijaga serta diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena alasan itulah, kepedulian masyarakat Caruban akan pentingnya melestarikan tradisi dan budaya setempat nampaknya sudah mulai terbentuk, hal inilah yang kemudian menjadi potensi desa Caruban demi terwujudnya pembangunan masyarakat di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat yang pada akhirnya kesejahteraan masyarakat secara utuh dapat terwujud.

5. Tantangan Desa Caruban

Sama seperti desa lain pada umumnya, desa Caruban juga memiliki tantangan ataupun kendala-kendala dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya secara utuh dimana sudah seharusnya tantangan dan kendala tersebut harus diatasi bersama oleh seluruh pihak dan elemen masyarakat. Tantangan tersebut muncul dari berbagai faktor dan berbagai aspek, baik muncul dari aspek internal maupun eksternal serta faktor alam maupun faktor teknis lainnya. Tantangan ini mau tidak mau harus diakui adanya dan juga harus di upayakan solusinya atau paling tidak di minimalisir agar tujuan dari pembangunan sosial dapat terwujud sehingga kesejahteraan masyarakat juga dapat ditingkatkan.

Memberdayakan masyarakat idealnya harus konsekuen dengan konsep pemberdayaan yang telah dikemukakan oleh banyak ahli. Seperti apa yang dikemukakan oleh Ginandjar kartasasmita bahwa mekanisme pemberdayaan masyarakat haruslah melibatkan dan mengintegrasikan segenap potensi yang ada dalam masyarakat. Pertama dan yang terpenting adalah peranan pemerintah dalam program pemberdayaan itu sendiri. Artinya, birokrasi haruslah menyesuaikan diri dengan misi pemberdayaan tersebut.³⁸

Dalam konteks pemberdayaan di desa Caruban, terlihat bahwa peran pemerintah desa dalam upaya memaksimalkan program pemberdayaan belum secara meyeluruh. Pemerintah desa baru terlihat berperan aktif dalam program pemberdayaan yang berada langsung dibawah garis kordinasi pemerintah desa mislnya PKK. Kemudian kepedulian pemerintah desa juga masih belum tercermin dalam pengelolaan program pemberdayaan Karang Taruna. Hal ini terlihat dengan tidak maksimalnya peran lembaga Karang Taruna dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Caruban khususnya kaum pemuda, bahkan lembaga ini cenderung tidak aktif dalam menjalankan tupoksinya sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan. Kendala utama lembaga ini memang dalam hal penganggaran, nampaknya belum ada alokasi anggaran khusus yang diberikan pemerintah desa kepada lembaga ini ataupun belum terlihat langkah strategis pemerintah desa kaitannya dengan upaya mencari sumber dana untuk lembaga Karang Taruna desa Caruban.

³⁸Ginandjar Kartasasmita, *Bahan Kuliah "Kebijakan dan Pembangunan Sosial" FIA Unibraw*, Malang, 1996, Hlm 48-49.

Sarana dan Prasarana olah raga di Desa Caruban juga belum memadai, belum tersedianya Lapangan olahraga yang sebenarnya memiliki peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya sebagai tempat menggali bakat-bakat anak-anak di desa Caruban, sebagai tempat berkumpul masyarakat dalam acara-acara sereminoal tertentu, kemudian juga sebagai sarana pendidikan olahraga bagi siswa-siswa baik TK dan PAUD maupun Sekolah dasar.

Tantangan lain yang juga harus dicarikan solusinya adalah keterlibatan langsung pemerintah desa terhadap progrma pemberdayaan lain yang ada di desa Caruban, seperti Gapoktan, Kelompok Ternak, Kelompok Usaha Dagang, Maupun kelompok Kesenian. Peran pemerintah sangat penting selain dalam hal penganggaran juga dalam proses pendampingan, pelatihan, maupun proses promosi atau pemasaran produk yang dihasilkan. Kondisi tersebut bukan berarti pemerintah desa Caruban tidak peduli atau bahkan tidak bertanggung jawab atas program pemberdayaan yang ada, namun keterbatasan dalam hal sumber dana masih menjadi kendala besar yang harus dicarikan solusinya secara bersama-sama.

Kualitas SDM perangkat desa nampaknya masih perlu ditingkatkan demi terwujudnya pelayanan publik secara maksimal. Mekanisme perekrutan perangkat desa idealnya haru lebih diperketat agar terpilih perangkat yang memiliki kualitas dan kompetensi yang memadai di bidangnya. Secara struktural, belum ada perangkat desa yang bertanggung jawab langsung terhadap program pemberdayaan masyarakat. Hal ini terjadi memang karena keterbatasan jumlah perangkat desa Caruban dengan

pertimbangan upah atau gaji yang harus dibayarkan nantinya jika harus menambah jumlah perangkat desa.

Tantangan selanjutnya yang harus dihadapi adalah kondisi infrastuktur ataupun sarana dan prasarana yang memprihatinkan. Beberapa jalan umum terutama jalan desa masih membutuhkan perbaikan karena memang jalanan yang masih berupa tanah dan bebatuan, karena kondisinya yang rusak, membuat akses masyarakat Caruban terhambat apalagi ketika musim penghujan datang. Jalan-jalan gang disekitar pemukiman penduduk juga masih banyak yang kondisinya memprihatinkan, lagi-lagi ancaman datang ketika musim penghujan tiba, banyak gang-gang yang sulit dilalui karena kondisinya yang becek dan tergenang air hujan.

Selain itu, di desa Caruban terdapat jembatan yang terletak di sungai karanganyar yang merupakan akses penghubung dengan desa-desa lain di dekitas desa Caruban yang kondisinya rusak berat dan sudah harus segera diperbaiki, selain juga karena faktor usia bangunan, juga karena hampir setiap musim penghujan jembatan tersebut selalu terendam oleh aliran air sungai karanganyar karena memang posisi jembatan yang lebih rendah ketimbang tanggul sungai yang sempat mengalami perluasan aliran sungai dan peninggian tanggul. Oleh karena posisi jembatan tersebut yang lebih rendah ketimbang tanggul sungai, menyebabkan air Sungai Karanganyar meluap pada setiap musim hujan sehingga merusak lahan pertanian dan akses jalan umum menjadi terhambat. Secara tidak langsung kondisi tersebut berpengaruh terhadap produktifitas hasil pertanian sebagian wilayah desa Caruban.

Ancaman kekeringan juga terkadang malanda para petani di sebagian wilayah di desa Caruban, meskipun sudah terdapat bendungan atau DAM di aliran sungai Ketek, namun karena debit air yang tidak memungkinkan pada akhirnya lahan pertanian mengalami kekeringan sehingga lagi-lagi mengakibatkan menurunnya produktifitas hasil pertanian. Masalah lainnya yang harus di hadapi para petani adalah kelangkaan pupuk, hal ini terjadi hampir setiap musim tanam, meskipun kehadiran Gapoktan telah mengupayakan solusi kelangkaan ini, namun belum mampu menyelesaikan masalah ini secara tuntas. Sebagaimana kita ketahui bahwa pupuk merupakan bahan pertanian yang sangat vital bagi kualitas produk pertanian.

Kendala yang juga selalu dihadapi petani adalah ancaman serangan hama yang begitu luar biasa, bahkan tidak sedikit pula petani yang gagal panen karena serangan hama. Hal ini jelas menjadi tantangan serius bagi petani. Kondisi tersebut diperparah dengan tidak stabilnya harga jual padi yang bahkan cenderung merugikan petani. Hampir setiap musim panen, para petani selalu mengeluh dengan harga jual padi yang terbilang rendah.

Tantangan dalam aspek budaya juga dijumpai, misalnya keterbatasan alat-alat kesenian ataupun kebutuhan perbaikan alat-alat kesenian yang sudah tua. Ini menjadi kendala bagi kualitas dan produktifitas kelompok kesenian tersebut. Masalah regenerasi juga menjadi tantangan bagi kelompok-kelompok kesenian di desa Caruban. Tidak banyak generasi muda yang peduli terhadap pelestarian kesenian tradisional karena terkikis dengan perkembangan budaya luar dan arus modernisasi yang sedang berkemabng saat ini. Oleh karena itu, peran pemerintah desa sebenarnya

dibutuhkan untuk melestarikan kesenian tradisional tersebut. Misalnya, bekerja sama dengan kelompok kesenian dan juga instansi terkait untuk mencari bakat-bakat generasi muda agar tercipta regenerasi yang baik dengan mengadakan program pelatihan kesenian dan pendampingan bagi anak-anak muda di desa Caruban dan sekitarnya.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Caruban, bahwa kendala lain yang di alami pemerintah desa adalah kurangnya kesejahteraan perangkat desa dan *stakeholder* lain seperti pengurus PKK, pengurus Karang Taruna, tenaga pengajar TK dan PAUD, serta tenaga pengajar pendidikan keagamaan di desa Caruban. Kondisi tersebut kemudian akan berpengaruh terhadap profuktifitas kerja mereka. Namun dengan pemahaman dan kesadaran mereka, ini bukanlah menjadi kendala utama dalam menjalankan Tupoksi dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.³⁹

F. Program Pemberdayaan di Desa Caruban

1. Aspek Ekonomi

Program pemberdayaan yang mencakup aspek ekonomi ialah kelompok Tani, kelompok ternak, dan kelompok usaha dagang atau industri rumah tangga. Program pemberdayaan tersebut masing-masing dikelola secara mandiri oleh masyarakat, meskipun inisiasinya tidak semuanya oleh masyarakat itu sendiri seperti halnya kelompok tani yang terbentuk atas inisiasi pemerintahan desa sesuai dengan peraturan Dinas Pertanian dan Peternakan Kebumen. Kelompok tani atau Gapoktan ini

³⁹Hasil wawancara dengan Bapak Purwoko, Kepala Desa Caruban Pada Hari Rabu, 17 September 2014.

merupakan kelompok pemberdayaan yang cukup maju dan mandiri dibanding kelompok pemberdayaan lain yang ada di desa Caruban. Perkembangan Gapoktan ini dikarenakan mayoritas masyarakat caruban ialah petani sehingga pertanian adalah sektor utama pendapatan mayoritas masyarakat Caruban. Anggota kelompok tani ialah seluruh petani yang ada di desa Caruban.

Program pemberdayaan lainnya ialah Kelompok Ternak. Dari hasil penelitian peniliti mendapatkan informasi bahwa sebenarnya secara organisasi kelompok ternak berada dibawah kordinasi kelompok tani tingkat desa atau Gapoktan. Informasi tersebut didapat dari salah satu anggota kelompok tani. Kemudian peneiliti mencoba mengkonfirmasi informasi tersebut kepada anggota kelompok ternak dan ternyata informasi tersebut memang benar, bahwa kelompok ternak secara organisasi memang benar berada dibawah kordinasi Gapoktan Karya Dadi Utama. Namun menurut penjelasan salah satu anggota kelompok ternak bahwa selama ini dalam pelaksanaan kegiatan kelompok ternak, dilakukan secara mandiri tanpa ada campur tangan Gapoktan. Banyak juga anggota kelompok ternak yang ternyata tidak tau atau tidak memahami struktur organisasi mereka.

Secara organisasi, kelompok ternak memang terbentuk oleh Gapoktan Karya Dadi Utama, namun dalam proses pelaksanaannya Gapoktan seolah lepas tangan sehingga kelompok ternak merasa bahwa mereka bukanlah bagian dari Gapoktan. Kelompok ternak di Desa Caruban ada 4 kelompok yang terdapat dimasing-masing RW. Kelompok ternak ini juga memiliki pengurus dan struktur organisasi layaknya

kelompok pemberdayaan lain di desa Caruban. Pada mulanya anggota kelompok ternak ini ialah mereka yang memiliki hewan ternak seperti sapi atau kambing. Namun, saat ini anggota kelompok ternak tidak terbatas pada mereka yang memiliki hewan ternak saja, melainkan siapapun boleh menjadi anggota kelompok ternak.

Model pemberdayaan yang dilakukan kelompok ternak ialah dengan memberikan hewan garapan kepada masing-masing anggota. Kelompok ternak membeli sejumlah hewan ternak untuk kemudian diberikan kepada masing-masing anggota. Setiap anggota yang memiliki hewan garapan harus bertanggung jawab atas hewan garapannya mulai dari urusan pakan setiap harinya, obat atau vitamin dan sebagainya. Masing-masing kelompok ternak memiliki kandang ternak yang digunakan untuk seluruh hewan ternak dalam satu kelompok tersebut. Setelah hewan ternak besar dan layak untuk dijual, biasanya pada saat menjelang hari raya Idul Adha maka hewan ternak tersebut dijual dan kemudian keuntungan dari penjualan hewan ternak akan dibagi dua untuk pemilik hewan garapan dan kelompok.

Dari hasil keuntungan penjualan tersebut, kemudian oleh kelompok akan dibelikan hewan ternak lagi dan menerapkan sistem yang sama kepada setiap anggota. Selain kegiatan berternak, kegiatan lain yang dilakukan kelompok ternak ialah RTA tiap tahunnya, rapat pengurus dan rapat anggota baik yang dilakukan secara rutin setiap bulan ataupun insidental, serta kegiatan sosialisasi mengenai peternakan. Artinya, kehadiran kelompok ternak selain bisa menghasilkan nilai ekonomi bagi anggota juga memberikan wawasan dan pengetahuan tentang

peternakan dan juga melatih anggota mengenai bagaimana mengorganisasi diri dan mewujudkan kemandirian.

Program pemberdayaan yang ketiga pada aspek ekonomi ialah kelompok usaha dagang. Kelompok usaha dagang ini sebenarnya lebih sederhana dan belum terlalu besar ketimbang kelompok tani ataupun kelompok ternak. Kelompok usaha dagang ini ada dua macam, yakni industri rumah tangga Tempe kedelai dan industri rumah tangga Sale pisang. Meskipun ada dua kategori produk, namun secara organisasi mereka berada pada satu organisasi kelompok usaha dagang. Inisiasi terbentuknya kelompok dagang ini oleh salah satu produsen Sale pisang. Terbentuknya kelompok usaha dagang ini diinisiasi oleh mereka yang memiliki usaha. Tujuan dibentuk kelompok ini agar mereka lebih terorganisir terutama dalam hal proses produksi dan pengembangan pasar dari produk yang mereka hasilkan.

2. Aspek Sosial Kemasyarakatan

Program pemberdayaan yang termasuk kedalam aspek sosial kemasyarakatan ialah PKK dan Karang Taruna. Tim penggerak PKK di desa Caruban merupakan salah satu faktor penting yang mengupayakan terciptanya kesejahteraan masyarakat khususnya dengan pendekatan pemberdayaan keluarga. PKK memegang peranan penting dalam membangun pola pikir masyarakat desa Caruban kearah yang lebih baik dalam rangka upaya pembangunan masyarakat. Tim penggerak PKK atau biasanya disebut dengan ibu-ibu PKK merupakan program pemberdayaan yang hampir dimiliki oleh

setiap desa atau kelurahan. PKK berada pada posisi yang strategis sebagai mitra kerja sekaligus agen yang mengejawantahkan program pemerintahan desa Caruban khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan keluarga melalui 10 Program Pokok PKK, yakni: penghayatan dan pengamalan pancasila, gotong royog, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan koperasi, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat.⁴⁰ Secara organisasi, PKK memiliki struktur organisasi yang solid dan merata dimana setiap kelompok kerja atau pokja memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama-sama penting. Organisasi PKK di desa Caruban terbentuk pada tingkat desa ataupun PKK induk yang diketuai oleh istri dari Kepala desa. Sedangkan anggotanya merupakan perwakilan PKK pada tingkat RW dan RT. Yang bisa menjadi perwakilan RT dan RW pengurus inti seperti ketua, sekretaris dan bendahara. Tidak hanya pada tingkat desa atau induk, PKK di desa Caruban juga terdapat di setiap RT dan RW. Ketua PKK RT adalah istri dari Ketua RT dan Ketua PKK RW ialah istri Ketua RW. Bentuk Kegiatan dari PKK tingkat RW ialah pertemuan rutin setiap minggu yang dikemas dalam bentuk arisan ibu-ibu PKK dimana lokasi atau tempat arisan dilakukan secara bergiliran dirumah setiap anggota PKK. Sedangkan pada tingkat desa pertemuan rutin dilakukan setiap 2 minggu sekali dan bertempat di kantor Kepala desa atau balai desa Caruban.

⁴⁰ Profil PKK Desa Caruban

Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh PKK desa Caruban diantaranya posyandu, dimana terdapat 5 posyandu di desa Caruban yang semuanya merupakan bagian dari program kerja PKK. Didalam Posyandu ini, terdapat Posyandu balita dan Posyandu lansia yang keduanya rutin mengadakan kegiatan setiap bulannya. Kemudian, ada juga kegiatan simpan pinjam melalui arisan ibu-ibu PKK dimana tidak hanya dalam bentuk uang, namun juga melalui kelompok arisan PKK ini anggota PKK bisa mendapatkan sembako yang pembayarannya bisa dicicil setiap minggu. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan mengenai pendidikan keluarga, kesehatan keluarga, pelestarian lingkungan juga menjadi bagian dari program kerja tim penggerak PKK desa Caruban. Dari informasi Kepala Desa dan pengurus PKK desa Caruban, bahwa pada tahun 2015, PKK desa Caruban mendapat penghargaan sebagai PKK terbaik atau PKK percontohan di wilayah kecamatan Adimulyo bersama PKK desa Bonjok yang juga masih merupakan desa tetangga dan berbatasan langsung dengan desa Caruban.

Program pemberdayaan kedua pada aspek sosial kemasyarakatan ialah Karang Taruna. Karang Taruna di Desa Caruban tidak bisa dikesampingkan perannya dalam rangka suksesi program pemerintah desa untuk pengembangan pemuda atau remaja desa Caruban. Namun, Karang Taruna Desa Caruban tidak seaktif tim penggerak PKK oleh karena manajemen organisasi yang kurang maksimal. Meskipun secara organisasi terdapat struktur pengurus Karang taruna desa Caruban, namun kegiatan-kegiatan yang dilakukan masih sangat minim bahkan kurang merepresentasikan

upaya pemberdayaan pemuda desa Caruban. Minimnya kegiatan pemberdayaan yang dilakukan dikarenakan rendahnya SDM pemuda desa Caruban. Bagi remaja, pemuda, dan pemudi desa Caruban masih terdapat budaya merantau setelah lulus sekolah baik untuk melanjutkan keperguruan tinggi diberbagai kota maupun bekerja dikota-kota besar. Kondisi yang demikian, menjadikan organisasi Karang Taruna Desa Caruban belum mampu menjalankan fungsinya secara maksimal. Namun, bukan berarti Karang Taruna desa Caruban mati suri, karena masih ada kepedulian dan upaya dari beberapa tokoh pemuda untuk mewujudkan Karang Taruna desa Caruban untuk ikut andil dalam pembangunan masyarakat desa Caruban.

Beberapa kegiatan rutin setiap tahun masih tetap dilakukan seperti halnya perayaan HUT RI atau dikenal dengan istilah "agustusan". Mas Ledo sebagai salah satu tokoh pemuda Desa Caruban berupaya mewedahi minat dan bakat dibidang olah raga khususnya sepak bola dengan membentuk tim sepak bola desa Caruban. Beliau juga sesekali menggagas turnamen sepak bola antar club sepak bola di kabupaten Kebumen untuk menjalin silaturahmi sesama atlet sepak bola lokal kabupaten Kebumen sekaligus mencoba mengukur kekuatan tim sepak bola desa Caruban. Setiap kali Karang Taruna mengadakan kegiatan, sebagian besar sumber dananya berasal dari dana iuran masyarakat desa Caruban. Dalam hal ini penulis melihat betapa besarnya keinginan dan harapan masyarakat desa Caruban agar Karang Taruna desa Caruban dapat kembali aktif dan turut memberikan andil bagi pemberdayaan kepemudaan di desa Caruban.

Kedua Program Pemberdayaan pada aspek sosial kemasyarakatan ini bisa dikategorikan program pemberdayaan yang difasilitasi oleh pemerintah karena menjadi bagian dari program Pemerintah. PKK dan Karang Taruna ialah mitra kerja pemerintah desa Caruban dalam rangka mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Di Desa Caruban, organisasi PKK dan Karang Taruna mendapatkan jatah tanah kemakmuran atau tanah garapan sebesar 50 ubin (satuan luas tanah) yang dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan organisasi. Hal ini menunjukkan kepedulian pemerintah Desa bagi kedua program pemberdayaan tersebut.

3. Aspek Seni Budaya

Program pemberdayaan lain yang terdapat di desa Caruban ialah program dengan kategori Seni Budaya yakni, kelompok Kuda lumping sebanyak 2 kelompok, kelompok Janengan, Kelompok Karawitan. Ketiga kelompok kesenian tersebut dibentuk dengan tujuan untuk melestarikan dan mempertahankan eksistensi kesenian lokal agar dapat terus dinikmati oleh generasi penerus sebagai warisan budaya nenek moyang. Tidak hanya kelompok kesenian kuda lumping, janengan, dan karawitan yang dimiliki desa Caruban, bahkan terdapat juga kelompok kesenian wayang kulit dan kelompok Ketoprak (wayang orang). Namun saat ini kelompok wayang kulit dan ketoprak seolah hanya tinggal namanya saja karena tidak ada regenerasi yang baik sehingga kelompok kesenian ini hilang dengan sendirinya meskipun masih ada beberapa tokoh dan pelaku seninya.

Kelompok kesenian ini diinisiasi oleh masyarakat Caruban sendiri, khususnya mereka sebagai penikmat sekaligus pelaku seni. Bagi mereka kesenian desa Caruban adalah warisan budaya yang memiliki nilai luhur. Kelompok kesenian desa Caruban sebagai organisasi yang mewadahi para penikmat dan pelaku seni memberikan pendidikan moral kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kesenian tradisional. Kelompok kesenian ini selain sebagai wadah regenerasi kesenian tradisional, juga berupaya mempertahankan eksistensi dan mengembangkan kreatifitas seni tradisional tersebut agar memiliki nilai ekonomi.

Kegiatan yang dilakukan kelompok kesenian ialah latihan rutin yang dilakukan setiap bulan. Khusus untuk kelompok Janengan pertemuan bulanan dikemas dengan kegiatan arisan kelompok Janeng. Setiap kelompok akan menampilkan keseniannya ketika “ditanggap” atau disewa oleh masyarakat misalnya pada acara-acara hajatan seperti nikahan ataupun sunatan. mereka tidak mematok tarif bagi masyarakat yang menggunkan jasa mereka. Biasanya masyarakat hanya memberi uang transport pemain dan mengisi kas kelompok kesenian yang jumlahnya tidak ditentukan oleh kelompok. Bahkan tidak jarang juga mereka hanya menerima sumbangan uang kas saja. Selain penampilan diacara-acara hajatan atau “ditanggap” warga, biasanya kelompok kesenian ini juga menampilkannya pada acara-acara bersama misalnya pada saat peringatan HUT RI, acara malam tahun baru, malam satu suro (tahun baru Islam), maulid Nabi, dan acara lainnya.

BAB III

KELOMPOK TANI SEBAGAI WADAH PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

III.1 Pengantar

Kesadaran masyarakat desa Caruban akan kondisi sosial ekonomi mereka bahwa dibutuhkan perubahan agar tercipta kesejahteraan yang lebih baik nampaknya sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan terbentuknya beberapa komunitas atau kelompok pemberdayaan di desa Caruban dalam beberapa aspek yakni aspek ekonomi, sosial-kemasyarakatan, kepemudaan, maupun kesenian. Kelompok pemberdayaan yang terbentuk di desa Caruban, dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaannya berlandaskan pada asaz kekeluargaan dengan mengedepankan profesionalitas, dimana segala bentuk kegiatannya dilakukan dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat itu sendiri. Meskipun dalam beberapa hal kelompok ini mendapatkan dana atau anggaran pengembangan yang berasal dari pemerintah.

Kelompok pemberdayaan dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas hidup anggotanya sehingga pada akhirnya mampu mendorong terciptanya perubahan sosial-ekonomi masyarakat secara umum agar terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Caruban. Seperti yang telah dipaparkan pada bagian pendahuluan bahwa terdapat beberapa kelompok

pemberdayaan di desa caruban. Pada bagian ini, penulis akan mencoba memfokuskan subjek penelitian pada kelompok tani desa Caruban atau Gapoktan. Hal ini ditujukan agar fokus penelitian semakin terarah dan dapat memberikan penjelasan dan pemaparan secara terperinci mengenai bagaimana program pemberdayaan mampu menjadi langkah strategis dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kelompok tani dianggap mampu mewakili kelompok pemberdayaan yang lainnya karena berdasarkan informasi yang diperoleh dan berdasarkan hasil pengamatan penulis, kelompok tani merupakan kelompok pemberdayaan yang paling signifikan dan memiliki peran penting dalam pembangunan masyarakat desa Caruban. Hal ini sangat lumrah karena sebagian besar masyarakat desa Caruban merupakan petani atau potensi utama desa Caruban yaitu dari sektor pertanian sehingga dari aspek urgensi dan juga kebutuhan masyarakat, bahwa kelompok tani adalah yang paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat desa Caruban. selain itu secara organisasi, kelompok tani juga dinilai sebagai kelompok pemberdayaan yang lebih produktif dan masif dari segi kegiatan ketimbang kelompok pemberdayaan yang lainnya. Oleh karena alasan tersebut maka pada bab III ini, penulis akan menjelaskan dan memaparkan hasil temuan lapangan mengenai profil, kegiatan, tantangan, dan strategi, yang dilakukan dan dihadapi oleh kelompok tani desa Caruban dalam upayanya menjadi wadah pemberdayaan masyarakat agar mampu mewujudkan perubahan sosial-ekonomi masyarakat desa Caruban.

III.2 Profil Gapoktan Karya Dadi Utama Desa Caruban

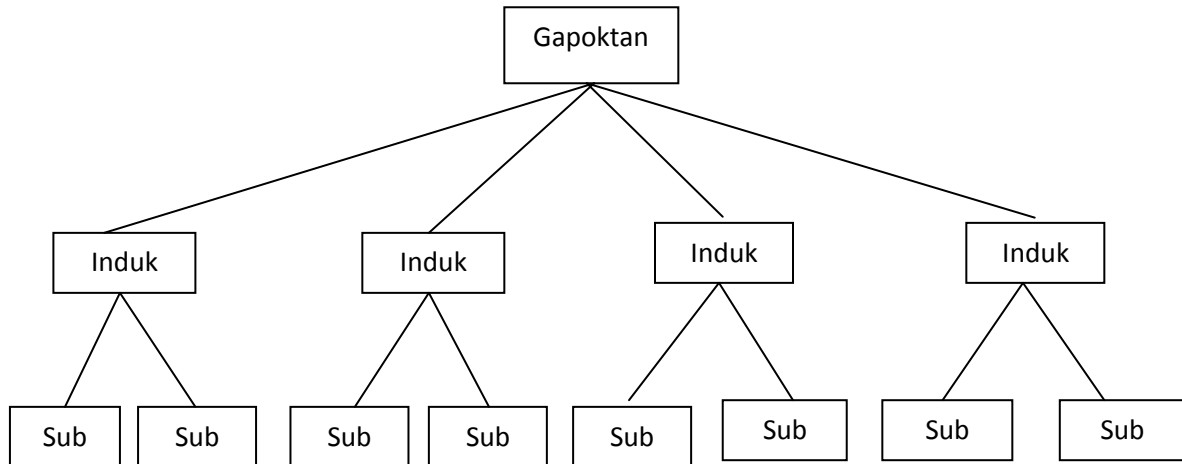
Kelompok Tani desa Caruban terbentuk pada tahun 2008 melalui inisiasi dari pemerintah desa Caruban yang pada waktu itu kepala desa Caruban masih dijabat oleh Bapak Sadjimun yang kini sudah tidak lagi menjadi kepala desa karena masa periodenya telah berakhir ditahun 2013 lalu. Pada waktu itu, para petani sedang mengalami kondisi dimana kebutuhan pupuk bersubsidi mereka tidak bisa terpenuhi. Hampir seluruh petani di indonesia mengalami kendala yang sama yakni sulitnya mendapatkan pupuk untuk kepentingan produksi pertanian mereka. Kelangkaan pupuk bersubsidi yang terjadi pada waktu itu benar-benar menjadi ancaman serius bagi para petani, termasuk petani di desa Caruban, oleh karena kondisi tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pertanian yang kemudian diejawantahkan melalui dinas-dinas terkait disetiap provinsi dan kabupaten membuat suatu kebijakan mengenai pembentukan kelompok tani untuk pendistribusian pupuk bersubsidi kepada petani. Oleh karena peraturan yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kabupaten Kebumen, maka pemerintah desa Caruban menginisiasi terbentuknya kelompok tani desa Caruban. Sehingga pada awalnya sama seperti kelompok tani di desa-desa lain di Kabupaten Kebumen, kelompok tani desa Caruban memang terbentuk karena adanya kebijakan dari pemerintah untuk pendistribusian pupuk bersubsidi agar lebih terkontrol dan meminimalisir penyelewengan-penyelewengan dari oknum-oknum tertentu.

Diakhir tahun 2008, terdapat dua macam pupuk yang mendapat subsidi dari pemerintah, yakni pupuk Petrokimia Gresik dengan produknya yang lebih dikenal dengan nama Phonska dan TS, serta Pupuk Sriwijaya dengan produknya yang dikenal masyarakat dengan sebutan Urea. Dinas membuat kebijakan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut, masyarakat harus tergabung kedalam kelompok tani karena pendistribusian pupuk bersubsidi hanya diperbolehkan melalui kelompok tani. Oleh karena kondisi tersebut, maka kelompok tani desa Caruban mulai berkembang. Pada awal terbentuknya, kelompok tani ini hanya beranggotakan petani yang memiliki lahan sawah yang terhitung luas. Jadi hanya sebagian kecil masyarakat desa Caruban yang menjadi anggota saat pertama kali kelompok tani ini terbentuk.

Pada saat awal terbentuk, kelompok tani desa Caruban akhirnya diberi nama Kelompok Tani “Karya Dadi Utama”. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana kelompok tani harus beranggotakan maksimal 25 orang, maka dalam perkembangannya agar mampu mengakomodir seluruh petani desa Caruban, kelompok tani desa Caruban kemudian terbagi kedalam beberapa sub kelompok tani. Kemudian kelompok tani desa Caruban bertransformasi secara struktural dan terbentuklah kelompok tani pusat atau tingkat desa atau disebut dengan Gabungan Kelompok Tani, kelompok tani induk atau tingkat RW, dan sub kelompok tani atau tingkat RT. Struktur keorganisasian kelompok tani desa Caruban sebagai berikut:

Skema III.1

Persebaran Kelompok Tani Di Desa Caruban



Sumber: Diolah berdasarkan hasil penelitian tahun 2014

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang secara struktural sebagai kelompok tani pusat atau kelompok tani tingkat desa membawahi empat kelompok induk atau kelompok tani tingkat RW yang berjumlah empat kelompok, dimana dimasing-masing RW di setiap desa Caruban memiliki kelompok tani induk. Kemudian kelompok induk ini membawahi sub kelompok yang terdapat ditingkat RT. Secara keseluruhan, keberadaan kelompok tani di Caruban sudah mampu mengakomodir sebagian besar petani desa Caruban dengan terbentuknya kelompok tani secara merata di setiap RT dan RW seluruh desa Caruban. Semua kelompok tani induk berikuti kelompok tani sub tersebut, secara struktural ada dibawah kordinasi dan pengawasan Gapoktan atau kelompok tani pusat. Setiap kelompok tani baik induk maupun sub juga memiliki identitasnya masing-masing. Berikut adalah nama-nama setiap kelompok tani mulai dari tingkat desa sampai pada tingkat RT:

Kelompok Tani pusat (tingkat desa) : Gapoktan Karya Dadi Utama

Kelompok Induk I (RW 01) : Usaha Karya Tani

1. Sub Usaha Karya Tani 1
2. Sub Usaha Karya Tani 2
3. Sub Usaha Karya Tani 3

Kelompok Induk II (RW 02) : Rukun Tani

1. Sub Rukun Tani 1
2. Sub Rukun Tani 2
3. Sub Rukun Tani 3
4. Sub Rukun Tani 4

Kelompok Induk III (RW 03) : Karya Dadi

1. Sub Karya Dadi 1
2. Sub Karya Dadi 2
3. Sub Karya Dadi 3
4. Sub Karya Dadi 4
5. Sub Karya Dadi 5

Kelompok Induk IV (RW 04) : Usaha Karya

1. Sub Usaha Karya 1
2. Sub Usaha Karya 2
3. Sub Usaha Karya 3

Secara keseluruhan, ada 21 kelompok tani di desa Caruban. Menurut Bapak Rusmanto, terbentuknya kelompok-kelompok tani ini sampai pada tingkat RT bertujuan agar mampu mengakomodir seluruh petani di desa Caruban. Karena memang jumlah petani di Caruban cukup banyak, sedangkan sesuai aturan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen, bahwa setiap kelompok tani hanya diperbolehkan memiliki anggota maksimal 25 orang.

“... desa Caruban, merupakan salah satu desa yang memiliki kelompok tani cukup banyak dibanding desa-desa lainnya di wilayah Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen. Kita memiliki 21 kelompok tani dan kesemuanya merupakan kelompok tani aktif. Hal ini dikarenakan adanya aturan dari Distrik Kabupaten Kebumen yang mengatur bahwa setiap kelompok tani, hanya diperbolehkan memiliki anggota maksimal 25 orang. Oleh karena itu, agar seluruh petani kita dapat terakomodir, maka kami membentuk kelompok tani sampai pada tingkat RW dan RT, namun semuanya tetap dibawah koordinasi dengan Gapoktan pusat...”⁴¹

Organisasi Gapoktan Karya Dadi Utama terdiri dari beberapa pengurus yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi dalam rangka mengoptimalkan peran organisasi bagi program pemberdayaan masyarakat. Adapun pengurus organisasi Gapoktan Karya Dadi Utama sebagai berikut:

Pelindung : Kepala Desa Caruban

Ketua : Rusmanto

Sekretaris : Edy Susanto

Bendahara : Supardal

Kasi Usaha Penyediaan Saprodi : Panut Suyanto

Kasi Usaha Produksi : Sumedi

Kasi Usaha Pengolahan Hasil : Tukiman

Kasi Pemasaran Hasil : Marikin

Kasi Usaha Keuangan Mikro : Suradi

Komite Pengarah/Pengawas

Ketua : Drs. Sumarjono (Tokoh Masyarakat)

Anggota : 1. Siswanto (Wakil dari kelompok tani)

2. Susanto, A.Md

⁴¹Hasil wawancara dengan Bapak Rusmanto selaku mantan ketua Gapoktan desa Caruban 2008-2013 pada 28 Oktober 2014.

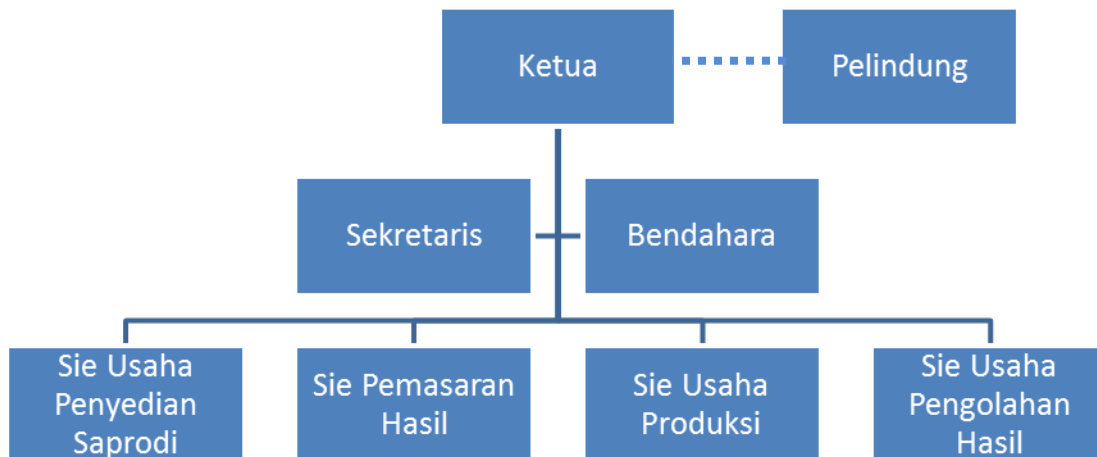
Karyawan Lembaga Keuangan Mikro

Manajer : Suradi

Juru Buku : Ridwan Nur Affandi

Kasir : Tahyadi

Skema III.2
Struktur Organisasi Gapoktan Karya Dadi Utama



Sumber: Diolah Berdasarkan Hasil Penelitian Tahun 2014

Orang-orang yang tergabung kedalam struktur organisasi Gapoktan Karya Dadi Utama memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan apa yang sudah tercantum di dalam AD/ART. Selain ketua, sekretaris, dan bendahara, ketua seksi juga memegang peranan penting dalam mensukseskan setiap program Gapoktan. Seksi Usaha Penyediaan Saprodi memiliki tugas dan peran dalam setiap pengadaan obat-obatan pertanian dan mengusahakan pengadaan pupuk sesuai dengan pesanan anggota kelompok tani. Seksi Usaha Produksi bertugas untuk

mengelola segala urusan pinjaman modal bagi usaha produksi pertanian / budidaya padi, palawija, dan sayuran. Seksi Usaha Pengolahan Hasil Produksi bertugas untuk mengurus segala bentuk pinjaman untuk pengolahan hasil / industri Tempe dan Sale pisang. Seksi Usaha Pemasaran Hasil bertugas untuk mengelola pemasaran dari produk-produk pertanian. Seksi Usaha Keuangan Mikro / LKM bertugas untuk mengelola kegiatan simpan pinjam anggota melalui sumber dana yang berasal anggaran pemerintah.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Rusmanto, saat ini sudah hampir seluruh petani di Caruban menjadi anggota Gapoktan, artinya keberadaan kelompok tani di desa Caruban memang mendapat antusiasme yang cukup baik dari masyarakat.

“...ada awal terbentuk, anggota Gapoktan hanya 25 orang saja, namun di tahun 2009, kami berhasil membentuk beberapa sub kelompok disetiap RT sehingga jumlah anggota bertambah bahkan hampir seluruh petani bisa kami akomodasi. Saat ini, sudah sekitar 95% petani di desa Caruban sudah menjadi anggota Gapoktan”⁴²

Ada tiga kategori anggota kelompok tani yakni anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan. Anggota biasa ialah para petani di desa Caruban baik petani pemilik sawah, petani penggarap (buruh tani), maupun rumah tangga tani. Anggota luar biasa ialah para pendiri kelompok tani yang mengikuti secara aktif dan proaktif seluruh kegiatan yang diselenggarakan Gapoktan Karya Dadi Utama. Anggota kehormatan ialah keanggotaan yang bersifat terbatas bagi kalangan tertentu selain anggota biasa dan luar biasa karena memiliki keistimewaan. Prestasi,

⁴² Hasil Wawancara dengan Bapak Rusmanto selaku mantan ketua Gapoktan desa Caruban 2008-2013 pada 28 Oktober 2014.

kontribusi pada Gapoktan Karya Dadi Utama meskipun bukan warga desa Caruban. Berikut ini adalah penjelasan mengenai jumlah anggota Gapoktan dari awal tahun 2009 sampai akhir tahun 2013:

Tabel III.1
Anggota Gapoktan Karya Dadi Utama

Tahun	Jumlah Anggota			Keterangan
	Biasa	Luar Biasa	Kehormatan	
2009	456			
2010	461			Bertambah 5 orang
2011	461			
2012	461			
2013	461			

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Gapoktan Karya Dadi Utama Tahun
2013

III.3 Strategi Gapoktan Karya Dadi Utama dalam Menumbuhkan Kesadaran dan Menciptakan Kemandirian Masyarakat

III.3.1 Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat dengan Mengoptimalkan Partisipasi

Pengembangan masyarakat harus selalu berupaya untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat itu sendiri, dengan tujuan membuat setiap orang akan terlibat secara aktif dalam setiap proses dan kegiatan pemberdayaan. Prinsip dasar dalam mewujudkan partisipasi masyarakat yang ideal adalah dengan memposisikan

masyarakat bukan sebagai objek pemberdayaan melainkan sebagai subjek pemberdayaan itu sendiri. Biarlah masyarakat itu sendiri yang memainkan peran dalam setiap proses pemberdayaan. Gapoktan desa Caruban, dalam melakukan pemberdayaan para petani, juga selalu mengedepankan prinsip tersebut. Bahwa setiap anggota Gapoktan memiliki hak dan tanggung jawab untuk terlibat aktif dan mengambil perannya masing-masing dalam setiap proses pemberdayaan anggotanya. Dengan demikian, partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam pemberdayaan masyarakat dan penumbuhan kesadaran masyarakat. Jadi semakin banyak anggota yang menjadi peserta aktif dan semakin lengkap partisipasinya, maka semakin ideal program pemberdayaan masyarakat.

Upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat yang dilakukan oleh Gapoktan desa Caruban dilakukan dengan memberikan wewenang sepenuhnya kepada setiap anggota untuk mengelola masing-masing sub kelompok. Kemudian didalam prosesnya, setiap sub kelompok tersebut memberikan wewenang sepenuhnya kepada anggota untuk membuat rancangan pengajuan pinjaman modal yang didanai oleh pemerintah melalui program PUAP, yakni pengembangan usaha agrobisnis pedesaan, seperti penuturan Bapak Rusmanto seagai berikut;

“... dalam mewujudkan kesadaran mengoptimalkan peran anggota, kami selalu memberikan wewenang sepenuhnya kepada masing-masing sub kelompok untuk mengelola dan mengurus sendiri segala kegiatan yang dilakukan, namun tetap dengan bimbingan dan pengawasan Gapoktan. Kemudian, anggota juga diberikan kebebasan untuk membuat semacam proposal pengajuan bantuan modal yang sifatnya individu atau perseorangan. Sehingga dengan langkah itu, kami berharap

agar masyarakat kita pada akhirnya memiliki kemauan untuk maju dan mempunyai kesadaran bahwa penting untuk menjadi anggota Gapoktan desa Caruban...”⁴³

Secara umum, kesadaran masyarakat desa Caruban akan pentingnya upaya pengembangan masyarakat sudah cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya jumlah anggota Gapoktan yang mencapai 461 anggota. Menurut Bapak Rusmanto, Gapoktan desa Caruban dengan jumlah anggota sekitar 461 anggota dan terbagi kedalam 21 sub kelompok merupakan sesuatu yang patut di apresiasi. Selain itu, upaya memperkuat partisipasi masyarakat juga dilakukan dengan mengadakan pertemuan rutin bagi setiap anggota. Hal yang sangat mendasar untuk mengukur sejauh mana partisipasi masyarakat adalah dengan melihat pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh setiap anggota kelompok pemberdayaan.

“... untuk meningkatkan partisipasi anggota, kami juga mengadakan pertemuan-pertemuan rutin yang dilakukan baik oleh masing-masing sub kelompok ataupun pertemuan rutin yang diadakan oleh Gapoktan. Biasanya pertemuan rutin yang diadakan oleh setiap sub kelompok dilakukan sebulan sekali berbarengan dengan pertemuan atau arisan RT. Dari situ kita bisa melihat sejauh mana anggota ikut berpartisipasi dalam setiap pemecahan masalah dan menentukan kebijakan. Kemudian pertemuan yang diadakan oleh Gapoktan biasanya dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing sub kelompok yang dipilih secara bergantian, sehingga semua anggota akan dapat giliran sebagai perwakilan sub kelompoknya...”⁴⁴

Dari penjelasan Bapak Rusmanto, dapat diketahui bahwa telah ada upaya untuk membangun partisipasi bagi setiap anggota Gapoktan. Ada harapan bahwa dengan memaksimalkan partisipasi anggota, maka kesadaran dari setiap anggota juga akan

⁴³Hasil wawancara dengan Bapak Rusmanto selaku mantan ketua Gapoktan desa Caruban 2008-2013 pada 28 Oktober 2014.

⁴⁴Hasil wawancara dengan Bapak Rusmanto selaku mantan ketua Gapoktan desa Caruban 2008-2013 pada 28 Oktober 2014.

terwujud secara ideal. Sehingga pada akhirnya masyarakat sadar bahwa harus ada upaya pengembangan masyarakat agar tercipta kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Secara konseptual, berangkat dari apa yang telah dijelaskan oleh Prof. Jim Ife, bahwa agar tercipta partisipasi masyarakat harus ada kondisi-kondisi yang mendorong masyarakat untuk melakukan "partisipasi". Pertama, orang akan berpartisipasi apabila mereka merasa bahwa isu tersebut penting. Seseorang harus melakukan sesuatu karena muncul dari kesadaran dirinya sendiri tanpa dipaksakan atau diberitahu oleh orang lain. Menurut penulis, hal inilah yang terjadi pada masyarakat Caruban, bahwa mereka menyadari bahwa keikutsertaannya untuk menjadi anggota Gapoktan adalah sesuatu yang penting bagi mereka, dan kesadaran ini benar-benar muncul dari diri mereka sendiri. Mereka sadar bahwa dengan menjadi anggota Gapoktan, mereka akan memiliki akses dalam mengembangkan dan meningkatkan produktifitas pertaniannya.

Kedua, bahwa seseorang harus merasa bahwa aksi yang mereka lakukan akan membuat perubahan. Mungkin, sebelum ada Gapoktan, para petani telah merasa bahwa apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang benar, misalnya dalam hal cara betani. Namun Gapoktan desa Caruban pada akhirnya mampu menunjukkan kepada masyarakat bahwa ada perubahan yang akan dicapai oleh Gapoktan bagi setiap anggotanya. Dengan kegiatan-kegiatan pelatihan, pendampingan, dan sosialisasi yang berkaitan dengan pertanian, misalnya pemilihan bibit, cara penanggulangan dan

pemberantasan hama, promosi pupuk dan obat-obatan pertanian, serta pelatihan-pelatihan mengenai cara bertani yang baik dan benar. Masyarakat akhirnya meyakini bahwa ada perubahan yang akan dicapai oleh gapoktan. Mereka mendapatkan pengetahuan dan wawasan mengenai pertanian yang sebelumnya belum pernah mereka dapatkan dan tidak pernah mereka pahami. Hasilnya jelas, bahwa ada efisiensi dan peningkatan produk pertanian masyarakat.

Ketiga, bahwa setiap partisipasi harus diakui dan dihargai. Hal ini mungkin terlihat sederhana, namun ini menjadi bagian penting agar bagaimana partisipasi masyarakat dapat tercipta. Setiap anggota gapoktan diberikan apresiasi dan pengakuan bahwa mereka adalah bagian dari Gapoktan. Tidak ada perbedaan bagi setiap anggotanya, dan tidak ada perlakuan khusus yang diterima oleh anggota tertentu, semua keputusan ditentukan melalui musyawarah anggota. Setiap anggota memiliki hak yang sama untuk menyatakan pendapat dan memberikan masukan-masukan dalam setiap proses dan pelaksanaan kegiatan. Anggota juga memiliki hak yang sama dalam berbagai akses pertanian seperti akses, bibit, pupuk, obat-obatan pertanian. dan juga memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti berbagai kegiatan pelatihan dan pendampingan.

Keempat, bahwa setiap orang harus bisa berpartisipasi dan didukung dalam partisipasinya. Untuk menciptakan partisipasi secara merata, Gapoktan berupaya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat secara keseluruhan. Kemudian agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi menjadi anggota Gapoktan, maka syarat yang ditentukan hanyalah dengan membayar iuran pokok dengan

nominal sesuai dengan kesepakatan bersama dan iuran wajib setiap bulan sebesar seribu rupiah. Artinya, untuk menciptakan partisipasi masyarakat, maka Gapoktan memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat desa Caruban untuk bergabung menjadi anggota gapoktan dengan cara yang mudah.

Terakhir, bahwa untuk menciptakan partisipasi, struktur dan proses tidak boleh mengucilkan salah satu pihak. Dalam pembentukan struktur organisasi baik di tingkat Gapoktan, kelompok induk, dan sub kelompok selalu didasarkan pada musyawarah anggota. Kemudian dalam setiap pembentukan program dan pemecahan masalah juga selalu dilakukan melalui musyawarah anggota. Setiap anggota juga memiliki hak yang sama untuk menyatakan pendapat. Sehingga proses organisasi didalam Gapoktan desa Caruban sudah berjalan dengan baik.

III.3.2 Membangun Kemandirian Masyarakat Melalui *Komunitas*

Program Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada prosesnya, kegiatan pemberdayaan dapat dilakukan dengan beragam strategi. Oleh karena itu, pemerintah desa Caruban berusaha untuk mengupayakan pemberdayaan bagi para petani desa Caruban dengan membentuk kelompok tani yang selanjutnya disebut dengan Gapoktan atau gabungan kelompok tani dimana Gapoktan ini diharapkan mampu memfasilitasi para petani dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas produksi pertanian mereka.

Dalam konsep pemberdayaan, model pemberdayaan dengan memaksimalkan peran komunitas memang dinilai sebagai langkah yang paling sesuai dengan kondisi masyarakat kita. Komunitas mengupayakan terbentuknya kemandirian masyarakat dimana prinsip dasar komunitas adalah dengan melakukan segalanya dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Gagasan mengenai komunitas ini merupakan konsep mendasar bagi setiap prespektif pengembangan masyarakat. Prespektif keadilan sosial dan HAM misalnya, dimana prespektif ini menyediakan suatu visi dari apa yang secara sosial dibutuhkan dan diinginkan, yakni sebuah masyarakat yang didasarkan atas definisi dan penjaminan hak-hak kesetaraan, pemberdayaan, yang mengalahkan struktur dan keadaan yang merugikan masyarakat, serta kebebasan untuk menentukan dan memenuhi kebutuhan mereka. Sedangkan prespektif ekologis berupaya menyediakan suatu visi dari apa yang layak dan menguraikan jenis masyarakat yang dapat hidup dalam jangka panjang, yaitu masyarakat yang didasarkan atas prinsip holisme, keberlanjutan, keanekaragaman dan keseimbangan.⁴⁵ Gagasan komunitas dianggap penting dan dapat dilihat sebagai konsekuensi alamiah dari masing-masing prespektif ini.

Gapoktan desa Caruban merupakan komunitas para petani masyarakat yang dibentuk untuk memberdayakan para petani Caruban. Penggunaan model pemberdayaan dengan komunitas diharapkan mampu mengakomodir kepentingan seluruh anggotanya. Komunitas bersifat konsisten dengan model-model

⁴⁵ Jim Ife dan Frank Toseriero, 2008, *Comunty Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, hlm:189-190.

pemberdayaan untuk perubahan, karena komunitas menyediakan suatu kerangka bagi masyarakat untuk mengambil keputusan yang efektif. Ia juga konsisten dengan perspektif HAM karena hak dan kewajiban diterapkan secara bersama-sama dan dengan orang lain pada kegiatan keseharian dalam komunitasnya. Selain itu, komunitas juga konsisten dengan perspektif berbasis kebutuhan karena ia memungkinkan orang menjadi lebih mudah mendefinisikan dan mensuarakan kebutuhan-kebutuhan serta aspirasi yang dirasakan.⁴⁶ Masyarakat pada akhirnya akan lebih leluasa atau tanpa intervensi dalam menentukan dan mengupayakan kebutuhannya dengan tetap memperhatikan hak-hak orang lain atau anggota lain. Sehingga pada akhirnya muncul semacam kesamaan tujuan dan kerja sama dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan komunitas tersebut sebagai basis sosial-ekonomi mereka. Atau dengan kata lain, anggota Gapoktan ini memiliki visi yang hendak di capai bersama-sama dalam rangka menentukan dan mengupayakan kebutuhan mereka yang tentunya berkaitan dengan sektor pertanian.

Prinsip kekeluargaan dan gotong royong menjadi dasar pembentukan Gapoktan oleh pemerintah desa Caruban. Oleh karena perhatian terhadap sektor pertanian sebagai sektor andalan desa Caruban maka inisiasi pembentukan Gapoktan dapat terealisasikan dengan baik hingga sekarang. Tugas dari Gapoktan itu sendiri sesuai dengan keinginan pemerintah desa Caruban bahwa dibentuknya Gapoktan diharapkan mampu memfasilitasi segala bentuk kebutuhan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani. Gapoktan ini dimaksudkan bukanlah sekedar perkumpulan yang

⁴⁶ *Ibid.*, hlm: 190

didalamnya berisikan para petani tanpa ada visi pembangunan pertanian, karena dalam kerangka berfikir pembangunan masyarakat, bahwa pemberdayaan bukanlah sekedar membentuk dan mendefinisikan komunitas, namun lebih merupakan proses dialog, pertukaran gagasan, peningkatan kesadaran, pendidikan dan aksi yang sedang berjalan yang bertujuan menolong orang-orang yang konsen terhadap komunitasnya.⁴⁷ Pemerintah desa Caruban nampaknya menyadari urgensi dari pembentukan Gapoktan sebagai upaya mencapai visi bersama yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Caruban. Gapoktan dinilai sebagai solusi atas permasalahan pembangunan pertanian yang begitu kompleks yang membutuhkan kreatifitas dan ketepatan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Gapoktan ini harus memahami apa masalah-masalah yang kompleks tersebut dan bagaimana mencari pemecahan masalahnya dengan ide dan gagasan bersama.

Tujuan ideal pemberdayaan masyarakat adalah mengupayakan kemandirian dari masyarakat itu sendiri sebagai subjek pemberdayaan. Kemandirian masyarakat harus dibangun dan diinisiasi oleh kelompok tani sebagai komunitas. Dalam hal ini, Gapoktan mempunyai tanggung jawab dalam mengupayakan terwujudnya kemandirian masyarakat sehingga pada akhirnya mereka dapat menjadi masyarakat yang mandiri dan berdaya. Dalam rangka mewujudkan tujuan inilah Gapoktan desa Caruban menerapkan prinsip komunitas dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan. Membentuk kemandirian para petani membutuhkan proses dan jangka waktu yang

⁴⁷ *Ibid.*, hlm: 199.

tidak sebentar, oleh karena SDM masyarakat yang bisa dibilang rendah, maka butuh upaya yang sungguh-sungguh dan strategi yang tepat untuk menciptakan jiwa kemandirian para petani. Berikut adalah penuturan Bapak Rusmanto berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis;

“...secara umum, SDM petani di desa Caruban memang terbilang rendah, oleh karena itu untuk membangun jiwa kemandirian para petani ini, maka kami mengupayakannya dengan membentuk Gapoktan ini, sehingga akan lebih mudah jika memberdayakan para petani secara berkelompok. Didalam kelompok ini, mereka dapat saling bertukar pengetahuan dan wawasan, sehingga pada akhirnya mereka akan paham dengan sendirinya. Dengan itu diharapkan bahwa kemandirian petani juga akan terwujud dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kelompok...”⁴⁸

Oleh karena itu, Gapoktan di desa Caruban menjadi wadah untuk memfasilitasi para petani agar dapat mewujudkan kemandirian para petani sehingga pada akhirnya para petani di desa Caruban dapat menentukan dan memenuhi kebutuhan mereka sendiri melalui kelompok tani.

Berangkat dari apa yang telah dijelaskan oleh Prof. Jim Ife mengenai bagaimana ciri-ciri komunitas, nampaknya dalam menjalankan fungsinya, Gapoktan desa Caruban telah menerapkan apa yang dianggap penting dan yang seharusnya dimiliki sebagai “komunitas” pemberdayaan. Pertama, bahwa komunitas harus berskala manusia atau kecil sebagai lawan dari struktur yang besar, tidak bersifat pribadi dan terpusat. Hal ini bertujuan agar komunitas dapat dikendalikan di kontrol dengan mudah, kemudian interaksi antar anggotanya juga berjalan dengan ideal sehingga

⁴⁸Hasil wawancara dengan Bapak Rusmanto selaku mantan ketua Gapoktan desa Caruban 2008-2013 pada 28 Oktober 2014.

tidak ada yang berkuasa dan dikuasai. Artinya segala akses bagi setiap anggotanya sangat terbuka. Oleh karena itu sistem organisasi Gapoktan desa Caruban dibuat sedemikian rupa agar terwujud keterbukaan akses dan interaksi yang ideal dalam anggotanya. Dari hasil wawancara dengan Bapak Rusmanto bahwa Gapoktan desa Caruban menentukan kebijakan bagi setiap kelompok tani harus beranggotakan maksimal 25 anggota, oleh karena itu Gapoktan membentuk sub-sub kelompok tani sampai pada tingkat RT agar semua petani dapat terakomodir secara keseluruhan.

“...dulu pada awal dibentuknya gapoktan, ada peraturan dari Dinas bahwa satu kelompok tani hanya boleh beranggotakan maksimal 25 orang saja, sehingga agar kelompok tani dapat memfasilitasi seluruh petani di desa Caruban maka kami membentuk sub kelompok tani sampai pada tingkatan RT, walaupun dalam satu RT terdapat lebih dari 25 petani maka akan akan dipindahkan menjadi anggota sub kelompok lain yang jumlah anggotanya belum mencapai 25 orang...”⁴⁹

Kebijakan tersebut dilakukan agar setiap kelompok dapat terorganisir dengan baik dan tercipta pemerataan hak dan kewajiban bagi setiap anggotanya serta memudahkan dalam hal kordinasi. Pada akhirnya, setiap anggota kelompok tani diharapkan mampu melakukan menejemen yang baik disetiap kelompoknya dan memandirikan dirinya sendiri melalui kelompoknya masing-masing.

Kedua, komunitas pemberdayaan harus memiliki identitas dan rasa kepemilikan dari setiap anggotanya. Konsep keanggotaan memiliki makna “memiliki” dan kesetiaan pada tujuan-tujuan kelompok serta pengakuan atau penerimaan oleh orang lain karena komunitas tidak hanya sekedar suatu kelompok yang dibentuk untuk

⁴⁹Hasil wawancara dengan Bapak Rusmanto selaku mantan ketua Gapoktan desa Caruban 2008-2013 pada 28 Oktober 2014.

kemudahan administratif. Setiap orang yang bergabung kedalam suatu komunitas, maka akhirnya akan muncul rasa memiliki terhadap komunitasnya dan itu berarti bahwa komunitas menjadi identitas tersendiri bagi setiap anggotanya. Komunitas juga dapat menjadi konsep diri bagi setiap anggotanya dalam bersikap dan bertingkah laku agar sesuai dengan apa yang menjadi tujuan komunitas tersebut. Dalam menyikapi ini, Gapoktan desa Caruban memberikan wewenang pada setiap sub kelompok tani untuk memiliki nama komunitasnya masing-masing dan melakukan kegiatan diluar kegiatan yang sudah ditentukan oleh Gapoktan desa Caruban. Oleh karena itu, rasa kepemilikan dan identitas akan muncul pada setiap anggota sub kelompok tani. Sehingga ,mereka memiliki konsep diri atas diri mereka sendiri mengenai apa yang harus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan kelompoknya masing-masing.

Ketiga, komunitas diharuskan memberikan kewajiban-kewajiban pada setiap anggotanya. Keanggotaan pada sebuah organisasi tentunya akan membawa hak dan kewajiban bagi setiap anggotanya. Dengan adanya kewajiban yang dibebankan pada setiap anggotanya, maka terdapat harapan bahwa akan ada kontribusi dan partisipasi bagi setiap anggota dalam setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebagai upaya pemberdayaan. Demikian juga dengan anggota Gapoktan, bahwa masing-masing dari mereka memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota. Misalnya, untuk menjadi anggota Gapoktan, petani diwajibkan membayar iuran pokok dan iuran wajib, kemudian mereka akan memiliki kemudahan dalam akses bibit dan pupuk sebagai pemenuhan hak mereka. Gapoktan berasumsi bahwa kewajiban yang dimiliki setiap

anggota, secara tidak langsung akan mendorong mereka untuk berperan aktif dalam setiap kegiatan. Kepemilikan hak dan kewajiban ini, pada akhirnya juga akan melatih anggota Gapoktan memiliki sikap konsisten dan mandiri.

Keempat, komunitas pemberdayaan harus bersifat *Gemeinschaft*. Sebagaimana kita ketahui, bahwa Ferdinan Tonnies mengklasifikasikan masyarakat kedalam dua jenis yakni *Gemeinschaft* dan *Gesellschaft*. Analisis Tonnies sangatlah mendalam dan kompleks, namun dalam konteks ini, uraiannya dapat disingkat dan disederhanakan dengan mengatakan bahwa dalam masyarakat *Gemeinschaft*, orang berinteraksi dengan relatif sedikit orang, yang mereka kenal dengan baik, dan dalam peran yang berbeda sedangkan masyarakat *Gesellschaft*, orang berinteraksi dengan lebih banyak orang namun interaksi ini terbatas pada kegiatan instrumental tertentu saja.⁵⁰ Struktur-struktur dan hubungan-hubungan didalam *Gemeinschaft* harus terkandung dalam konsep komunitas. Jadi komunitas ini harus memungkinkan orang berinteraksi dengan orang lain sesama anggota komunitas ini dalam keragaman peran yang lebih besar yang peran tersebut kurang dibeda-bedakan dan bukan berdasarkan kontrak. Hal ini kemudian menjadi penting karena memungkinkan setiap anggota komunitas untuk saling memberikan masukan dan bertukar berbagai kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Dalam menjalankan roda organisasi, Gapoktan desa Caruban nampaknya telah mengadopsi konsep masyarakat *Gesellschaft* dimana interaksi yang mereka lakukan tidak hanya sekedar terbatas pada kebutuhan

⁵⁰ Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Op.cit.*, hlm: 37.

organisasi dalam konteks peran, tugas dan wewenang mereka sebagai anggota organisasi. Namun mereka juga berinteraksi kedalam berbagai peran yang lain sebagai masyarakat desa Caruban secara umum. Hal tersebut memungkinkan mereka untuk lebih memahami potensi dan kemampuan masing-masing anggota. Pada akhirnya akan terjadi semacam *transfer knowledge* didalam Gapoktan itu sendiri. Lagi-lagi muncul harapan bahwa akan terbentuk kemandirian anggota di masing-masing kelompok tani.

Terakhir, bahwa setiap komunitas juga harus memiliki apa yang disebut sebagai “budaya”. Dalam analisisnya, Prof. Jim Ife mengatakan bahwa komunitas memungkinkan pemberian nilai, produksi, dan ekspresi dari suatu budaya lokal atau berbasis masyarakat, yang akan memiliki ciri-ciri unik yang berkaitan komunitas tersebut.⁵¹ Penjelasan tersebut kemudian dapat diartikan bahwa komunitas juga harus mampu memproduksi budaya yang sesuai dengan kebudayaan lokal dan berbasis masyarakat sebagai penangkal fenomena “kultur massal” atau budaya modern yang dikonsumsi secara massal. Namun, dari pengamatan dan wawancara yang dilakukan penulis, apa yang dilakukan Gapoktan sedikit berbeda dengan apa yang dimaksud oleh Prof. Jim Ife, yakni bahwa Gapoktan tidak memproduksi budaya yang sesuai dengan budaya lokal, namun Gapoktan memiliki apa yang disebut sebagai budaya organisasi, seperti apa yang diungkapkan oleh bapak Rusmanto;

⁵¹ *Ibid.*, hlm: 193-194.

“... ada semacam kebiasaan dalam kelompok tani desa Caruban, yaitu bahwa terdapat kesepakatan anggota mengenai waktu pertemuan anggota. Pertemuan anggota yang dilakukan oleh masing-masing sub kelompok tani diadakan bersamaan dengan pertemuan rutin atau arisan RT, sehingga pertemuan ini efektif dan efisien serta dapat mengakomodir keperluan setiap anggota. Karena anggota kelompok tani juga memiliki kegiatan dan kesibukan lain selain sebagai kelompok tani. Kemudian kebiasaan lain yang sudah menjadi kesepakatan yaitu ketika ada masalah apapun dalam organisasi, maka harus diselesaikan secara musyawarah mufakat, sehingga keputusan tertinggi ada pada saat musyawarah anggota. Kesepakatan ini akhirnya tercantum didalam AD/ART Gapoktan desa Caruban...”⁵²

Budaya organisasi yang dimiliki Gapoktan desa Caruban bersifat mengikat bagi seluruh anggota. Budaya semacam ini menurut Bapak Rusmanto penting dilakukan untuk membentuk mental profesionalitas setiap anggotanya. Kemudian, budaya organisasi lain yang juga dimiliki Gapoktan adalah dalam hal administratif, dimana setiap anggota diwajibkan untuk rapih secara administratif agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Bahkan Gapoktan desa Caruban pernah mendapatkan penghargaan sebagai kelompok percontohan dalam hal administrasi dan pertanggungjawaban dari Pemerintah Kabupaten Kebumen pada tahun 2010.

III.3 Kegiatan Pemberdayaan Oleh Gapoktan Karya Dadi Utama

Gapoktan Karya Dadi Utama merupakan salah satu program pemberdayaan di desa Caruban yang bertujuan untuk menciptakan perubahan sosial-ekonomi masyarakat desa Caruban agar pada akhirnya tingkat kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Sebagai wadah pemberdayaan, tentunya Gapoktan ini memiliki beberapa

⁵²Hasil wawancara dengan Bapak Rusmanto selaku mantan ketua Gapoktan desa Caruban 2008-2013 pada 28 Oktober 2014.

kegiatan pemberdayaan yang ditujukan kepada seluruh anggotanya. Dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut, diharapkan mampu memberikan kesadaran masyarakat sekaligus dibekali dengan pengetahuan dan wawasan mengenai cara bertani yang baik dan benar agar prinsip efektifitas dan efisiensi dapat terlaksana dengan baik sehingga pada akhirnya produktifitas petani juga meningkat. Dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan, Gapoktan Karya Dadi Utama mengambil posisi sebagai agen pemberdayaan ataupun fasilitator bagi para petani di Desa Caruban.

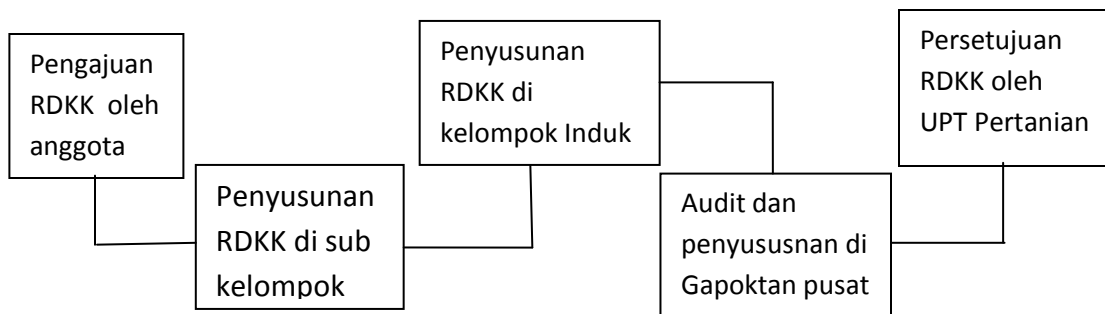
III.3.1 Akses Bibit, Pupuk, dan Obat-obatan Pertanian

Sebagai perwujudan dari upaya pemberdayaan masyarakat, Gapoktan Karya Dadi Utama tentu saja memiliki program-program yang disusun setiap. Salah satu yang paling utama dan dinilai paling penting adalah sebagai fasilitas terhadap akses bibit, pupuk, dan obat-obatan pertanian bagi anggota. Sejalan dengan tujuan awal dibentuknya kelompok tani, bahwa kehadiran kelompok tani merupakan prasyarat yang harus dilakukan agar petani dapat memperoleh akses pupuk bersubsidi.

Untuk dapat memperoleh pupuk subsidi, petani harus melalui beberapa tahapan yang keseluruhannya berkaitan dengan kelompok tani, sekaligus kelompok tani sebagai fasilitator terhadap keseluruhan proses tersebut. Setiap anggota harus menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sesuai dengan luas lahan sawah yang mereka miliki. RDKK merupakan semacam proposal pengajuan kebutuhan pupuk dari setiap anggota kelompok tani. Secara singkat, berikut adalah

alur pengajuan penyediaan pupuk bersubsidi dari petani sampai akhirnya pupuk bersubsidi dapat didistribusikan ke masing-masing kelompok:

Skema III.4
Alur Pengajuan Pupuk Bersubsidi Bagi Anggota Gapoktan



Sumber: Diolah berdasarkan hasil penelitian tahun 2014

RDKK yang telah dibuat oleh masing-masing anggota, kemudian digabungkan dengan RDKK anggota lainnya dalam satu sub kelompok tani tersebut. RDKK dari masing-masing anggota disusun dan diperiksa kembali oleh pengurus sub kelompok tani sesuai dengan format yang sudah ditentukan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen untuk kemudian diserahkan ke kelompok induk. Didalam kelompok Induk, RDKK dari masing-masing sub kelompok tani kemudian digabungkan menjadi satu bendel berkas RDKK atas nama Kelompok Induk untuk diajukan ke Gapoktan tingkat desa. Gapoktan tingkat desa berkewajiban untuk mengaudit ulang format RDKK dari masing-masing kelompok induk agar benar-benar sesuai dengan format yang sudah ditentukan. Kemudian RDKK ditandatangani oleh kepala desa Caruban. Setelah semua proses administrasi selesai, barulah RDKK

diserahkan ke UPT Pertanian untuk disetujui dan disampaikan kepada depot pengecer terdekat yang ada di wilayah desa Caruban. Setiap pengecer juga harus memenuhi syarat yang telah ditentukan agar mendapat izin resmi dari Distanak Kabupaten Kebumen.

Kelompok tani hanya diperbolehkan membeli pupuk bersubsidi kepada pengecer terdekat sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh UPT Pertanian. Artinya, kelompok tani tidak bisa membeli pupuk bersubsidi secara bebas atau selain di pengecer yang telah ditentukan. Jika membeli pupuk bersubsidi di pengecer lain yang bukan ditentukan oleh UPT Pertanian, maka kelompok tani akan mendapatkan sanksi dari Distanak Kabupaten atau UPT Pertanian mulai dari sanksi teguran atau peringatan sampai sanksi tindakan misalnya penahanan terhadap pupuk bersubsidi tersebut. Bahkan lebih parah lagi dapat juga diberi sanksi tidak diberikan izin membeli pupuk di musim tanam berikutnya.

Pola pembayaran pupuk bersubsidi yang diterapkan Gapoktan sangat membantu meringankan beban petani dalam hal modal bertani mereka. Petani dapat melakukan pembayaran setelah musim panen. Artinya, pembayaran pupuk bersubsidi menggunakan dana talangan kelompok. Ketika petani membayar pupuk bersubsidi pada waktu setelah masa panen, maka uang hasil pembayaran itulah yang kemudian digunakan untuk modal atau sebagai dana talangan membeli pupuk bersubsidi untuk keperluan musim tanam berikutnya. Oleh karena peran kelompok tani yang begitu vital terhadap akses distribusi pupuk bersubsidi kepada petani, maka kelompok tani

memiliki peran sebagai agen pemberdayaan bagi para petani desa caruban sebagai fasilitator dan mengakomodir kebutuhan para petani di desa Caruban.

Penulis melihat bahwa fokus utama Gapoktan sebagaimana tujuan awal dibentuknya Gapoktan ialah sebagai fasilitator pendistribusian pupuk bersubsidi kepada para petani. Hal tersebut sebenarnya sedikit bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan mengenai pertanian berwawasan lingkungan. Pupuk bersubsidi merupakan pupuk anorganik atau kimia yang pada hakekatnya akan merusak ekosistem lahan persawahan. Artinya program pertanian berwawasan lingkungan belum menjadi fokus utama tujuan dari dibentuknya gapoktan Karya Dadi Utama meskipun dalam program pengembangan kapasitas anggota terkadang anggota diberikan pelatihan mengenai cara pembuatan pupuk kompos. Oleh karena keterbatasan sarana produksi khususnya mesin pengolah pupuk kompos maka, hal tersebut pada akhirnya kurang efektif.

Disinilah peran pemerintah menjadi penting dalam rangka mendukung program pembangunan berkelanjutan dalam konteks pertanian berwawasan lingkungan. Pemerintah dituntut mampu membuat satu kebijakan mengenai hal ini beserta perannngkat sistem yang mendukung. Isu-isu lingkungan hidup menjadi bagian terpenting dalam setiap pembangunan berskala nasional terlebih Indonesia merupakan salah satu kawasan agraris. Pemerintah melalui kementerian atau dinas terkait harus mulai menyebarkan ‘virus’ pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga nantinya seluruh kelompok tani maupun gabungan kelompok

tani juga mereduksi tujuan utama organisasi yakni merubah pola pikir para petani untuk melakukan kegiatan pertanian berwawasan lingkungan. Misalnya dengan mulai mengurangi penggunaan pupuk kimia dan beralih memanfaatkan pupuk kompos.

Selain memfasilitasi distribusi pupuk bersubsidi agar dapat diperoleh petani, Gapoktan juga memberikan upaya untuk mendapatkan bibit pertanian dengan kualitas yang baik dan obat-obatan pertanian. Namun dalam penyediaan bibit dan obat-obatan pertanian, agak sedikit berbeda dengan penyediaan pupuk bersubsidi secara prosedur. Bibit pertanian dan obat-obatan sebenarnya dapat dibeli langsung oleh petani tanpa harus melalui kelompok. Setiap kali menjelang musim tanam, masing-masing petani memilih jenis bibit padi sesuai dengan keinginan mereka masing. Pada musim tanam, jenis bibit padi yang ditanam berbeda-beda sesuai dengan keinginan dan kebutuhan petani. Setiap petani juga mungkin akan menanam bibit padi dengan jenis yang berbeda-beda pada setiap petak sawahnya. Kebiasaan menanam jenis padi yang berbeda-beda seperti ini nampaknya sudah menjadi kebiasaan petani desa Caruban. Hal ini dilakukan agar mereka dapat membedakan kualitas masing-masing jenis padi yang ditanamnya sehingga pada musim tanam selanjutnya mereka dapat menanam bibit dengan kualitas yang lebih baik lagi. Perbedaan waktu musim tanam juga terkadang menjadi alasan untuk menanam jenis bibit tertentu. Artinya, penanaman jenis bibit padi akan berbeda antara musim kemarau dan musim penghujan.

Peran Gapoktan dalam menyediakan bibit unggul tentunya berpengaruh terhadap kualitas hasil pertanian, karena sudah dipastikan bahwa kualitas bibitnya akan lebih baik ketimbang bibit yang diolah oleh petani itu sendiri. Namun pihak Gapoktan memiliki hambatan yang bersifat kultural dalam mensosialisasikan atau mengkampanyekan penggunaan bibit unggul yang direkomendasikan oleh Gapoktan. Hambatan tersebut berkaitan dengan pola pikir masyarakat atau petani desa Caruban yang masih cenderung tradisional. Artinya masyarakat akan sulit menerima inovasi-inovasi baru berkaitan dengan bibit padi. Mereka lebih percaya dengan bibit hasil olahan mereka sendiri karena telah terbukti hasilnya pada saat musim panen sebelumnya. Petani baru akan menggunakan bibit hasil inovasi terbaru yang direkomendasikan Gapoktan tersebut ketika sudah terlihat hasilnya pada musim panen selanjutnya. Dengan kata lain, petani desa Caruban masih sulit untuk menerima hal yang baru sebelum mereka melihat kualitas hasil panennya. Sedangkan secara ilmiah, kualitas bibit akan mengalami penurunan setiap generasinya. Artinya, kualitas suatu jenis bibit padi akan berbeda hasilnya antara musim panen pertama dengan musim panen selanjutnya. Kondisi pola pikir masyarakat yang demikian pada akhirnya menjadi kendala tertentu yang sulit diatasi meskipun berbagai kegiatan sosialisasi dan pelatihan telah dilakukan oleh pihak Gapoktan. Hal ini memang sudah terjadi secara turun-temurun dikalangan petani desa Caruban, seperti apa yang dijelaskan oleh Sekretaris Desa Caruban, sosok yang juga peduli terhadap kemajuan dan perkembangan pertanian desa Caruban melalui wawancara sambil lalu yang dilakukan oleh penulis:

“... salah satu kendala bagi perkembangan pertanian disini adalah pola pikir petani yang masih sulit untuk dirubah. Mereka tidak mau menggunakan bibit-bibit dengan varietas baru dengan alasan mereka belum melihat hasil panennya, sehingga mereka tetap bertahan dengan bibit hasil olahan mereka sendiri. Kalaupun ada yang mau menggunakan bibit baru, biasanya mereka menunggu satu kali musim panen baru kemudian jika menurut mereka hasilnya memuaskan mereka baru mau menggunakan dimusim panen selanjutnya, padahal sudah pasti kualitasnya akan menurun karena bibit tersebut sudah masuk ke generasi kedua.”⁵³

Obat-obatan pertanian merupakan salah satu faktor penunjang agar dapat memperoleh hasil pertanian dengan kualitas yang baik. Oleh karena itu, Gapoktan juga menjadi fasilitator dalam akses pengadaan obat-obatan. Wawasan dan pengetahuan petani mengenai unsur dan jenis obat-obatan masih tergolong rendah, oleh karena itu Gapoktan memiliki peran penting dalam hal ini, karena memang kebiasaan petani menggunakan obat-obatan pertanian ataupun pestisida berdasarkan pada produk yang tersedia di warung atau agen terdekat.

Dalam proses pengadaan obat pertanian atau pestisida, Gapoktan selalu memberlakukan sistem musyawarah anggota. Artinya dicari kesepakatan terlebih dahulu obat-obatan pertanian jenis apa yang sesuai dengan kebutuhan saat itu, misalnya ketika sedang terkena hama wereng, pasti jenis pestisida yang dibutuhkan berbeda dengan ketika sedang terkena hama tikus. Kemudian dari hasil musyawarah tersebut juga diputuskan apakah memang anggota memerlukan campur tangan Gapoktan dalam hal pengadaan obat-obatan yang dilakukan secara kolektif atau tidak. Jika ternyata Gapoktan perlu melakukan upaya kolektif dalam hal pengadaan obat atau pestisida, maka Gapoktan akan memberlakukan sistem pinjaman, artinya pembayaran dapat dilakukan setelah musim panen. Modal awal yang digunakan

⁵³Wawancara sambil lalu dengan Sekdes Caruban, Bapak Darmawan.

untuk membeli obat-obatan pertanian berasal dari dana kas kelompok selama kondisi keuangan kelompok memungkinkan. Maka disinilah peran strategis Gapoktan dalam membantu memecahkan masalah pemilihan obat dan pestisida sekaligus membantu meringankan beban modal produksi bagi setiap anggota. Pola penyediaan obat-obatan pertanian atau pestisida dilakukan dengan memfasilitasi kegiatan promosi dan sosialisasi yang dilakukan oleh berbagai perusahaan produk obat dan pestisida. Sehingga akan diperoleh wawasan dan pengetahuan untuk memilih produk mana yang paling tepat dan sesuai.

Gambar 3.1
Lahan Sawah Percontohan Penggunaan Pestisida



Sumber: Dokumentasi Penulis Tahun 2014

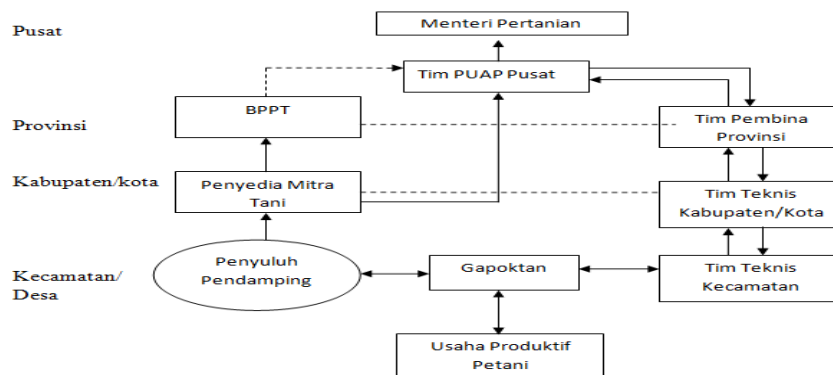
III.3.2 Simpan Pinjam Anggota

Kegiatan pemberdayaan lain yang juga dilakukan oleh Gapoktan yakni kegiatan simpan pinjam anggota. Simpan pinjam anggota menjadi salah satu kegiatan

prioritas Gapoktan karena memang kegiatan simpan pinjam ini sangat dirasakan kebermanfaatannya oleh masyarakat Caruban. Simpan pinjam yang dilakukan oleh Gapoktan hanya diperuntukan bagi anggota Gapoktan dimana setiap petani yang sudah menjadi anggota Gapoktan berhak untuk ikut bergabung kedalam aktivitas simpan pinjam tersebut.

Sumber dana dari kegiatan simpan pinjam ini selain berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota juga berasal dari dana hibah yang diperoleh dari Kementerian Pertanian atau yang disebut dengan dana PUAP (Program Usaha Agribisnis Pedesaan) yang menjadi salah satu program nasional prioritas Kementerian Pertanian pada era kepemimpinan Presiden SBY.

Skema III.5
Alur Pembinaan dan Pengendalian Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan



Sumber: Diolah berdasarkan hasil penelitian tahun 2014

Oleh karena Gapoktan merupakan salah satu program nasional, maka Gapoktan diberikan suntikan dana langsung dari pemerintah yakni dana PUAP seperti yang sudah dijelaskan diatas agar bisa dipergunakan bagi pengembangan anggota.

Adanya dana PUAP ini sangat membantu para petani yang tergabung kedalam Gapoktan. Dana PUAP ini pada prinsipnya dapat digunakan untuk segala hal yang berkaitan dengan usaha agribisnis, salah satunya sebagai suntikan modal bagi petani dengan diterapkannya usaha simpan pinjam oleh Gapoktan. Gapoktan Karya Dadi Utama pertama kali mendapat dana PUAP pada tahun 2008. Desa Caruban menjadi salah satu dari hanya 4 desa di Kecamatan Adimulyo. Dari total 23 desa hanya 4 desa yang mendapat dana PUAP senilai 100 juta rupiah. Sejak tahun 2008 hingga tahun 2014 desa Caruban selalu berhasil mendapatkan dana PUAP.

Pada tahun 2008 dan 2009, pengelolaan dana PUAP sepenuhnya dikelola oleh gapoktan dan peruntukannya ditentukan kedalam tiga aspek yakni, sarana dan prasarana pertanian, industri pertanian, dan peternakan. Kemudian alur pengajuan untuk bisa mengakses dana PUAP tersebut harus dengan menyusun Rencana Usulan Anggota (RUA), kemudian menjadi Rencana Usulan Kelompok (RUK) atau sub kelompok, dan terakhir Rencana Usulan Bersama (RUB) atau ditingkat Gapoktan untuk kemudian diajukan ke UPT pertanian kecamatan. Ditahun 2010, kemudian ada perubahan kebijakan dari yang awalnya dana PUAP dikelola oleh gapoktan kemudian diharuskan dikelola oleh Lembaga Keuangan Mikro (LKM). LKM ini dibentuk oleh Pemerintah desa atas rekomendasi Gapoktan. Artinya LKM merupakan lembaga independen diluar pemerintah desa maupun Gapoktan, namun dalam pelaksanaannya tetap ada kordinasi dengan Gapoktan. Secara organisasi, LKM terdiri dari seorang

manajer, seorang bendahara, dan seorang sekretaris. LKM inilah yang kemudian mengelola dana PUAP dari mulai pengajuan sampai pada pertanggungjawaban.

Perubahan kebijakan yang terjadi pada tahun 2010 yakni bahwa pengelolaan dana PUAP dilakukan oleh LKM juga berdampak pada pemanfaatan dana pinjaman tersebut. Perubahan kebijakan tersebut tidak mengatur bagaimana pemanfaatan dana pinjaman tersebut. Sedikit berbeda dengan sebelumnya pada saat dana masih dikelola oleh Gapoktan, dimana saat ini pemanfaatannya tidak harus diperuntukan kedalam tiga aspek yakni sarpras pertanian, teknologi pertanian, dan peternakan. Hal tersebut sedikit membawa dampak negatif bagi masyarakat. Oleh karena tidak ada kebijakan yang mengatur pemanfaatan dana pinjaman tersebut maka, tidak sedikit dari masyarakat yang memanfaatkan dana pinjaman untuk kebutuhan lain diluar kebutuhan permodalan dan pengembangan pertanian mereka. Artinya, menurut penulis, bahwa ada sedikit kelemahan didalam sistem tersebut yang mana tidak mengatur secara pasti pemanfaatan dana PUAP yang berasal dari pemerintah. Sehingga ada kecenderungan tidak tepat guna dalam pemanfaatannya oleh masyarakat.

Namun demikian, Gapoktan Karya Dadi Utama dalam kegiatan simpan pinjam ini memiliki peran yang cukup vital. Pertama, karena sumber dana utama berasal dari anggaran pemerintah melalui program PUAP yang sasaran utamanya ialah untuk pengembangan segala bentuk kegiatan agribisnis di pedesaan yang mana tentunya Gapoktan menjadi sasaran utama dari program tersebut. Kedua, diawal

kebijakan, Gapoktan memiliki tugas dan kewajiban untuk mengelola dana PUAP tersebut. Ketiga, setelah adanya perubahan kebijakan meskipun pengelolaan bukan lagi menjadi tugas dan tanggung jawab Gapoktan melainkan LKM, namun di desa Caruban para pengurus LKM ialah mereka yang juga sebagai pengurus Gapoktan, kemudian pembentukan LKM juga merupakan upaya dan inisiasi Gapoktan dan juga pemerintah desa Caruban. dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LKM juga selalu bekerja sama dan berkordinasi dengan Gapoktan.

Untuk mengajukan pinjaman, anggota Gapoktan harus mengajukan atas nama individu dan diajukan bersama-sama secara kolektif dengan anggota sub kelompoknya. Tidak ada syarat khusus bagi anggota yang ingin meminjam dana, syaratnya hanyalah harus sebagai anggota kelompok tani atau sub kelompok tani. Jumlah uang yang bisa di pinjam biasanya sudah ditentukan berdasarkan pembagian jumlah dana yang tersedia dibagi dengan jumlah seluruh anggota Gapoktan. Hal ini merupakan kesepakatan bersama seluruh anggota untuk menghindari kesenjangan dan kecemburuan sosial. Dengan adanya kebijakan tersebut maka akan terwujud keadilan bagi seluruh anggota Gapoktan. Batas waktu pengembalian juga berdasarkan kesepakatan bersama antara anggota Gapoktan, pengurus Gapoktan, pengurus LKM yakni setelah musim panen kedua dalam satu tahun. Kondisi geografis ditambah faktor cuaca dan iklim menyebabkan petani padi di desa Caruban hanya bisa panen sebanyak dua kali dalam setahun, biasanya dikenal dengan panen musim rendeng (penghujan) dan panen musim ketiga (kemarau). Jumlah suku bunga juga ditentukan

bersama berdasarkan kesepakatan bersama. Namun setiap sub kelompok diberikan kebebasan untuk menentukan atau memutuskan juga secara musyawarah anggota sub kelompok untuk menentukan jumlah bunga. Artinya, jumlah bunga yang ditentukan bisa berbeda-beda antara sub yang satu dengan sub lainnya. Jumlah bunga itu nantinya menjadi milik bersama atau masuk kas kelompok yang dapat digunakan untuk keperluan lain dalam rangka meningkatkan produktivitas dan pengembangan kelompok tani.

III.3.3 Pengembangan Kapasitas

Pengembangan kapasitas sebenarnya menjadi hal yang paling penting dari tugas dan fungsi Gapoktan Karya Dadi Utama. Pengembangan kapasitas anggota menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Sesuai dengan konsep pemberdayaan dimana tujuan akhir dari pemberdayaan ialah mengembangkan kapasitas masyarakat agar mereka menjadi berdaya dan mandiri. Para petani di desa Caruban sebagian besar masih perlu peningkatan pengetahuan dan wawasan bertani agar ada peningkatan produktifitas hasil pertanian dan tercapai efektifitas dan efisiensi pertanian mereka. Seperti yang di kemukakan oleh Bapak Rusmanto, adapun beberapa upaya yang dilakukan oleh Gapoktan Karya Dadi Utama dalam rangka mengembangkan kapasitas anggotanya yakni dengan mengadakan pelatihan, sekolah pertanian, dan pengadaan peralatan pertanian.

Pelatihan yang diberikan kepada anggota Gapoktan biasanya adalah pelatihan pembuatan pupuk organik dan pelatihan pemberantasan hama. Kegiatan pelatihan dalam program pemberdayaan masyarakat ini berfungsi untuk memberikan pembelajaran nyata yaitu dengan melakukannya secara langsung (turun lapangan) yang bertujuan untuk mendorong perubahan, dan mendorong perubahan pola pikir, keterampilan, dan cara bertani yang lebih baik lagi. Pada pelatihan pembuatan pupuk organik, petani diajarkan bagaimana memanfaatkan kotoran hewan agar memiliki nilai guna bagi mereka. Dengan adanya pelatihan ini, petani diharapkan mampu memanfaatkan kotoran hewan yang tersedia cukup banyak di wilayah desa Caruban karena memang banyak juga petani yang memiliki hewan ternak seperti kambing dan sapi sehingga mereka bisa memanfaatkan kotoran hewan ternaknya. Kemudian, pupuk organik juga sangat baik untuk meningkatkan kualitas kesuburan lahan pertanian. Terakhir, dengan memanfaatkan pupuk kompos, petani juga bisa sedikit mengurangi beban modal yang harus ia keluarkan.

Pelatihan lain yang diterima anggota Gapoktan ialah pelatihan mengenai bagaimana cara penanganan hama. Sebagaimana kita ketahui, ancaman terbesar petani adalah serangan hama. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai cara pemberantasan hama yang baik dan benar juga menjadi hal yang tidak kalah penting untuk mereka miliki. Penanganan hama tidak bisa dilakukan sekali saja, namun harus dilakukan berulang kali agar hasil yang didapat juga optimal. Dengan adanya

pelatihan ini, petani diharapkan memiliki pengetahuan baru mengenai cara pemberantasan hama secara tepat.

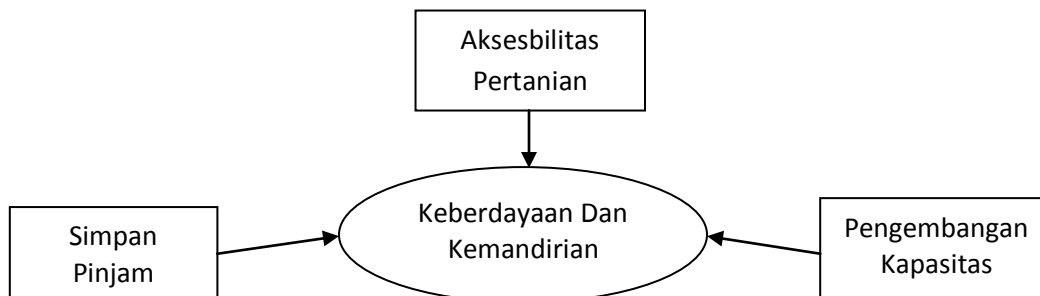
Pengembangan kapasitas lainnya yang juga diberikan oleh gapoktan Karya Dadi Utama ialah sekolah pertanian. Sekolah pertanian ini merupakan program tahunan Gapoktan Karya Dadi Utama. Sekolah pertanian terlaksana berkat inisiasi pengurus Gapoktan yang mengajukan proposal kegiatan kepada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen. Artinya sekolah pertanian ini difasilitasi oleh Distanak Kebumen.

Kegiatan yang dilakukan di sekolah pertanian sebenarnya hampir sama dengan kegiatan pelatihan lainnya, hanya saja kegiatan ini dilakukan dalam 4 tahap secara bergantian di masing-masing kelompok induk. Pada sekolah pertanian ini anggota kelompok tani diberikan pelatihan dan penyuluhan baik secara materi maupun praktek langsung terkait semua pengetahuan dan wawasan bertani agar bisa meningkatkan produktifitas hasil pertanian. Setelah mengikuti program sekolah pertanian, anggota Gapoktan juga mengikuti program pendampingan dari UPT pertanian kecamatan Adimulyo. Program pendampingan ini dilakukan agar seluruh pelatihan dan penyuluhan yang telah dilakukan dapat diterapkan dan dilakukan dengan baik dan benar oleh petani dan kemudian diadakan evaluasi untuk terus mengoptimalkan hasil yang ingin dicapai. Selain itu, adanya program dampingan ini juga memberikan rasa aman, nyaman, dan mudah bagi petani serta sebagai media konsultasi dan mediasi setiap kali ada masalah. Dari hal tersebut, kemudian dapat

membangun kekuatan mental serta *power* petani untuk bisa merubah pola pikir dan sikap mereka dalam bertani.

Dalam rangka meningkatkan produktifitas pertanian di desa Caruban, Gapoktan Karya dadi Utama juga sudah memiliki peralatan pertanian yang bisa mendukung pengembangan sektor pertanian di desa Caruban yakni mesin pompa air dan mesin APO atau mesin pembuatan pupuk kompos. Pengadaan kedua mesin ini berasal dari pengajuan proposal oleh Gapoktan Karya Dadi Utama kepada Distanak Kabupaten Kebumen. Peralatan ini sangat membantu petani desa Caruban dalam pengembangan pertanian mereka. Seperti yang kita ketahui, bahwa kekeringan juga salah satu ancaman para petani padi ketiga musim kemarau datang, dengan adanya mesin pompa air ini, dapat membantu mencukupi kebutuhan pengairan karena didukung juga oleh ketersediaan sumber air atau sungai sebagaimana sudah dibahas pada bab sebelumnya bahwa desa Caruban dilalui oleh dua aliran sungai. Kemudian ketersediaan mesin APO juga sangat membantu khususnya untuk pembudidayaan pupuk kompos. Artinya pelatihan dan penyuluhan mengenai bagaimanacara pembuatan pupuk kompos dapat dipraktikan langsung oleh masyarakat. Pupuk kompos yang telah diolah menggunakan mesin APO ini biasanya digunakan untuk menambah kesuburan lahan pertanian dan dapat dimanfaatkan oleh anggota Gapoktan.

Skema III.6
Pola Pemberdayaan Gapoktan Karya Dadi Utama



Sumber: Diolah berdasarkan hasil penelitian tahun 2014

Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Gapoktan Karya Dadi Utama ini diharapkan mampu dimanfaatkan anggotanya secara maksimal, baik dalam hal akses pupuk, bibit dan obat-obatan, kegiatan simpan pinjam, serta kegiatan pengembangan kapasitas. Disinilah peran Gapoktan Karya Dadi utama sebagai agen pemberdayaan masyarakat. Pada kegiatan pemberdayaan ini, masyarakat diberikan kemudahan aksesibilitas, pelatihan, dan peningkatan kapasitas.

Gambar III.2
Kegiatan Panen Padi



Gambar III.3
Kegiatan Pengeringan Padi



Sumber: Dokumentasi Penulis Tahun 2014

III.4 Tantangan dan Hambatan Gapoktan Karya Dadi Utama

Pemberdayaan masyarakat bukanlah hal yang bisa dilakukan secara instan melainkan harus dimaknai sebagai sebuah proses. Pemberdayaan masyarakat harus dipahami sebagai upaya yang berkesinambungan dan multiaspek. Pemberdayaan tidak akan berhasil ketika dalam prosesnya tidak ada sinergi antara agen dan subjek pemberdayaan itu sendiri. Kemudian peran pemerintah juga menjadi salah satu kunci keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Sudah menjadi barang tentu bahwa dalam upaya melakukan kegiatan pemberdayaan, akan menjumpai berbagai kendala dan masalah. Kesungguhan dan konsistensi pelaksana program pemberdayaan pada akhirnya menjadi kunci atas keberhasilan program pemberdayaan. Disamping itu kesadaran dan kemauan masyarakat sebagai subjek pemberdayaan juga menjadi hal yang tidak bisa dikesampingkan jika program pemberdayaan ingin mencapai tujuan mulianya yaitu menciptakan masyarakat yang berdaya dan mandiri dan pada akhirnya akan mampu memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Dalam melaksanakan program pemberdayaan, Gapoktan Karya Dadi utama tentunya juga menjumpai berbagai tantangan dan hambatan baik yang muncul dari eksternal maupun internal organisasi. Pertama, kendala yang paling nyata berkaitan dengan internal organisasi. Sesuai dengan AD/ART organisasi bahwa setiap tahun harus dilakukan reorganisasi, semenjak terbentuknya Gapoktan Karya Dadi Utama pada tahun 2008 hingga tahun 2013 ketua Gapoktan Karya Dadi Utama dijabat oleh Bapak Rusmanto, sedangkan pada tahun 2014, ketua Gapoktan Karya Dadi Utama

dijabat oleh Bapak Ir. Suwondo. Pergantian ketua dan kepengurusan Gapoktan pada tahun 2014 membutuhkan adaptasi organisasi yang cukup lama sehingga menyebabkan Gapoktan Karya Dadi Utama terkesan kurang produktif. Hal ini diperkuat dengan keterangan Kepala Desa Caruban yang menyatakan bahwa pada kepengurusan tahun 2014, Gapoktan Karya Dadi Utama masih belum menjalankan programnya dan cenderung masih stagnan karena memang belum ada hasil yang bisa dirasakan oleh anggotanya, Kepala Desa juga menilai bahwa kepengurusan tahun 2014 masih kurang kompak secara organisais. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa ada konflik laten didalam internal organisasi. Masalah tersebut muncul karena adanya krisis kepercayaan sebagian anggota Gapoktan terhadap ketua Gapoktan itu sendiri. Masalah tersebut juga diperkuat dengan adanya kecurigaan mengenai masalah akuntabilitas didalam laporan pertanggungjawaban Gapoktan Karya Dadi Utama pada Rapat Tahunan Anggota tahun 2013 lalu. Kondisi tersebut menjadi masalah yang berdampak pada menurunnya produktifitas organisasi. Dalam pandangan sosiologis, bahwa keutuhan dan keharmonisan organiasi merupakan modal awal bagi tercapainya tujuan organisasi itu sendiri. Sehingga kondisi yang saat ini terjadi harus segera dicarikan solusi dan dibutuhkan integritas dari semua pihak karena keharmonisan organisasi merupakan tanggung jawab seluruh elemen organisasi tersebut.

Kedua, tantangan selanjutnya yang dihadapi oleh Gapoktan Karya Dadi Utama yaitu mengenai tupoksi organisasi yang belum tercapai secara optimal. Dalam

struktur organisasi Gapokan Karya Dadi Utama terdapat beberapa seksi, salah satunya ialah Sie Pemasaran Hasil. Dalam menjalankan tupoksinya, Sie Pemasaran Hasil nampaknya belum memiliki kontribusi yang signifikan. Seksi ini seolah hanyalah pelengkap struktur organisasi karena belum terlihat kontribusinya bagi petani di desa Caruban. Pemasaran produk pertanian menjadi hal yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Kendala utama petani ialah harga produk pertanian mereka yang sangat bergantung pada pasar. Artinya, petani merupakan produsen yang tidak pernah mampu menentukan harga atas hasil produknya sendiri. Gapoktan seharusnya melihat ketidakberdayaan petani pada konteks ini. Struktur organisasi yang menghadirkan Sie Pemasaran Hasil idealnya mampu memberikan solusi atas masalah tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa harga padi sangat bergantung pada pasar atau bahkan bergantung pada permainan tengkulak yang jelas merugikan petani sebagai produsen padi.

Penulis melihat bahwa masih ada titik lemah yang dimiliki Gapoktan Karya Dadi Utama dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan petani desa Caruban. Upaya untuk memperbaiki mekanisme pemasaran hasil bagi petani harus dilakukan. Selama ini, petani selalu menjual hasil panennya pada pembeli padi secara masing-masing. Bahkan setiap kali musim panen datang, harga jual padi justru mengalami penurunan. Hal ini jelas mempersulit posisi petani karena disatu sisi, mereka harus menyiapkan modal untuk musim tanam selanjutnya. Upaya Gapoktan sebagai solusi hal ini dapat dilakukan dengan cara menjadi koperasi petani yang bisa menampung kebutuhan

akan penjualan padi para petani. Dengan kata lain, Gapoktan bisa mengambil posisi sebagai pembeli padi dari para petani dengan menentukan harga yang sesuai. Kemudian padi-padi tersebut ditampung dan kemudian diolah menjadi beras terlebih dahulu dan baru dijual kepada pengusaha beras pada saat harga jual padi sedang tinggi. Harga jual padi akan mengalami kenaikan saat musim kemarau panjang tiba, atau lebih dikenal dengan musim *paceklik*. Hal ini tentu membutuhkan kerja keras dan kemauan semua pihak serta dibutuhkan pula modal awal yang mungkin cukup besar. Namun penulis percaya bahwa dengan menggunakan sistem koperasi tani semacam itu akan mampu memberikan solusi atau paling tidak mengurangi ketertindasan para produsen padi dalam hal ini para petani di desa Caruban dalam hal harga jual padi yang selama ini belum tertangani dengan baik.

Ketiga, kendala lain yang dihadapi gapoktan Karya dadi utama ialah kurangnya *support* dari pemerintah desa Caruban. Salah satu responden penulis yang menolak untuk dipublikasi identitasnya mengatakan bahwa idealnya harus juga ada keterlibatan pemerintah desa dalam upaya pemberdayaan ini. Bahwa memang benar, peran pemerintah desa sangat vital mengingat pemberdayaan harus dilakukan melalui keterlibatan dan sinergi semua pihak, tidak hanya Gapoktan sebagai agen dan petani sebagai subjek pemberdayaan melainkan juga dituntut adanya peran aktif dari pemerintah desa Caruban. Kurangnya dukungan dari pemerintah desa akan menyebabkan Gapoktan kurang optimal dalam melaksanakan program pemberdayaan. Artinya, pemerintah desa Carubah harus mengevaluasi diri mengenai

peran serta pemerintah desa dalam setiap program pemberdayaan yang ada di desa Caruban. Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara penulis dengan beberapa pengurus dan anggota Gapoktan, bahwa dalam hal pendanaan, bantuan dari pemerintah desa sangat minim. Pemerintah desa hanya mengeluarkan anggaran sekali saja yaitu pada saat awal pembentukan Gapoktan di tahun 2008. Meskipun demikian tidak berarti Pemerintah Desa Caruban lepas tangan begitu saja, sesuai dengan keterangan Kepala Desa, bahwa keterlibatan pemerintahan desa Caruban ada pada tataran kebijakan yang mendukung pembangunan dan pengembangan pertanian di desa Caruban misalnya dengan melakukan perbaikan dan perawatan saluran irigasi, pengerukan lahan, dan penyedotan air saat musim kemarau, dan juga koordinasi dengan desa sekitar terkait pemanfaatan dan pemerataan perairan yang berasal dari debit aliran dua sungai yang melintasi desa Caruban. Kepala Desa juga menambahkan bahwa pemerintah desa berperan sebagai mediator atau penengah dalam setiap pemecahan masalah internal organisasi.

Berdasarkan penjelasan kepala desa, bahwa pola pikir masyarakat desa Caruban yang pada umumnya masih tradisional juga menjadi salah satu kendala bagi Gapoktan dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan. Hal tersebut ditambah dengan kualitas SDM pengurus Gapoktan yang juga ternyata masih perlu banyak dievaluasi dan ditingkatkan kinerjanya. Hambatan dan tantangan yang ada seharusnya bukanlah menjadi alasan untuk tidak optimal dalam menjalankan tupoksi demi tercapainya tujuan dari program pemberdayaan itu sendiri. Dengan adanya tantangan dan kendala

tersebut diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi Gapoktan Karya Dadi Utama untuk meningkatkan produktifitas organisasi.

III.4 Penutup

Program pemberdayaan masyarakat dipercaya sebagai jalan baru menuju kesejahteraan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat yang menitikberatkan pada peran aktif masyarakat sebagai subjek pemberdayaan menjadi nilai lebih tersendiri dalam upaya pengembangan masyarakat. Gapoktan Karya Dadi Utama merupakan salah satu dari beberapa kelompok pemberdayaan di desa Caruban yang berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa Caruban. Dibandingkan dengan kelompok pemberdayaan yang lainnya, Gapoktan Karya Dadi Utama terlihat lebih aktif dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaanya. Hal ini tentu juga berkaitan dengan dampak yang juga dirasakan masyarakat desa Caruban yang notabene sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Karena urgensi dan relevansi inilah Gapoktan Karya Dadi Utama seolah menjadi mata pisau upaya pemberdayaan masyarakat di desa Caruban.

Gapoktan Karya Dadi Utama mencoba memosisikan diri sebagai pemantik atau pemicu kesadaran masyarakat akan pentingnya menjadi masyarakat yang berdaya dan mandiri. Masyarakat menjadi sadar akan pentingnya berorganisasi dengan membentuk dan bergabung dengan Gapoktan Karya Dadi Utama. Melalui Gapoktan ini, para petani mendapatkan wawasan dan pengetahuan baru mengenai

bagaimana cara bertani yang efektif dan efisien untuk bisa meningkatkan produktifitas mereka, sehingga petani akhirnya merasakan dampak dan manfaat akan kehadiran Gapoktan karya Dadi Utama. Dengan demikian, evaluasi secara rutin nampaknya juga perlu dilakukan untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi. Keterlibatan dan peran aktif semua pihak juga idealnya mengalir secara optimal agar tujuan organisasi bisa tercapai secara optimal pula.

BAB IV

MEMBANGUN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI INSTITUSI PERANTARA

A. Pengantar

Setelah pembahasan mengenai temuan lapangan pada bab-bab sebelumnya, bab IV ini memfokuskan pembahasannya pada analisa penulis mengenai dampak yang dirasakan masyarakat desa Caruban dengan adanya program pemberdayaan masyarakat khususnya pada program Gapoktan Karya Dadi Utama melalui teori dan konsep yang telah dijelaskan pada bab I. Bab ini akan terbagi kedalam beberapa sub bab dimana pada sub bab pertama penulis akan mencoba memaparkan bagaimana kelompok pemberdayaan berperan sebagai institusi perantara untuk mewujudkan kesejahteraan petani. Pada sub bab berikutnya, penulis akan menganalisa bagaimana dampak yang diberikan Gapoktan Karya Dadi Utama dalam membentuk kemandirian dan kesejahteraan petani di desa Caruban. Sub bab terakhir, penulis akan memberikan gambaran mengenai analisis SWOT terkait program pemberdayaan yang sudah dilakukan Gapoktan Karya Dadi Utama.

Pertanian sebagai potensi utama desa Caruban menjadikan Gapoktan Karya Dadi Utama memiliki posisi dan peran yang sentral bagi para petani desa Caruban sebagai wadah pemberdayaan mereka. Keberadaan Gapoktan ini, dirasa mampu memberikan

manfaat bagi petani dalam hal efektifitas cara bertani dan peningkatan produktivitas hasil pertanian sehingga kesejahteraan para petani pada akhirnya dapat meningkat.

A. Gapoktan Sebagai Institusi Perantara

Gapoktan Karya Dadi Utama merupakan organisasi lokal yang dibentuk melalui inisiasi pemerintah desa Caruban sebagai respon atas kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian (negara) terkait dengan pembentukan Gapoktan sebagai mediator penyaluran pupuk bersubsidi. Melihat bahwa terbentuknya gapoktan merupakan inisiasi pemerintah desa dan tujuan awal dibentuknya gapoktan sebagai kepanjangan tangan negara dalam upaya mensejahterakan petani, maka Gapoktan merupakan institusi lokal yang terdiri dari orang-orang yang mengorganisir diri dengan tujuan yang sama. Tujuan untuk mewujudkan petani yang sejahtera, mandiri, dan berdaya. Hal ini Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Berger dan Neuhaus, bahwa struktur mediasi dapat didefinisikan sebagai lembaga-lembaga yang mempunyai posisi diantara wilayah kehidupan individu secara privat dengan lembaga-lembaga makro yang berhubungan dengan kehidupan publik.⁵⁴ Posisi Gapoktan sebagai lembaga perantara yakni berada diantara petani khususnya petani desa Caruban dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian untuk mengejawantahkan kebijakan dan program-program dari Kementerian Pertanian agar bisa diakses langsung oleh petani sehingga tercipta kesejahteraan petani.

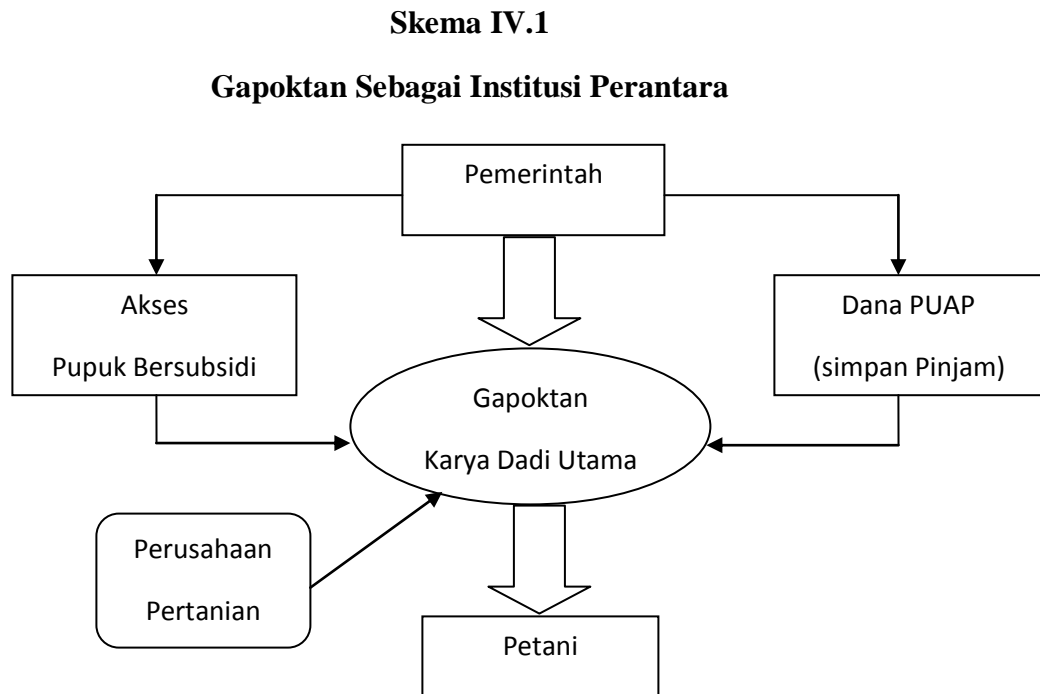
⁵⁴ Heru Nugroho, *Op.cit.*, hlm: 142.

Merujuk pada apa yang dikemukakan oleh Ferdinand Tonnies, bahwa lembaga perantara masuk kedalam kategori kelompok sosial *gemeinschaft* (kelompok atau asosiasi).⁵⁵ *Gemeinschaft* merupakan situasi yang berorientasi pada nilai-nilai, aspiratif, memiliki peran, dan terkadang menjadi kebiasaan asal yang mendominasi kekuatan sosial yang timbul dari dalam individu dan adanya keinginan untuk memiliki hubungan atau relasi yang didasarkan atas kesamaan keinginan dan tindakan. Individu dalam hal ini diartikan sebagai perekat dan pendukung dari kekuatan sosial yang terhubung dengan orang lain, yang dengannya mereka membangun hubungan emosional dan interaksi satu individu dengan individu lain.

Gapoktan Karya Dadi Utama menjadi organisasi lokal yang beranggotakan petani desa Caruban yang memiliki kesamaan tujuan dan tindakan. Dalam menjalankan roda organisasinya Gapoktan Karya Dadi Utama mengedepankan azas kekeluargaan dan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusannya. Interaksi yang terjadi didalamnya didasarkan pada kesamaan tujuan yakni mengupayakan terbentuknya petani yang mandiri dan berwawasan. *Gemeinschaft* dalam Gapoktan Karya Dadi Utama berlangsung melalui proses interaksi terus menerus dan berkesinambungan. Interaksi yang terjadi tidak hanya antar petani desa Caruban, namun juga melibatkan institusi dalam hal ini pemerintah desa Caruban dan dinas terkait dilingkungan Kabupaten Kebumen. Hubungan-hubungan yang lebih luas ini dimaksudkan agar mampu mengakomodir seluruh kepentingan petani desa Caruban

⁵⁵ James L. Spates dan J. Macionis, 1987, *The Sociology Of Cities*, California: Wardswort Publishing Company, hlm: 102.

untuk sama-sama meningkatkan kesejahteraan petani. Jaringan sosial dapat berfungsi sebagai agen pemberdayaan dan menggali potensi yang bisa dimanfaatkan dari jaringan yang ada serta membantu aksesibilitas bagi para petani khususnya aksesibilitas dalam aspek pertanian. Gapoktan sebagai organisasi yang memanfaatkan jaringan sosial juga menjadi perpanjangan tangan pemerintah dengan melakukan program-program yang diberikan pemerintah misalnya penyaluran dana PUAP bagi petani dan akses pupuk bersubsidi. Peran Gapoktan sebagai institusi perantara pada akhirnya mampu menciptakan



Sumber: Diolah Berdasarkan Hasil Penelitian Tahun 2014

Skema diatas menjelaskan bagaimana Gapoktan Karya Dadi Utama sebagai institusi perantara yang menghubungkan antara pemerintah dengan petani serta

perusahaan pertanian yang menawarkan beberapa produk pertanian seperti bibit, pupuk, obat-obatan pertanian dengan petani desa Caruban. Gapoktan mengoptimalkan jaringan sosial secara berkesinambungan dalam mengupayakan kegiatan pemberdayaan.

Kehadiran Gapoktan menjadi penting bagi masyarakat desa caruban sebagai fasilitator pendistribusian pupuk bersubsidi sesuai dengan kebijakan Kementerian Pertanian tahun 2008. Petani hanya bisa memperoleh pupuk bersubsidi melalui Gapoktan sebagaimana mekanismenya telah diatus sedemikian rupa dan telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya. Selain menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani, peran gapoktan sebagai institusi perantara juga terlihat pada proses penyaluran dana PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan) yang bersumber dari APBN dan disalurkan oleh Kementerian Pertanian. Pemanfaatan dana PUAP digunakan untuk pengembangan usaha pertanian, sehingga bagi petani, dana PUAP sangat bermanfaat untuk membantu pengembangan pertaniannya. Gapoktan Karya Dadi Utama menjadikan dana PUAP sebagai sumber dana bagi kegiatan simpan pinjam sebagai upaya pemberdayaan oleh Gapoktan. Mekanisme penyaluran dana PUAP juga telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya.

Peran lain yang dimainkan oleh Gapoktan Karya Dadi Utama sebagai institusi perantara ialah penghubung antara pihak swasta dalam hal ini perusahaan penyedia produk pertanian dengan petani. Dalam proses produksi pertanian, pupuk, obat-obatan, bibit menjadi hal yang paling penting dalam menentukan kualitas dari hasil

pertanian. Oleh karena itu, pihak swasta juga memiliki peran dalam proses *intermediary institutions* sebagai agen yang menyediakan keperluan pertanian sebagaimana mekanismenya juga telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Intermediary institutions sebagaimana digambarkan pada skema diatas berlangsung melalui proses jaringan sosial secara terus menerus dan berkesinambungan dalam interkasi dan komunikasi yang dibangun oleh Gapoktan karya dadi Utama. Proses institusi perantara mulai terjadi saat terjalin komunikasi diantara anggota gapoktan sebagai suatu organisasi lokal masyarakat desa Caruban. Gapoktan yang menjadi aktor kemudian memainkan perannya dengan memanfaatkan jaringan sosial yang ada. Jaringan yang terbentuk yakni pemerintah melalui Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen. Jaringan sosial lain yang dimiliki ialah pihak swasta yang menjadi penyedia produk pertanian. Jaringan sosial ini terbentuk melalui kemampuan individu setiap pengurus dan anggota Gapoktan dalam menjalin komunikasi dengan jaringan sosial yang ada. Artinya Gapoktan sebagai aktor memiliki kemampuan untuk memberikan akses kepada anggota, agen, pihak eksternal (pemerintah dan swasta) dalam proses pemberdayaan bagi petani. Disinilah Gapoktan Karya Dadi Utama memainkan perannya sebagai intitusi perantara.

Secara konseptual, institusi perantara harus mampu memainkan perannya secara dua arah, artinya Gapoktan sebagai institusi perantara selain sebagai penyalur program pemerintah, juga harus mampu mengakomodir aspirasi anggota. Sehingga

pola komunikasi yang terbangun dua arah antara pemerintah dan masyarakat ataupun sebaliknya. Namun, saat ini Gapoktan karya Dadi Utama masih belum maksimal memainkan perannya dalam mewadahi dan menampung aspirasi anggota yang kemudian disampaikan kepada pemerintah. masyarakat harus memberikan tekanan kepada pemerintah agar komunikasi seimbang.

B. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Tani

Berkembangnya kelompok tani di desa Caruban merupakan dampak dari adanya kesadaran masyarakat desa Caruban akan pentingnya berkelompok dan berorganisasi. Para petani mulai menyadari bahwa kelompok tani mampu menghantarkan mereka kearah kemandirian dan keberdayaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. oleh karena itu, pemberdayaan melalui kelompok tani dianggap sebagai jalan baru pembangunan dan kendaraan untuk mencapai perubahan.

Pemberdayaan dalam konteks masyarakat adalah membangun kemampuan individu dalam mengatasi masalah yang dihadapi, yaitu kemampuan diri anggota untuk bersenyawa dalam masyarakat untuk bersama-sama dan secara merata membangun keberdayaan masyarakat.⁵⁶ Secara sederhana pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk menjadikan masyarakat yang tidak berdaya (*powerless*) menjadi masyarakat yang berdaya (*empowered*).⁵⁷ Menciptakan petani yang mandiri dan berdaya ialah tujuan dari Gapoktan Karya Dadi Utama. Dengan pola

⁵⁶ Ginanjar Kartasmita, 1996, Kebijakan dan Pembangunan Sosial, Jakarta : LP3ES, hlm: 45.

⁵⁷ Jim Ife dan Frank Toseriero, *Op.cit.*, 1995, Hlm: 163.

berkelompok ataupun keminitas, kelompok tani secara bersama-sama mengupayakan terjadinya perubahan sosial ekonomi mereka.

Lebih lanjut Ife menjelaskan bahwa pemberdayaan yakni memberikan orang atau kelompok, sumber-sumber kehidupan mereka, kesempatan, pengetahuan, dan ketrampilan untuk meningkatkan kapasitas mereka menentukan masa depan mereka sendiri dan untuk ikut berpartisipasi dalam mempengaruhi komunitas kelompok mereka.⁵⁸

Keberdayaan masyarakat tercermin pada keadaan bahwa masyarakat memiliki kesehatan fisik dan mental, terdidik, dan mampu menemukan terobosan-terobosan terhadap masalah yang dihadapi. Selain tercermin kedalam hal-hal yang bersifat manifes, keberdayaan masyarakat juga dapat tercermin melalui kondisi yang bersifat laten seperti nilai-nilai instrinsik sosial dalam masyarakat misalnya sikap dan mental kekeluargaan, kegotongroyongan dalam masyarakat kita yang kebhinekaan. Dalam kerangka berfikir bahwa memberdayakan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat demi pencapaian harkat dan martabat masyarakat, upaya memeberdayakan masyarakat haruslah dimulai dengan menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang dengan memupuk, mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi untuk bertahan dan memperbaiki nasib setiap individu.⁵⁹

⁵⁸ *Ibid.*, hlm: 183.

⁵⁹ Ginanjar Kartasasmita, 1996, *Op.cit.*, hlm: 47.

Konsep pemberdayaan menjadi hal penting kaitannya dengan strategi pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan melalui pendekatan kultural. Secara sederhana pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk menjadikan masyarakat yang tidak berdaya (*powerless*) menjadi masyarakat yang berdaya (*empowered*).⁶⁰ Lebih lanjut Ife menjelaskan bahwa pemberdayaan yakni memberikan orang atau kelompok, sumber-sumber kehidupan mereka, kesempatan, pengetahuan, dan ketrampilan untuk meningkatkan kapasitas mereka menentukan masa depan mereka sendiri dan untuk ikut turut berpartisipasi dalam mempengaruhi komunitas kelompok mereka.⁶¹ Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan prinsip layanan berbasis masyarakat. Layanan berbasis masyarakat dilihat sebagai struktur-struktur dan proses-proses untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan mengerahkan sumber daya, keahlian dan kearifan dari komunitas itu sendiri.⁶² Pendekatan layanan berbasis masyarakat meniscayakan terbentuknya komunitas-komunitas atau kelompok pemberdayaan yang pada akhirnya menjadi mesin penggerak atas program pemberdayaan itu sendiri. Pola semacam inilah yang juga digunakan Gapoktan KDU dalam memberdayakan anggotanya.

Untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya, Gapoktan Karya Dadi Utama memanfaatkan kesadaran dan keinginan untuk berubah dari masyarakat yang sudah mulai muncul. Peluang tersebut kemudian dilengkapi dengan keinginan dan kemauan masyarakatnya untuk terlibat dan berpartisipasi secara bersama-sama dalam

⁶⁰ Jim Ife dan Frank Toseriero, 1995, *Op.cit.*, hlm: 163.

⁶¹ *Ibid.*, hlm: 183.

⁶² Jim Ife dan Frank Toseriero, 2008, *Op.,Cit*, hlm: 3.

kelompok tani. Baru kemudian peran kelompok tani dengan menyediakan wadah melalui kegiatan pemberdayaan.

Menurut Wilson, bahwa kegiatan pemberdayaan pada setiap individu dalam suatu organisasi merupakan siklus pemberayaan yang terdiri dari: pertama, menumbuhkan keinginan individu untuk berubah dan memperbaiki, kedua menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk mengikuti pemberdayaan, ketiga mengembangkan kemauan untuk ikut terlibat dalam kegiatan pemberdayaan, keempat peningkatan peran partisipasi dalam pemberdayaan, kelima peningkatan peran dan kesetiaan untuk menciptakan perubahan, keenam peningkatan efektifitas dan efisiensi pemberdayaan, ketujuh peningkatan kompetensi untuk melakukan perubahan.⁶³

C. Dampak Pemberdayaan Bagi Masyarakat Petani

Terbentuknya Gapoktan Karya Dadi Utama pada tahun 2008 menjadi awalan pembangunan masyarakat desa Caruban. Pada saat itu, kondisi sosial ekonomi masyarakat desa Caruban seolah jalan ditempat, pergantian kepemimpinan kepala desa juga belum memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan sosial. Meskipun gagasan terbentuknya Gapoktan melalui kebijakana pemerintah, namun peran masyarakat tidak bisa dikesampingkan karena secara organisasi. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sepenuhnya dilakukan oleh, dari, dan untuk masyarakat.

Dari aspek pertanian, pada saat itu petani desa Caruban masih menggunakan cara bertani yang tradisional, misalnya teknik bertanam yang masih mengandalkan

⁶³ Totok Mardikanto, 2010, Op.cit., Hlm: 140.

kuantitas ketimbang kualitas. Masyarakat yang belum terbuka atau deinovatif. Masyarakat masih menggunakan cara bertanam berdasarkan pengetahuan yang didapat secara turun temurun dari nenek moyang, bahkan masih terdapat budaya seperti memberi sesajian di salah satu sudut sawah ketika sebelum tanam dan sebelum panen. Setelah adanya Gapoktan, dengan berbagai kegiatan sosialisasi, pelatihan mengenai pertanian, petani memperoleh wawasan dan pengetahuan baru. Pola pikir yang tadinya masih cenderung tradisional, menjadi lebih modern dan terbuka menerima inovasi baru dalam cara bertani. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas dan produktifitas hasil pertanian mereka. Termasuk pemanfaatan lahan, setelah adanya Gapoktan, petani lebih memaksimalkan pemanfaatan lahan persawahan dengan menanam tanaman palawija dan sayuran ataupun komoditi pertanian lainnya seperti kacang hijau dan kedelai pada saat jeda musim kemarau.

Resiko Pertanian juga bisa lebih diminimalisir dengan bekal wawasan dan pengetahuan para petani. Misalnya dalam hal pemberantasan hama yang tidak hanya dengan menggunakan pestisida namun juga dengan pupuk kompos atau organik. Pencegahan hama juga telah bisa dilakukan oleh para petani dengan membakar jerami kering agar benih hama mati terbakar. Penggemburan tanah sebelum musim tanam juga sudah biasa dilakukan dengan mengambil sebagian tanah pada lapisan tanah bagian atas atau biasa disebut *lungka* oleh masyarakat Caruban.

Ancaman utama yang dihadapi petani sebelum terbentuknya Gapoktan ialah kelangkaan pupuk bersubsidi. Sekitar tahun 2007 dan awal 2008 merupakan puncak

kelangkaan pupuk bersubsidi. Penulis tidak akan membahas mengenai penyebab kelangkaan pupuk karena memang bukan bagian dari fokus penelitian. Namun menurut pandangan penulis dan informasi dari beberapa masyarakat desa Caruban, bahwa kelangkaan pupuk itu terjadi karena oknum 'nakal' yang hanya ingin menguntungkan dirinya atau keompoknya. Namun, setelah adanya kebijakan dari pemerintah bahwa petani bisa memperoleh pupuk bersubsidi hanya dengan melalui kelompok tani, maka saat ini petani sudah tidak lagi merasa khawatir terkait kelangkaan pupuk bersubsidi.

Tabel IV.1
IV.3 Dampak Terbentuknya Gapoktan Karya Dadi Utama Bagi Petani

No	Sebelum Dibentuk Gapoktan	Setelah Dibentuk Gapoktan
1	Teknik bertani yang masih tradisional	Teknik bertani sudah modern dan lebih Inovatif
2	Pola pikir masyarakat masih tertutup	Pola pikir masyarakat sudah mulai terbuka dan mau menerima hal baru
3	Pengetahuan dan wawasan bertani masih rendah	Pengetahuan dan wawasan bertani sudah mulai meningkat
4	Pemanfaatan lahan hanya untuk tanaman padi	Pemanfaatan lahan dikembangkan juga untuk tanaman palawija, sayuran, kacang hijau
5	Masyarakat hanya berfokus pada penggarapan lahan persawahan	Masyarakat sudah mengembangkan usahanya seperti berternak dan berkebun
6	Tingkat resiko pertanian tinggi	Resiko pertanian sudah bisa diminimalisir
7	Pendapatan petani masih relatif rendah	Pendapatan petani sudah mulai meningkat
8	Kelangkaan pupuk bersubsidi sehingga petani sulit memperolehnya	Pupuk bersubsidi sudah mudah diperoleh oleh petani
9	Petani kesulitan mencari modal untuk mengembangkan usahanya	Petani bisa mendapatkan pinjaman modal melalui kelompok tani

Sumber: Diolah berdasarkan hasil penelitian tahun 2014

Kesejahteraan masyarakat desa Caruban sudah mulai ada peningkatan seiring dengan berkembangnya Gapoktan. Petani memperoleh pengetahuan dan wawasan mengenai cara bertani yang efektif, efisien, dan modern, mereka mampu memperoleh hasil pertanian yang lebih baik ketimbang sebelumnya. Tingginya produktifitas maka berpengaruh juga dengan peningkatan pendapatan mereka. peningkatan pendapatan petani pada akhirnya berpengaruh juga terhadap peningkatan taraf hidup mereka, sehingga kesejahteraan petani menjadi semakin meningkat.

Dampak yang juga dirasakan oleh masyarakat atas kehadiran Gapoktan tidak hanya dalam hal pertanian atau aspek ekonomi saja. Dampak sosial juga dirasakan oleh masyarakat. Gapoktan juga sebagai sarana belajar dan wadah pertukaran informasi antar petani sehingga relasi yang terjalin dalam kehidupan masyarakat menjadi lebih intim. Dengan ikut bergabung menjadi anggota kelompok tani, masyarakat juga secara tidak langsung belajar mengenai bagaimana mengelola organisasi dengan baik. Mereka dituntut untuk mampu melakukan manajemen organisasi dengan baik agar keberlangsungan organisasi terus berjalan secara ideal.

Relasi yang dibangun dalam kelompok tani terus berlangsung pada kehidupan sehari-hari, sehingga terjalin komunikasi dan hubungan yang ideal dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat desa Caruban seolah menjadi saling membutuhkan satu sama lain, sehingga muncul rasa saling menghargai, melindungi, dan menghormati. Artinya, selain berdampak pada aspek ekonomi, program pemberdayaan juga

berdampak pada aspek sosial kemasyarakatan sehingga terjadi keseimbangan dalam struktur masyarakat itu sendiri.

Tabel IV.2
Perubahan Yang Terjadi Setelah Adanya Gapoktan Karya Dadi Utama

No	Aspek	Penjelasan
1	Struktur masyarakat	Perubahan pada tatanan atau struktur masyarakat Desa Caruban, dimana masyarakat sudah mulai mengorganisasi diri dan berkelompok atau bergabung kedalam kelompok pemberdayaan. Secara bersama-sama masyarakat mencapai tujuan bersama melalui kelompok pemberdayaan.
2	Sosial Ekonomi	Terjadi peningkatan pendapatan masyarakat karena produktifitas produksi mereka meningkat. Program simpan pinjam oleh Gapoktan juga memberikan solusi atas kebutuhan modal petani yang selama ini menjadi kendala utama mereka. Kemudian, rasa saling menghargai, saling membutuhkan, dan kelompok pemberdayaan sebagai sarana belajar dan bertukar informasi menjadikan solidaritas masyarakat semakin kuat. Maka kesejahteraan masyarakat dapat dicapai baik aspek ekonomi maupun aspek sosial.
3	Identitas kelompok	Keanggotaan Gapoktan KDU tidak berdasarkan kelas sosial tertentu, namun lebih bersifat longgar atau menyeluruh. Seluruh petani di Desa Caruban bisa menjadi anggota Gapoktan KDU. Kelompok pemberdayaan lain yang terbentuk juga berdasarkan kesamaan identitas dan tujuan anggotanya. Misal, kelompok ternak, kelompok usaha dagang (tempe, salai pisang), kelompok kesenian, PKK, Karang Taruna.
4	Wawasan petani	Pengetahuan dan wawasan petani menjadi bertambah melalui kegiatan pemberdayaan oleh Gapoktan KDU. Pola pikir masyarakat tani menjadi lebih modern, terbuka, dan inovatif. Petani menjadi berdaya dan mandiri serta bertani secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas dan produktifitas hasil pertanian.

5	Budaya	Masyarakat mulai memahami dan menyadari akan pentingnya menjaga dan melestarikan budaya, adat istiadat, tradisi, dan kesenian tradisional. Muncul upaya untuk mempertahankan dan regenerasi kesenian tradisional kepada kaum muda melalui kelompok kesenian baik kuda lumping, janengan, dan karawitan. Kesenian juga dimodifikasi sedemikian rupa agar menjadi hiburan yang menarik dan mampu memiliki nilai ekonomis bagi para pelaku seni di Desa Caruban.
6	Nilai	Masyarakat mulai menyadari akan pentingnya mengorganisasi diri. Pada cara bertani mulai ada perubahan yang dilakukan dari pola pikir dan cara bertani yang masih tradisional menjadi lebih modern dan pola pikir yang lebih terbuka atau mau menerima inovasi baru dari berbagai sosialisasi oleh Gapoktan. Kemudian, masyarakat menjadi paham bahwa Gapoktan merupakan suatu kebutuhan bagi mereka (petani) untuk meningkatkan kesejahteraan mereka baik dari aspek sosial maupun ekonomi.

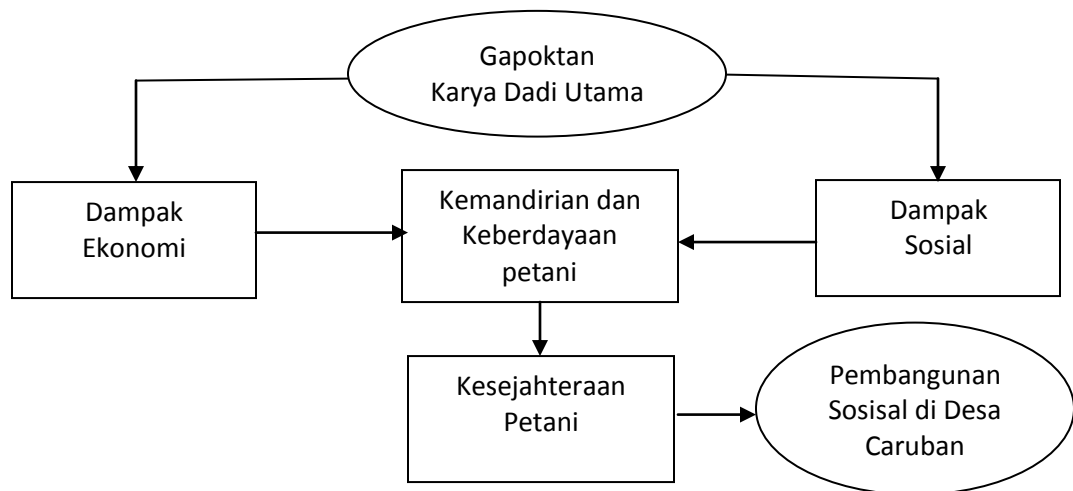
Sumber: Diolah Berdasarkan Hasil Penelitian Tahun 2014

Dari Tabel di atas terlihat bahwa ada perubahan yang terjadi pada masyarakat Desa Caruban setelah adanya Gapoktan. Hal ini menunjukkan bahwa Gapoktan sebagai media perubahan sosial. Perubahan yang paling penting dan mendasar bagi petani ialah perubahan pada aspek ekonomi dimana terjadi peningkatan produktivitas pertanian sehingga hal ini secara langsung mampu menambah pendapatan petani. Dari informasi beberapa masyarakat anggota Gapoktan bahwa terjadi peningkatan produktivitas pertanian mereka dari sebelum adanya Gapoktan dimana rata-rata hasil panen mereka biasanya sekitar 9-10 Kuintal per 100 Ubin lahan sawah meningkat menjadi sekitar 11-12 Kuintal per 100 Ubin lahan sawah setelah adanya Gapoktan. Hal ini tentu saja dengan asumsi jika tidak ada kejadian-kejadian buruk seperti banjir

dan serangan hama yang luar biasa sebagaimana sempat terjadi pada tahun 2013 lalu dimana petani hanya mampu menghasilkan sekitar 5-6 Kuintal per 100 Ubin lahan sawah. Artinya bahwa ada peningkatana produktifitas petani setelah berbagai kegiatan pemberdayaan dilakukan oleh Gapoktan.

Analisa penulis secara keseluruhan, melihat bahwa Gapoktan Karya Dadi Utama melalui kegiatan pemberdayaan berbasis masyarakat memberikan dampak baik dari aspek ekonomi maupun aspek sosial. Dampak tersebut akhirnya mampu mewujudkan petani yang berkualitas, mandiri, dan berdaya. Sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud dan secara tidak langsung hal itu mampu mendorong proses pembangunan sosial di desa Caruban secara umum.

Skema IV.3
Gapoktan Sebagai Faktor Pendorong Pembangunan Sosial



Sumber: Diolah berdasarkan penelitian tahun 2014

D. Analisis SWOT Kegiatan Pemberdayaan Oleh Gapoktan Karya Dadi Utama

Gapoktan Karya Dadi Utama sebagai kelompok pemberdayaan yang memiliki peran penting bagi masyarakat desa Caruban mengupayakan terbentuknya kemandirian dan keberdayaan anggotanya melalui beberapa kegiatan pemberdayaan sebagaimana telah dijelaskan secara rinci pada bab sebelumnya. Analisis SWOT mengenai program pemberdayaan di desa Caruban ini akan memaparkan bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan program pemberdayaan tersebut.

Tabel IV.3
Identifikasi Kegiatan Pemberdayaan Oleh Gapoktan Karya Dadi Utama

Kegiatan	Strength (s)	Weakness (w)	Opportunity (o)	Threat (t)
Aksesibilitas Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Memfasilitasi distribusi pupuk bersubsidi kepada petani - Distribusi pupuk bersubsidi tepat sasaran - Pemerataan distribusi pupuk bersubsidi - Ketepatan pemilihan bibit dan obat-obatan pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> - Mekanisme distribusi pupuk bersubsidi menyulitkan anggota - Pengetahuan administrasi yang masih lemah - Kebutuhan bibit pertanian dan obat pertanian setiap petani berbeda 	<ul style="list-style-type: none"> - Petani tidak lagi kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi - Tidak ada lagi distributor pupuk bersubsidi yang 'nakal' - Pemilihan bibit unggul dan obat-obatan yang tepat dan sesuai kebutuhan sehingga meningkatkan produktifitas - Kerjasama dengan perusahaan pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> - Jika proses pengajuan pupuk bersubsidi (RDKK) tidak tepat, maka anggota tidak mendapat pupuk bersubsidi sesuai dengan kebutuhan - Bibit dan pestisida yang didapat dari mitra swasta tidak sesuai dengan kebutuhan

Simpan Pinjam	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu memberikan modal para petani - Bunga pinjaman menjadi sumber keuangan kelompok tani - Antusiasme masyarakat untuk bergabung dengan kelompok tani menjadi tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyalahgunaan pemanfaatan pinjaman modal - Pengembalian pinjaman yang tidak tepat waktu - Pembuatan laporan pertanggung jawaban oleh pengurus 	<ul style="list-style-type: none"> - Petani bisa meningkatkan produktifitas pertanian dengan tambahan modal - Petani bisa mendapat tambahan pendapatan diluar hasil panen padi (palawija, ternak) - Sarana belajar manajerial keuangan bagi pengurus - Wadah kerja sama dengan pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> - Jika laporan pertanggungjaban dinilai tidak layak pada akhir kepengurusan, maka tidak akan mendapat dana PUAP dari pemerintah pada tahun selanjutnya - Pengurus harus bertanggung jawab jika ada keterlambatan pengembalian oleh anggota
Pengembangan Kapasitas	<ul style="list-style-type: none"> - Sekolah pertanian - Pendampingan - Pelatihan dan Sosialisasi cara penanganan hama dan pembuatan pupuk kompos 	<ul style="list-style-type: none"> - Antusiame anggota kurang - Kegiatan tidak terjadwal dengan baik - Kegiatan tidak kontinu - Mesin pembuatan pupuk kompos bar tersedia satu unit. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok tani sebagai pusat belajar mengajar anatar petani - Sarana pertukaran informasi pertanian - Petani dapat melakukan inovasi pertanian - Petani mendapat pengetahuan dan wawasan baru megenai vara bertani yang modern dan efektif 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih banyak kegiatan lain yang lebih dipilih para petani (beternak, berkebun) ketimbang mengikuti kegiatan pelatihan pertanian - Kekurangan tenaga pendamping dan pemberi materi saat kegiatan pelatihan dilaksanakan

Sumber: Diolah berdasarkan hasil penelitian tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Gapoktan Karya Dadi Utama telah memberikan dampak positif bagi para petani di Desa Caruban dalam rangka memperbaiki kualitas hidup petani di desa Caruban dengan memfokuskan pada pemberdayaan pertanian yaitu aksesibilitas pertanian, simpan pinjam, dan pengembangan kapasitas. Dengan dilakukannya kegiatan pemberdayaan maka petani diharapkan mampu meningkatkan produktifitas pertanian mereka. Upaya memfasilitasi aksesibilitas pertanian yaitu akses pupuk bersubsidi, bibit unggul, dan obat-obatan pertanian atau pestisida menjadi penting bagi petani karena menyangkut kegiatan produksi pertanian. Kegiatan simpan pinjam anggota yang menggunakan sumber dana dari pemerintah menjadi sangat penting bagi petani. Petani sangat terbantu dengan adanya pinjaman modal khususnya pada saat musim tanam tiba. Pinjaman modal juga bisa dimanfaatkan untuk sektor lain yang bisa menambah pemasukan petani misalnya berternak, berkebun, dan tanaman palawija. Namun kegiatan simpan pinjam ini sering terkendala mengenai masalah pengembalian oleh anggota yang terkadang tidak tepat waktu. Kegiatan lain yang juga sangat bermanfaat bagi petani ialah pengembangan kapasitas. Melalui kegiatan ini petani benar-benar diberikan pengetahuan dan wawasan mengenai cara bertani yang modern dan efektif sehingga produktifitas pertanian mereka meningkat.

Kegiatan pemberdayaa oleh Gapoktan ini pada menjadi faktor pendorong terciptanya kesejahteraan petani desa Caruban. Hal ini sesuai dengan definisi kesejahteraan sosial menurut Wilensky dan Lebeaux bahwa kesejahteraan sosial ialah suatu sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga

sosial, yang dirancang untuk membantu individu atau kelompok agar mencapai tingkat hidup yang memuaskan. Maksudnya agar tercipta hubungan peronal dan sosial yang memberi kesempatan kepada individu mengembangkan kemampuan mereka seluas-luasnya dan meningkatkan kesejahteraan mereka sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat.⁶⁴

Tabel IV.4
Analisis SWOT Program Pemberdayaan Gapoktan Karya Dadi Utama

Eksternal	Internal	<p style="text-align: center;">Strenght (S)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaminan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi anggota Gapoktan • Keahlian, wawasan, dan pengetahuan petani meningkat • Pola pikir petani menjadi lebih modern, terbuka dengan hal-hal baru, dan inovatif. • Gapoktan sebagai sarana bertukar informasi dan pengetahuan antar petani • Jaringan sosial petani menjadi lebih luas • Program simpan pinjam sangat bermanfaat bagi anggota untuk mengembangkan diri. 	<p style="text-align: center;">Weknes (W)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manajemen organisasi yang masih lemah • SDM pengusus relatif rendah • Masalah internal organisais • Antusiasme petani masih rendah dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pemberdayaan • Gapoktan kekurangan modal untuk mengembangkan produktivitas kelompok • Keterlambatan pengembalian pinjaman oleh anggota
	Strength (S)	Weknes (W)	

⁶⁴ Mohammad Suud, 2006, *Op.cit.*, hlm: 7.

<p>Opportunity (O)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelompok tani meningkatkan kesejahteraan petani • Pertanian merupakan sektor andalan desa Caruban • Menigkatnya produktivitas pertanian • Perubahan posistif bagi kondisi sosial-ekonomi keluarga petani • Media bekerja sama dengan pemerintah dan memanfaatkan program pemerintah 	<p>SO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merangsang petani agar dapat mandiri, kreatif, dan inovatis dalam bertani • Memberikan peluang kepada petani untuk memiliki pendapatan lain selain dari hasil panen padi (palawija, berkebun, berternak) • Memberikn penyadaran kepada petani akan pentingnya berkelompok • Membangun jaringan dengan Gapoktan lain dan atau institusi pemerintah maupun swasta 	<p>WO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kinerja organisasi agar dapat melakukan inovasi dalam mengadakan kegiatan pemberdayaan dan mengadakan kegiatan-kegiatan baru dalam bidang sosial-ekonomi • Kelompok tani harus aktif dan pandai melihat peluang untuk mengajukan program dan bantuan dari dinas terkait agar Gapoktan bisa semakin berkembang dan bermanfaat bagi petani
<p>Threat (T)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pola pikir masyarakat yang cenderung masih tradisional • Kurangnya dukungan dan peran dari pemerintah desa • Keterlambatan pasokan pupuk bersubsidi • Serangan hama yang merugikan petani • Rendahnya harga jual padi • Pertanggungjawaban pemanfaatan dan PUAP harus tepat agar tetap mendapatkan dana PUAP pada tahun berikutnya 	<p>ST</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengajak seluruh petani untuk bergabung dengan kelompok tani dan mengikuti seluruh kegatan pemberdayaan • Memberikan perubahan dan dampak sosial ekonomi bagi petani dan bagi pembangunan desa Caruban secara umum • Mengajak masyarakat untuk beralih cara dari tradisional ke cara yang lebih inovatif (modern) dalam bertani • Memberikan pelatihan penanganan hama dan pembuatan pupuk 	<p>WT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengajak dan memberikan pendidikan pada petani mengenai cara bertani yang modern dan invatif untuk meningkatkan produktifitas pertanian • Mengajak seluruh elemen masyarakat dan <i>stakeholder</i> desa Caruban untuk bersama-sama berperan dalam pembangunan masyarakat dan desa Caruban • Memproduksi pupuk kompos sebagai alternatif pupuk bersubsidi

	kompos ataupun sekolah pertanian secara berkelanjutan <ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan sistem koperasi dan memfasilitasi proses pemasaran hasil • Memberikan pembelajaran pada anggota agar taat dan rapih secara administrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Memaksimalkan kinerja sie pemasaran hasil Gapoktan KDU • Menghimbau anggota agar taat dalam menepati jangka waktu pengembalian pinjaman • Mengadakan pertemuan rutin dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja organisasi
--	---	---

Sumber: Diolah berdasarkan hasil penelitian tahun 2014

Analisis SWOT diatas menjelaskan bagaimana kelebihan, kelemahan, peluang, dan tantangan Gapoktan Karya Dadi Utama dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan petani yang mandiri dan berwawasan. selain memaparkan mengenai *strenght*, *weakness*, *opportunity*, dan *threat*, tabel analisa diatas juga memberikan rekomendasi dengan menyilangkan keempat unsur SWOT tersebut.

Analisa tentang *strenght*. bahwa kegiatan pemberdayaan menjadikan petani mendapatkan pengetahuan baru mengenai bagaimana cara bertani yang efektif dan inovatif agar produktivitas pertanian meningkat. Program simpan pinjam juga menjadi kekuatan Gapoktan sebagai penyedia pinjaman modal bagi petani baik untuk produksi padi, maupun pengembangan usaha disektor lain seperti berternak, berkebun, dan menanam palawija. Kemudian akses pupuk bersubsidi menjadi hal yang paling penting mengingat hanya melalui kelompok tani para petani bisa memperoleh pupuk bersubsidi. *Strenght* juga digunakan sebagai sarana perluasan

jaringan petani dan media pertukaran informasi antar petanai. Secara umum *strenght* menjadi kekuatan utama Gapoktan dalam mewujudkan petani yang mandiri dan berwawasan modern.

Pada analisa *weakness*, yang melihat kelemahan dari aspek internal, penulis melihat bahwa kendala utama ialah berasal dari internal organisasi dimana keterbatasan SDM pengurus dan juga konflik internal sangat menghambat kesuksesan organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam mengembangkan inovasi kegiatan, Gapoktan juga terkendala masalah modal yang masih sangat minim. Kemudian dari segi petani atau anggota Gapoktan, bahwa sering kali adanya keterlambatan pengembalian pinjaman juga menjadi kendala utama sehingga kelompok tani kesulitan melakukan manajemen keuangan dengan baik. Antusiasme anggota untuk mengikuti program pelatihan, sosialisasi, dan atau sekolah pertanian juga masih relatif kurang. Karena petani memiliki kegiatan lain yang dianggapnya lebih penting seperti misalnya, berternak, berkebun, atau mengurus sektor usaha lain.

Dari aspek eksternal, analisa mengenai *opportunity* juga menunjukkan bahwa sektor pendapatan utama masyarakat desa Caruban ialah pertanian dalam hal ini ialah persawahan. Sehingga kehadiran kelompok tani sangat membantu bagi terciptanya perubahan sosial-ekonomi petani dengan mengupayakan peningkatan kesejahteraan petani. Setelah bergabung menjadi anggota Gapoktan, petani merasakan manfaat dimana mereka mampu melakukan inovasi dan cara bertani yang lebih efektif serta modern yang pada akhirnya produktifitas pertanian mereka semakin baik.

Kurangnya pemahaman para petani akan berbagai kegiatan pemberdayaan dan fungsi Gapoktan secara menyeluruh dan juga pola pikir petani yang masih tradisional menjadi sebuah *threat* (ancaman) bagi keberlangsungan kegiatan pemberdayaan. Minimnya *support* atau dukungan dari pemerintah desa juga mempengaruhi perkembangan Gapoktan sehingga memang dibutuhkan kerjasama dan dukungan menyeluruh dari semua elemen masyarakat desa Caruban agar Gapoktan bisa mewujudkan cita-cita organisasi dan dirasakan kebermanfaatannya oleh petani.

Pemahaman mengenai administrasi juga menjadi ancaman bagi Gapoktan terutama dalam hal pembuatan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dan PUAP kepada dinas terkait. Ketidaksiharian LPJ akan berakibat pada tidak diberikannya dana PUAP pada tahun selanjutnya, maka pendidikan dan budaya rapih administrasi harus terus diberikan dan dilakukan baik kepada pengurus maupun anggota.

Hal yang paling penting untuk diperhatikan ialah masalah penanganan hama, dan keterlambatan pasokan pupuk, hal ini merupakan kebutuhan mendasar bagi petani. Oleh karena itu harus dicarikan solusi jika ancaman tersebut datang. Kemudian dalam hal pemasaran hasil Gapoktan harus mampu mencarikan atas masalah klasik petani yaitu rendahnya harga jual padi. Sesempurna apapun proses pemberdayaan yang dilakukan Gapoktan, akan tidak berpengaruh jika harga jual padi rendah dan akhirnya petani justru mengalami kerugian. Karena harga jual padi merupakan variabel paling penting bagi seluruh petani untuk bisa memperoleh keuntungan dan pendapatan dari kegiatan pertanian yang menjadi sektor pendapatan utama masyarakat desa Caruban secara umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembangunan harus dipandang sebagai proses yang berkesinambungan yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan riil perkapita dan produktivitas masyarakat. Semua konsep pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun kesejahteraan masyarakat tersebut ingin dicapai dengan membangun harkat dan martabat kemanusiaan. Karena pada dasarnya setiap individu berkeinginan untuk membangun kehidupan dan meningkatkan kesejahteraannya dengan kemampuan dan potensi yang dia milikinya.

Pembangunan sosial kemudian diejawantahkan kedalam bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam suatu kerangka pembangunan partisipatif yang dilaksanakan dari, oleh, dan untuk masyarakat yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan. Perencanaan pembangunan desa disusun dengan mengacu kepada perencanaan pembangunan kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Sehingga pembangunan akan terarah dan terencana dengan baik jika kebijakan pembangunan antar pemerintah desa, kabupaten, provinsi, hingga nasional saling terkait satu sama lain.

Proses partisipasi masyarakat Desa Caruban dalam rangka pemberdayaan masyarakat mendasarkan atas dua perspektif. Pertama, pelibatan masyarakat setempat dalam pemilihan, perancangan, perencanaan, dan pelaksanaan, program yang akan mewarnai kehidupan masyarakat. Kedua, partisipasi transformasional sebagai tujuan untuk mengubah kondisi lemah dan marjinal menjadi berdaya, mandiri, kreatif, dan dapat berinovasi.

Sebagai sebuah desa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, serta penggunaan lahan yang lebih banyak digunakan sebagai lahan persawahan, tentunya hal tersebut menjadi potensi utama yang dimiliki oleh desa Caruban. Ketersediaan lahan persawahan di desa Caruban memang terhitung cukup luas, sehingga jelas bahwa sektor pertanian menjadi sektor andalan penduduk desa Caruban. Hasil komoditi tanaman pangan khususnya tanaman padi dan palawija memang sangat potensial untuk dikembangkan di desa Caruban. Selain karena faktor ketersediaan lahan persawahan yang cukup luas dan kecocokan tanah, juga karena faktor iklim yang juga sangat mendukung pengembangan tanaman padi dan juga tanaman palawija sebagai bentuk pemanfaatan lahan bila musim kemarau tiba.

Menciptakan suatu model pertanian yang modern dan inovatif serta memiliki produktifitas tinggi merupakan tujuan akhir pengembangan pertanian di pedesaan. Dengan melimpahnya hasil pertanian, maka akan ada kenaikan pendapatan petani, sehingga kesejahteraan petani dapat terwujud. Dalam proses tersebut, upaya untuk meningkatkan pendapatan petani bukanlah semata-mata tujuan dari pemberdayaan

masyarakat, dimana menciptakan kemandirian, pengetahuan yang luas, dan keberdayaan petani juga menjadi tujuan akhir pemberdayaan masyarakat. Dengan menciptakan petani yang mandiri dan berdaya, maka petani akan mampu secara kreatif, inovatif dalam proses perkembangan pertanian desa dan peningkatan kesejahteraan petani.

Dalam melakukan pemberdayaan, masyarakat desa Caruban menerapkan model komunitas atau kelompok-kelompok program pemberdayaan. Dalam konsep pemberdayaan, model pemberdayaan dengan memaksimalkan peran komunitas memang dinilai sebagai langkah yang paling sesuai dengan kondisi masyarakat kita. Komunitas mengupayakan terbentuknya kemandirian masyarakat dimana prinsip dasar komunitas adalah dengan melakukan segalanya dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Gagasan mengenai komunitas ini merupakan konsep mendasar bagi setiap perspektif pengembangan masyarakat.

Gapoktan Karya Dadi Utama membuat beberapa program kegiatan pemberdayaan yang diperuntukan bagi petani di desa Caruban dalam rangka melakukan pemberdayaan masyarakat. kegiatan pemberdayaan yang dilakukan adalah memfasilitasi akses pupuk bersubsidi, bibit, dan obat-obatan pertanian, kegiatan simpan pinjam anggota, serta pengembangan kapasitas anggota. Dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan ini, Gapoktan KDU menerapkan strategi *community development*, sehingga mengutamakan peran dan partisipasi anggota.

Dari analisis SWOT yang dilakukan penulis, nampaknya Gapoktan KDU telah mampu memberikan dampak positif bagi perubahan sosial-ekonomi masyarakat desa

Caruban. meskipun ada beberapa kelemahan dan juga tantangan yang dihadapi. Upaya pengembangan kapasitas memberikan stimulasi bagi petani untuk memiliki kemampuan dan *power* serta mengubah pola pikir mereka untuk lebih terbuka dan mau menerima hal baru. Maka dari itu, harapan untuk menciptakan petani yang modern, maju, berkembang, dan mandiri semakin mudah dicapai.

Sedangkan program simpan pinjam memberikan kesempatan bagi petani untuk mengembangkan usahanya. Sebelum adanya Gapoktan banyak petani yang terhambat masalah modal untuk mengembangkan pertaniannya. Kini petani bisa dengan mudah mengembangkan usaha pertaniannya tidak hanya pada tanaman padi namun juga tanaman palawija, sayuran, berkebun, atau berternak. Namun, terkadang dijumpai kendala terutama dalam hal pengembalian pinjaman yang mengakibatkan beban pengurus Gapoktan menjadi bertambah. Sehingga perlu ada ajakan dan himbauan serta dibutuhkan sikap kedewasaan masyarakat agar program ini tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Akses terhadap pupuk bersubsidi, bibit unggul, dan obat-obatan pertanian juga menjadi salah satu hal penting yang dibutuhkan masyarakat. Gapoktan hadir dalam rangka memfasilitasi hal tersebut. saat ini masyarakat tidak merasa khawatir lagi akan ancaman kelangkaan pupuk bersubsidi. Masyarakat juga bisa mendapatkan masukan informasi dan fasilitas pengadaan bibit unggul dan obat-obatan pertanian yang sesuai dengan kebutuhan mereka lewat upaya fasilitasi Gapoktan Karya dadi Utama.

Kesadaran masyarakat Caruban akan pentingnya berkolompok nampaknya sudah mulai meningkat. Antusiasme masyarakat untuk bergabung dengan kelompok tani

melalui sub kelompok tani yang ada ditingkat RT ataupun kelompok induk yang ada pada tingkat RW terlihat cukup tinggi. Seluruh RT dan RW di desa Caruban telah memiliki sub kelompok dan kelompok induk. Dari penjelasan ketua Gapoktan bahwa sudah sekitar 95 % petani desa Caruban sudah bergabung menjadi anggota kelompok tani

Kehadiran Gapoktan sebagai institusi perantara dengan melakukan kegiatan pemberdayaan menjadi titik awal perubahan sosial-ekonomi petani desa Caruban. kemandirian dan keberdayaan masyarakat tani sudah mulai terlihat. Peningkatan pendapatan juga terjadi seiring dengan meningkatnya produktifitas pertanian. kesejahteraan masyarakat desa Caruban menunjukkan perubahan yang signifikan. Tidak hanya petani yang mengalami perubahan, namun juga kondisi sosial-ekonomi masyarakat desa Caruban secara umum.

B. Saran

Setelah penulis melakukan serangkaian kegiatan penelitian di desa Caruban, dari mulai proses pencaian data lapangan melalui observasi dan wawancara sampai pada proses penelitian dan analisa data, penulis merasa perlu memberikan saran dan masukan terkait program pemberdayaan masyarakat di desa Caruban. adapun beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian yang penulis kaji ialah:

1. Pembangunan sosial masyarakat di desa Caruban harus terus dilakukan secara konsisten. Melalui model pemberdayaan yang berbasis masyarakat pembangunan sosial akan dapat terwujud secara ideal dan menyeluruh serta tepat sasaran.

2. Mengoptimalkan seluruh kelompok pemberdayaan yang ada baik dalam aspek sosial seperti karang taruna dan PKK, aspek ekonomi seperti Gapoktan, Kelompok Ternak, dan Kelompok usaha dagang makanan (industri rumah tangga), serta pada aspek budaya yaitu kelompok-kelompok kesenian tradisional. Untuk itu dibutuhkan peran serta masyarakat secara menyeluruh serta keterlibatan pemerintah desa agar pembangunan sosial dapat berjalan dengan baik.
3. Oleh karena pertanian sebagai sektor utama pendapatan masyarakat Caruban, maka Gapoktan Karya Dadi Utama sebagai kelompok pemberdayaan bagi para petani perlu dioptimalkan fungsinya. Diperlukan manajemen organisasi yang baik, SDM yang berkualitas, dan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengambil peran dalam kegiatan pemberdayaan. Kepentingan-kepentingan pribadi dari oknum yang tidak bertanggung jawab yang hanya ingin menguntungkan diri sendiri dan atau kelompoknya harus dihilangkan. Konflik internal organisasi juga harus diminimalisir agar roda organisasi tetap berjalan dengan baik.
4. Dalam mengembangkan organisasinya, Gapoktan Karya Dadi Utama harus bisa melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan baru yang kreatif dan inovatif sehingga dampaknya bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Gapoktan KDU dapat mencoba hal baru seperti pendampingan, penumbuhkembangan kelompok, studi banding, kampanye sosial, serta

mengoptimalkan kelompok ternak sebagai bagian tidak terpisahkan dari Gapoktan Karya Dadi Utama.

5. Diperlukan kerja sama yang baik antar pengurus kelompok pemberdayaan dan juga pemerintah desa Caruban untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Caruban.
6. Aktif memperluas jaringan dan menjalin kerja sama yang baik dengan Gapoktan lain, instansi pemerintah seperti Dinas Pertanian dan Peternakan, dan pihak swasta dalam upaya pengembangan kelompok.
7. Memanfaatkan kelompok pemberdayaan sebagai jejaring dengan instansi pemerintah baik ditingkat kabupaten, provinsi, atau nasional agar program-program pertanian, peternakan, industri rumah tangga, kepemudaan, kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya bisa masuk ke desa Caruban. Kelompok pemberdayaan harus lebih aktif dan kreatif mengajukan program-program kemitraan dengan pemerintah atau swasta agar bisa mendapatkan kegiatan baru yang bisa dikembangkan untuk kedepannya.